Gutomo Bayu Aji

Tanah untuk Penggarap

Pengalaman Serikat Petani Pasundan Menggarap Lahan-lahan Perkebunan dan Kehutanan



PUSTAKA LATIN



Buku ini berisi gerakan petani yang dilakukan oleh para petani anggota Serikat Petani Pasundan di Jawa Barat. Dari segi kebaruan, buku ini setidaknya mengandung tiga gagasan baru. Pertama, pemaparan mengenai keterlibatan gerakan mahasiswa di Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis dalam perjuangan SPP sejak akhir tahun 1980-an telah menepis dominasi anggapan bahwa sejarah gerakan mahasiswa di Indonesia hanya terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta. Kedua, pemaparan mengenai dinamika perjuangan SPP telah memberikan warna baru bagi sejarah gerakan petani di Indonesia dari bentuk perjuangan yang tidak terorganisir menjadi perjuangan yang terorganisir melalui serikat tani. Dan ketiga, pemaparan mengenai wacana *land reform by leverage* yang diangkat oleh SPP telah membentuk wacana banding terhadap upaya hukum reformasi agraria yang hanya didominasi oleh kepentingan-kepentingan pemerintah.

Disamping itu, buku ini menyajikan pengalaman yang berharga bagi para aktivis organisasi petani pada masa sekarang, seperti antara lain bagaimana memajukan serikat tani; melibatkan gerakan mahasiswa dan jaringan LSM di perkotaan; membangun basis massa di tingkat lokal; memajukan peran keswadayaan di kalangan petani; membangun jaringan organisasi multi-lokal; melakukan aksi-aksi massa yang besar; serta mengelola sumber-sumber dana dan logistik perjuangan petani secara berkelanjutan. Setelah sekian lama para petani dilarang berorganisasi, kini saatnya belajar membangun organisasi yang kuat, dan, rasa-rasanya buku ini bisa menjadi bekal menuju kesana.

LATIN – Lembaga Analisis Informasi
mfp Multistakeholder Forestry Programme

Gutomo Bayu Aji

Tanah untuk Penggarap

Pengalaman Serikat Petani Pasundan Menggarap Lahan-lahan Perkebunan dan Kehutanan



2005

Tanah untuk Penggarap, Pengalaman Serikat Petani Pasundan Menggarap Lahan-lahan Perkebunan dan Kehutanan,
Gutomo Bayu Aji

Edisi pertama: November 2005
Desain sampul dan lay-out: Agus Sumarno
Foto sampul dan isi buku: Boy Fidro

Diterbitkan Pustaka LATIN kerjasama LATIN dengan MFP

Lembaga Alam Tropika Indonesia (LATIN)
Jl. Sutera No. 21
Desa Situ Gede,
Bogor Barat 16115
Telp. 0251 - 420523 - 24
Fax: 0251-626593
Email: latin@latin.or.id
Websites: www.latin.or.id

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Gutomo Bayu Aji
Tanah untuk Penggarap, Pengalaman Serikat Petani Pasundan Menggarap Lahan-lahan Perkebunan dan Kehutanan
Cet. 1. - - Bogor : Pustaka Latin, 2005
xii + 188 hlm; 14 x 21 cm

ISBN: 979-25-0788-4

Sekapur Sirih

Ketika Supo Raharjo, Direktur Eksekutif LATIN menelepon saya dan memberikan penawaran untuk melakukan penelitian kecil tentang Serikat Petani Pasundan (SPP), saya langsung bersemangat. Bagaimana tidak, minat saya sejak tahun 1995 tertuju pada studi resistensi. Pada tahun itu saya lebih berkonsentrasi untuk melakukan studi tentang perjuangan kaum buruh. Minat saya untuk mengkaji resistensi yang terkait dengan masalah-masalah agraria saya simpan untuk sementara waktu sembari mengumpulkan bacaan-bacaan yang terkait. Baru pada akhir tahun 1990-an ketika saya bekerja sebagai asisten peneliti dalam *re-study* Kaliloro yang dilakukan oleh Ben White, minat saya untuk melakukan studi tentang resistensi ini sedikit tersalurkan. Dari Kaliloro, saya hanya menghasilkan artikel kecil tentang resistensi penduduk desa yang kemudian dimuat dalam jurnal *Populasi*, Pusat Penelitian Kependudukan UGM.[1]

Sejak artikel kecil itu, saya belum memulai lagi menekuni studi tentang resistensi terutama yang terkait dengan masalah agraria. Oleh karenanya ketika Supo menawari penelitian itu, ingatan saya langsung tertuju pada minat studi saya yang (selalu) terhenti itu. Ini merupakan kesempatan untuk membuka lembaran-lembaran minat yang terbengkalai itu.

Sebelum melakukan kerja lapangan, saya hanya mendengar SPP dari beberapa koran yang memberitakan aksi besarnya menentang RUU Perkebunan di DPR RI. Jelas, kondisi ini menggambarkan *lack* antara minat saya yang terbengkalai itu dengan perkembangan gerakan petani yang telah berkembang secara pesat. Mungkin juga studi tentang gerakan petani sudah jauh lebih pesat dan sudah semakin banyak dilakukan. Saya merasa tertinggal begitu jauh walaupun tidak lebih dari tiga tahun saya menelantarkannya. Supo selalu berpesan, "pelajari syarat-syarat minimal yang membuat organisasi itu bisa menjadi besar". Mungkin saat itu Supo juga sedikit terobsesi dengan demonstrasi massa SPP yang dilakukan secara besar-besaran itu.

Ketika saya memulai kerja lapangan, saya baru sadar, "inilah serikat petani yang sesungguhnya". Gambaran awal saya tentang SPP semula seperti LSM, setidaknya karena digerakkan oleh para aktivis LSM, langsung sirna. Saya baru sadar kalau sedang berhadapan dengan serikat petani yang sesungguhnya dan memang harus diakui sungguh-sungguh besar, baik dalam artian jumlah anggota massanya, jalinan dalam struktur organisasinya maupun jangkauan wilayahnya yang meliputi tiga kota sekaligus: Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis. Setidaknya, inilah gambaran serikat petani yang mewakili alam reformasi paska Soeharto.

Sebagai seorang sarjana antropologi yang terbiasa dengan komunitas kecil, terus terang saya sedang menghadapi persoalan metodologis. Tidak seperti biasanya, kali ini saya sedang berhadapan dengan "data yang besar". Darimana seharusnya saya memulai dan bagaimana cara untuk menyelami selanjutnya?, bukan hanya menjadi pertanyaan pribadi tetapi juga muncul selama diskusi-diskusi dengan Meuthia Ghani-Rachman yang bersedia menjadi supervisor penelitian kecil ini.

Akhirnya saya beranikan membuat *outline* yang meng-*cover* serba permukaan tentang SPP. Dengan *outline* ini saya sendiri ragu

apakah bisa menjawab pesan Supo diatas. Dianto Bachriadi yang datang belakangan merombak *outline* awal itu menjadi lebih simpel. Tetapi sayang, dia terlalu sibuk sehingga tidak sempat menulis. Selain itu, penelitian ini sejak awal di *design* bersama dengan Indra Agustiani, seorang aktivis SPP yang diberikan tugas mendampingi saya selama penelitian ini dilakukan. Indra adalah satu-satunya anggota tim penelitian ini. Ia bertugas dengan sangat cekatan, terutama saat mengumpulkan dokumen serta data sekunder yang diperlukan dalam *outline* itu. Sedangkan wawancara-wawancara dan observasi lapangan saya lakukan bersamanya.

Selama mempelajari SPP saya teringat studi-studi tentang gerakan petani yang sudah ada. Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis hampir dilupakan dalam sejarah gerakan petani jika bukan karena "peristiwa Haji Hasan" di Cimareme, Garut dan "pemberontakan pesantren Sukamanah" di Tasikmalaya. Keduanya adalah lembaran sejarah gerakan petani di lokasi yang sama dengan basis massa SPP sekarang yakni sama-sama di bekas wilayah Karisidenan Priangan Timur. Tetapi apakah ada kaitan sejarah antara dua peristiwa itu dengan SPP? Jika sekedar melihat alasan-alasan perlawanannya, jelas keduanya berbeda. "Peristiwa Haji Hasan" tahun 1919 merupakan bentuk perlawanan terhadap pengumpulan panen padi yang berlebihan yang diwajibkan oleh pemerintah Belanda[2] dan "pemberontakan pesantren Sukamanah" pada bulan Februari 1944 merupakan bentuk perlawanan terhadap praktik kekejaman Jepang[3]. Sedangkan SPP merupakan bentuk perlawanan terhadap kebijakan penguasaan lahan pada masa kini yang dirasakan sangat menghimpit kehidupan petani kecil. Dari segi organisasi, jika dua perlawanan sebelumnya dilakukan tanpa organisasi maka SPP menggunakan organisasi sebagai alat perjuangannya. Namun demikian, kendati mempunyai alasan-alasan yang berbeda tetapi setidaknya terdapat benang

merah pada ketiga peristiwa itu yakni perlawanan terhadap produk kebijakan pemerintah yang dirasakan tidak adil.

Untuk sementara waktu penelitian tentang SPP ini saya anggap terpisah dengan sejarah perlawanan petani di Cimareme dan Sukamanah. Penelitian ini lebih terfokus pada masa menjelang lahirnya SPP sampai saat ini. Dapat dikatakan merupakan penelitian gerakan petani yang terorganisir yang mengambil kurun waktu mulai akhir tahun 1980-an sampai sekarang.

Berbagai kelemahan dalam studi ini tentu saja tidak saya pungkiri. Supo selalu mengingatkan jangan sampai tulisan tentang SPP ini hanya menjadi *leaflet* yang berisi profil SPP. Kelemahan yang paling mendasar saya akui dari segi metodologi, dimana saya tidak mampu (atau setidaknya belum) menjawab dengan baik ketika menghadapi "data yang besar" seperti SPP ini. Sampai sekarang, saya masih menyimpan obsesi untuk menyelami lebih dalam.

Selanjutnya, saya harus mengucapkan terima kasih kepada Suporahardjo dan kawan-kawan LATIN yang telah memberi kesempatan baik ini; Indra Agustiani yang telah bersedia mengumpulkan data; Meuthia Ghani-Rachman atas saran-saran konstruktif yang telah disampaikan selama diskusi-diskusi baik secara langsung maupun melalui email; dan Boy Fidro atas pemberian foto-fotonya yang dimuat dalam buku ini. Mudah-mudahan foto-foto itu memberikan makna tersendiri dalam buku ini. Kepada Agustiana, Sekjen SPP, saya sampaikan terima kasih telah memberikan saran-saran terbaiknya; juga kepada Nissa Wargadipura dan Ibang Lukmanudin; Yani dan Inche serta kawan-kawan SPP yang lain.

Penelitian ini mungkin tidak akan banyak artinya jika bukan karena kesediaan kawan-kawan petani anggota SPP yang berada di basis untuk diwawancarai. Cerita-cerita mereka tentang perlawanan seperti di Dangiang dan di Cieceng pada kenyataannya sangat mewarnai isi tulisan di dalam buku ini. Terutama pada bab-bab yang menjadi inti dari tulisan ini seperti antara Bab 4 sampai

dengan Bab 6. Sedangkan pada Bab 1, Bab 3 dan Bab 7 lebih banyak bersumber dari para aktivis "empat sekawan" pendukung SPP: YAPEMAS, FPPMG, FPMR dan FARMACI. Kepada mereka saya juga sampaikan ucapan terima kasih. Dari segi etika, tulisan ini mungkin akan menyinggung perasaan para aktivis yang nama-namanya disebut secara langsung dalam tulisan ini. Untuk itu saya mohon maaf sebesar-besarnya. Penyebutan nama-nama itu bukan bermaksud membocorkan rahasia gerakan yang masih dalam tahap awal ini tetapi semata-mata untuk tidak mengaburkan cerita. Dalam sebuah gerakan, pada kenyataannya peranan seorang aktor menempati posisi yang sangat penting untuk dicermati, bahkan dalam kajian politik, analisis aktor telah mendapatkan tempat tersendiri.

Pondok Gede, November 2005
Penulis

1) Lihat *Populasi Buletin Penelitian Kebijakan Kependudukan* Volume 11 Nomor 1 Tahun 2000, Pusat Penelitian Kependudukan UGM. Versi perbaikan dari artikel ini juga dimuat dalam buku yang Pusat dan Yang Lokal Antara Dominasi, Resistensi, dan Akomodasi Politik di Tingkat Lokal (Pustaka Pelajar dan Pustaka Percik, 2004) yang telah dipresentasikan pada seminar tahunan Percik sebelumnya.
2) Lihat Rosihan Anwar dalam Renungan Sejarah dan Proklamasi Kemerdekaan, "Peristiwa Haji Hasan dari Cimareme 1919.
3) Lihat Aiko Kurasawa (1993:457) dalam *Mobilisasi dan Kontrol Studi tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945.*

Daftar Isi

Sekapur Sirih i
"Jalan ke Sagara" Dinamika Gerakan Mahasiswa di Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis 1
Depolitisasi Kampus 3
Cerita dari "Kelompok Garut" 6
Lahirnya FPPMG 9
Jerat Subversi 13
Dukungan dari Tasikmalaya dan Ciamis 16

SPP dan Dominasi Negara dalam Penguasaan Tanah di Tatar Pasundan 23
Tatar Pasundan 25
Penguasaan Tanah di Tatar Pasundan 26
Posisi Marjinal Kaum Tani 30

SPP dan Organisasi Pendukungnya 39
OTL: Basis Massa SPP 41
Jaringan Organisasi Pendukung 45

Kebangkitan Organisasi Massa Petani 53
Membangun Organisasi Basis 57
Memajukan Keswadayaan 63

Melakukan Aksi Massa 75
Aksi Massa SPP 77
Sumber Pendanaan dan Logistik 80
Senjata-senjata Ideologis: Lagu-lagu Perjuangan 82

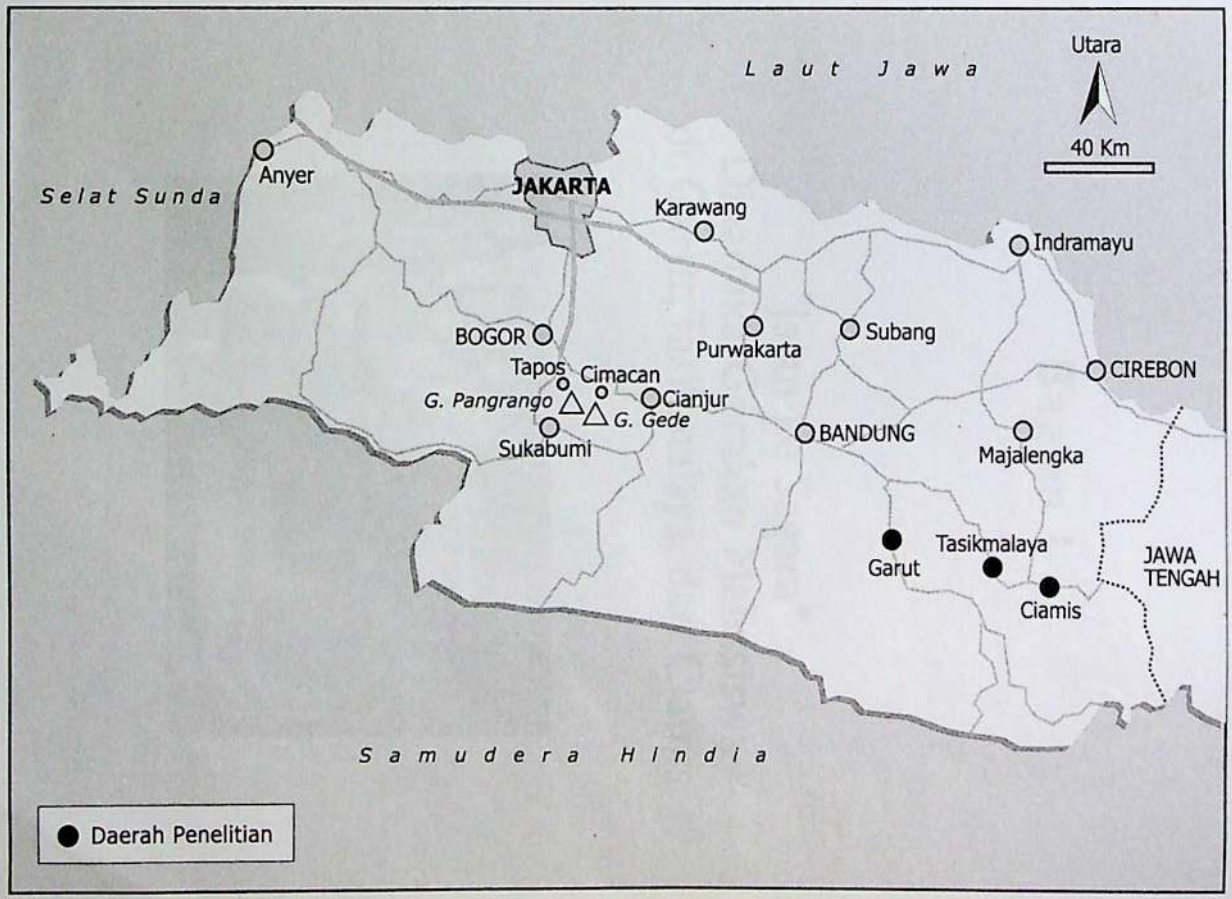
Identifikasi Politik Petani.....91
Pengelompokan Petani.....93
Proses Identifikasi SPP.....94
Jaringan antar OTL.....97
"Preman jadi Kawan".....99
Hubungan Kekerabatan Baru.....101

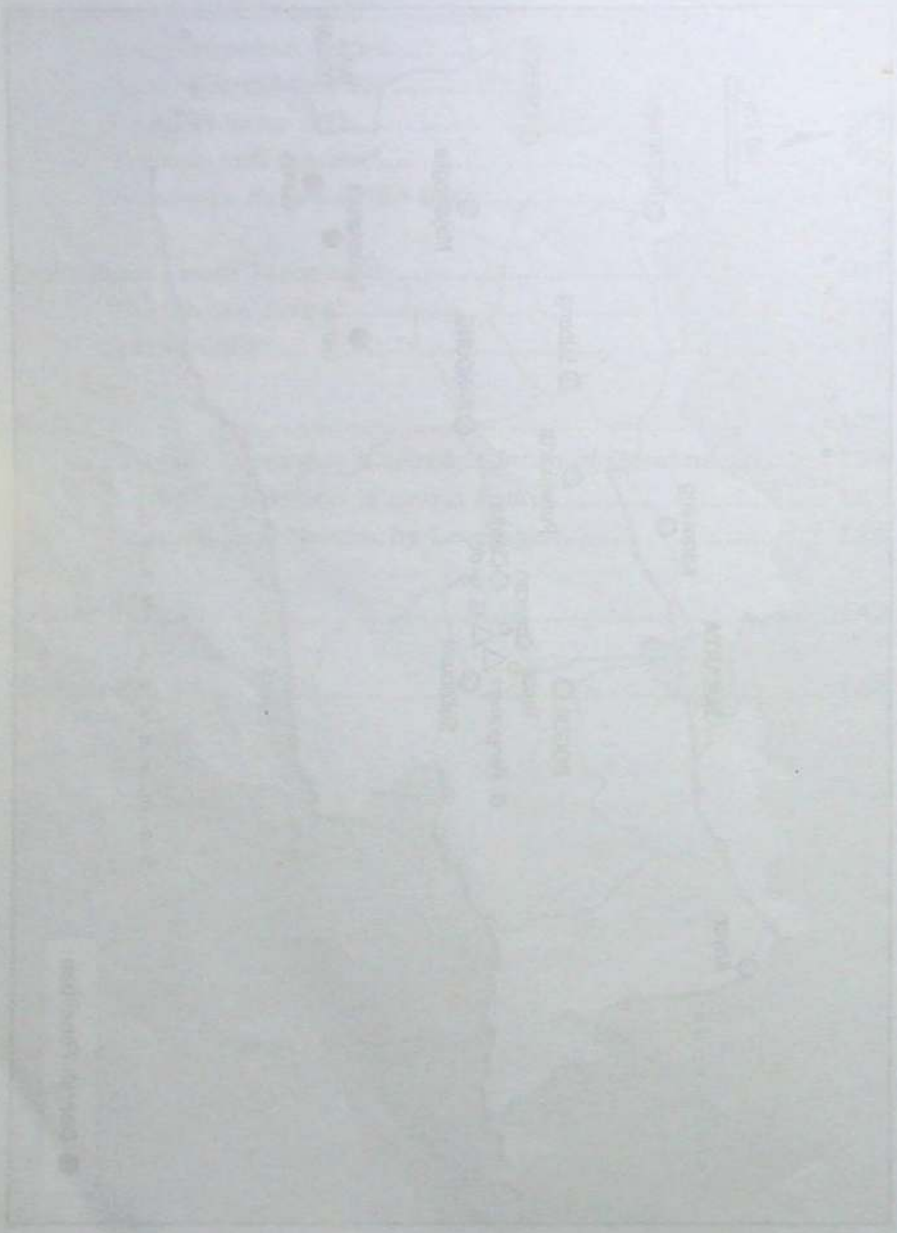
Dukungan Kaum Terpelajar.....107
"Bunuh Diri Kelas".....110
Sekolah SPP.....115

Refleksi.....127
Jumlah Massa dan Kapasitas Internal Gerakan.....129
Kapasitas Bermain di Arena Politik.....134
Wacana Land Reform by Leverage.....135

Daftar Pustaka.....141

Lampiran.....144


Laut Jawa
Utara
40 Km
Selat Sunda
Anyer
JAKARTA
Karawang
Indramayu
BOGOR
Purwakarta
Subang
Tapos
Cimacan
CIREBON
G. Pangrango
Cianjur
G. Gede
Sukabumi
BANDUNG
Majalengka
Garut
Tasikmalaya
JAWA TENGAH
Ciamis
Samudera Hindia
Daerah Penelitian



Bagian I

"Jalan ke Sagara"
Dinamika Gerakan Mahasiswa
di Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis



"Jalan ke Sagara" Dinamika Gerakan Mahasiswa di Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis

Depolitisasi Kampus

Pada tahun 1988, Sidang Umum MPR (1-11 Maret 1988) memilih dan mensyahkan kembali Soeharto sebagai presiden RI untuk yang kelima kalinya.[1] Tidak ada reaksi keras dari berbagai kelompok, termasuk dari kalangan mahasiswa di dalam kampus.[2] Aktivitas (politik) mahasiswa di dalam kampus masih beku sejak peristiwa MALARI 15 Januari 1974[3] dan apel besar Dewan Mahasiswa se-Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1977 yang menyatakan "Ikrar Mahasiswa Indonesia".[4] Ikrar yang kemudian diikuti dengan pernyataan Dewan Mahasiswa ITB pada bulan Januari 1978 itu intinya tidak menginginkan Soeharto kembali sebagai presiden RI. Para mahasiswa ini berunjuk rasa sambil membentangkan spanduk sepanjang 50 meter bertuliskan, "tidak mempercayai lagi kepemimpinan Soeharto".[5]

Setelah peristiwa itu, Soeharto yang secara personal cukup peka dan agak mudah tersinggung itu segera memerintahkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu yakni Daoed Joesoef untuk mendepolitisasi kampus. Konsep *floatting mass* segera diterapkan melalui kebijakan "normalisasi kampus". Pada tahun 1978, Daoed Joesoef mengeluarkan SK No. 0156/U/1978 tentang Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK),

yang kemudian diikuti dengan SK Dirjen Pendidikan Tinggi No. 002/DK/Inst/1978 yang mengontrol mahasiswa di bawah Pembantu Rektor III dan Pembantu Dekan III, serta Surat Instruksi Mendikbud No. 1/U/1978 dan SK No. 037/U/1979 yang melarang keberadaan Dewan Mahasiswa tingkat universitas.[6]

Paket kebijakan ini berlaku sangat efektif setidaknya sampai akhir tahun 1980-an dan awal tahun 1990-an sebelum beberapa kelompok studi mahasiswa mulai bangkit kembali dan berani bersikap kritis terhadap pemerintahan Soeharto. Situasi selama masa depolitisasi itu sebagaimana digambarkan oleh Februana sebagai berikut, "kegiatan kemahasiswaan setelah NKK/BKK itu diarahkan pada pengembangan diri mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat ilmiah. Dan, lebih dari itu, aktivitas mahasiswa berupa demonstrasi dikatakan sebagai kegiatan politik praktis yang tidak sesuai dengan iklim masyarakat ilmiah. Kegiatan kemahasiswaan "dipagari" pada wilayah minat dan bakat, kerohanian, dan penalaran. Selain itu, dalam Tri Darma Perguruan Tinggi dinyatakan bahwa fungsi perguruan tinggi adalah menjalankan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat".[7] Daoed Joesoef sendiri pernah menyatakan bahwa, "apabila mahasiswa terlibat dalam "aksi dan kebijakan" politis, artinya mereka terlibat dalam kegiatan yang in-konsisten dengan misi mereka sebagai mahasiswa, dan karenanya sangat tidak layak dilakukan sebagai seorang mahasiswa".[8]

Sejak saat itu aktivitas mahasiswa di dalam kampus jauh dari muatan politik. Sampai dengan akhir tahun 1980-an dan mulai sekitar tahun-tahun itu hanya beberapa kelompok diskusi mahasiswa yang berani membicarakan masalah politik dan masalah-masalah lain yang berkaitan dengan pembangunan seperti ketidakadilan dan keterbelakangan.[9] Hal itu antara lain ditunjukkan oleh para aktivis mahasiswa di Yogyakarta yang pada akhir tahun 1980-an itu membentuk Kelompok Diskusi Palagan, namun tidak

lama kemudian beberapa aktivisnya ditangkap dan diadili. Kelompok-kelompok diskusi mahasiswa yang lain umumnya berkembang diluar kampus seperti di asrama-asrama mahasiswa dengan strategi 'melingkar' ataupun "bermain kucing-kucingan" dengan intelijen komando teritorial (Kodam, Korem, Koramil) dan kepolisian setempat dengan tetap melakukan pengorganisasian pada rakyat kecil.[10]

Kebijakan yang mengarah pada depolitisasi kampus ini bukan hanya terjadi di kampus-kampus besar yang umumnya berada di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta. Di Garut, sebuah kota kecil di Jawa Barat dengan kampus kecilnya pada waktu itu yakni Sekolah Tinggi Pertanian Gilang Kencana (STP GK) juga merasakan dampak politis dari kebijakan ini. Setidaknya sampai akhir tahun 1980-an dampak politis itu sanga terasa dan kembali kritis mulai akhir tahun itu juga. Munculny Kelompok Diskusi Palagan di Yogyakarta dan KSKPKO pada kasus Kedung Ombo diatas menunjukkan hal itu. Kecenderungan yang hampir sama juga terjadi di kalangan mahasiswa di STP GK Garut pada sekitar akhir tahun 1980-an yang mana pada waktu itu mereka baru berani bersikap kritis atau setidaknya mulai menunjukkan minat belajarnya tentang masalah-masalah yang muncul di seputar pembangunan seperti ketidakadilan dan keterbelakangan.

Munculnya kelompok mahasiswa di Garut ini juga menepis anggapan bahwa gerakan mahasiswa hanya berlangsung di kota-kota besar dan di kampus-kampus besar seperti tahun 1966 di UI, tahun 1974 kembali di UI, tahun 1977 dan 1978 di ITB, akhir tahun 1980-an hingga awal tahun 1990-an di UGM, dan tahun 1998 di Universitas Trisakti yang kemudian diikuti oleh mahasiswa di kampus-kampus diatas serta yang lainnya.[11] Di sebuah kampus kecil di kota yang relatif terpencil seperti Garut pada akhir tahun 1980-an itu sejumlah mahasiswa STP GK memulai kerja besar

membangun gerakan mahasiswa di tingkat lokal. Tidak ada yang menyangka dan karena kebanyakan studi tentang gerakan mahasiswa sampai saat ini masih terfokus pada tokoh-tokoh gerakan mahasiswa nasional di kota-kota besar dan di kampus-kampus besar itu, aktivitas gerakan mahasiswa di Garut hampir dilupakan dalam sejarah gerakan mahasiswa Indonesia. Siapa sangka jika gerakan mahasiswa di Garut ini justru mampu menjaga kontinuitasnya hingga sekarang yakni dengan cara "melebur" menjadi satu bersama dengan gerakan massa rakyat petani kecil di pedesaan?

Cerita dari "Kelompok Garut"

Pada akhir tahun 1980-an yakni tahun 1988, sekelompok mahasiswa dan pelajar di Garut mulai "bangun dari tidur panjangnya" dan mulai belajar mengasah cara berpikir kritis terutama terhadap pemerintahan Soeharto yang sangat berkuasa saat itu. Mereka mulai belajar tentang ketidakadilan yang melanda negeri ini, tentang realitas sosial yang melanda masyarakat bawah disekitarnya. Mereka itu adalah Yani Adnan, Rahmat Kurnia, Deden Setiawan dan Toni Munawar dari STP GK dan satu orang pelajar bernama Yopi yang berasal dari sebuah SLTA di Garut.

Satu tahun kemudian, salah seorang anggota kelompok itu yakni Toni Munawar diperkenalkan oleh Gunadi kepada Agustiana, yang dikenal sebagai seorang aktivis mahasiswa dari Universitas Jayabaya, Jakarta. Agustiana kemudian diperkenalkan kepada anggota kelompok diskusinya. Sejak saat itu Agustiana terlibat aktif dalam kelompok diskusi di Garut ini. Perkenalan mereka dengan Agustiana menciptakan suasana baru di dalam kelompok. Selain dikenal mempunyai jaringan mahasiswa di Jakarta, ia juga dikenal mempunyai hubungan dengan seorang mantan *caretaker* ketua Dewan Mahasiswa ITB dan sekaligus juga seorang tokoh gerakan mahasiswa tahun 1978 yakni Indro Tjahyono.[12]

Pergumulan mereka bersama dengan Agustiana semakin mem-

pertegas visi kerakyatan di dalam kelompok itu. Diskusi-diskusi yang sering mereka lakukan telah memupuk visi kerakyatan yang semakin tinggi. Keberpihakan mereka terhadap rakyat kecil semakin kuat dan menggiring mereka untuk tidak sekedar melakukan diskusi tetapi juga aksi seperti melakukan pendampingan kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat, karang taruna, serta pengajian.

Jaringan mahasiswa dan LSM yang dimiliki Agustiana mulai dimanfaatkan untuk memperkuat aksi-aksi mereka. Selain di Jakarta, Agustiana juga dikenal memiliki kedekatan dengan para aktivis mahasiswa ITB di Bandung. Selain itu, di dalam jaringan ini mereka juga semakin memperlihatkan eksistensinya yakni dengan memberi nama pada kelompoknya dengan Komite Mahasiswa Garut (KMG).[13]

KMG mulai dikenal di kalangan aktivis mahasiswa di Bandung dan Jakarta. Untuk semakin menunjukkan eksistensi mereka diantara kelompok-kelompok aktivis mahasiswa yang lain, mereka ikut menjemput Letjen (Purnawirawan) H.R. Darsono yang telah habis masa tahanannya dari penjara Cipinang, Jakarta.[14] Disamping solidaritas, aksi mereka ini juga menunjukkan keberpihakan serta dukungan mereka terhadap tokoh yang dikenal berseberangan dengan Soeharto itu.

Pada akhir tahun 1989, mereka mengganti nama kelompoknya menjadi Gabungan Pelajar dan Pemuda Garut (GPPG). Penggantian nama kelompok ini dilakukan untuk tidak mengingkari keberadaan Yopi seorang pelajar SLTA di Garut yang telah terlibat dalam diskusi-diskusi itu sejak awal. Disamping itu, tujuan mereka mengganti nama menjadi GPPG juga untuk membuka diri pada kalangan pelajar yang lebih luas.[15]

Setelah berganti nama menjadi GPPG, intensitas mereka "turun ke jalan" semakin tinggi. Tidak hanya di Garut, aksi-aksi mereka juga dilakukan bersama-sama dengan aktivis mahasiswa di

Bandung dan Jakarta. Seiring dengan semakin meningkatnya intensitas "turun ke jalan" itu, mereka juga melakukan pencarian jati diri. Di dalam upaya pencariannya itu, mereka mulai menentukan pilihan keberpihakan dan pengorganisasiannya kepada kaum tani yang miskin dan kekurangan lahan.

Perjalanan mereka mengekspresikan gagasan-gagasan menentang ketidakadilan dan keterbelakangan di dalam kelompok diskusi itu akhirnya tertuju pada kasus sengketa tanah yang telah berlangsung sejak lama di sebuah desa bernama Sagara. Sebuah desa yang terletak di pantai Selatan di wilayah Kecamatan Cibalong, Garut.[16]

Untuk menindaklanjuti ketertarikannya pada kasus tanah Sagara, Agustiana berusaha menemui kepala desanya. Pertemuan pertama berlangsung di kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Garut.[17] Setelah saling berdiskusi, Agustiana langsung menunjukkan niatnya untuk segera membantu menangani kasus tanah itu. Kedatangan Agustiana disambut hangat warga desa Sagara. Pertemuan demi pertemuan mulai sering dilakukan untuk mempelajari persoalan dan upaya penyelesaian sengketa tanah ini.

Pendampingan terus dilakukan walaupun situasinya semakin memanas karena tekanan PT. Perhutani. Pada suatu malam sekitar pukul 23.00, tiga orang penduduk desa Sagara diculik dari rumahnya. Mereka adalah OM (40 tahun), SR (51 tahun), dan BR (71 tahun) yang sebelumnya telah menggarap lahan di kawasan hutan PT. Perhutani. Setelah dilakukan upaya pencarian akhirnya diketahui bahwa mereka ditahan di kantor Kepolisian Resort (Polres) Garut. Setelah beberapa hari ditahan di kantor Polres, ketiga orang ini dikirim ke Rumah Tahanan (Rutan) Garut. Penculikan ini menciptakan ketakutan di kalangan warga desa dan sedikit mengendorkan semangat juang mereka.

Untuk menunjukkan kesungguhannya mendampingi kasus tanah Sagara ini, Agustiana mulai mencari jalan keluar untuk

membebaskan ketiga orang petani yang ditahan itu. Akhirnya, ia menjaminkan dirinya untuk kebebasan tiga orang petani Sagara itu. Dengan jaminan Agustiana ini, tiga orang petani Sagara itu bebas dari tahanan penjara dengan berubah status menjadi tahanan luar.

Pada tahun 1990, aksi-aksi mereka mulai terarah ke gerakan sosial. Jaringannya yang luas memudahkan Agustiana memperoleh dukungan dari beberapa orang aktivis LBH Bandung seperti Melani, Saman, dan Gatot. Setelah saling berdiskusi, mereka menemukan suatu pemahaman yang sama mengenai konflik kepentingan. Pada akhirnya, 20 orang petani dari desa Sagara menguasakan secara hukum atas kasus tanahnya itu kepada LBH Bandung.

Setelah hampir satu tahun dilakukan pendampingan secara hukum, Yani Adnan mulai berpikir tentang strategi memperluas gerakan sosialnya yakni dengan cara kembali menggandeng kelompok mahasiswa. Pada saat itu dipertimbangkan bahwa dengan kekuatan mahasiswa, gerakan sosial akan jauh lebih kredibel di mata militer. Seiring dengan itu pula jaringan mereka dengan kelompk-kelompok aktivis mahasiswa dari Yogyakarta, Solo, Salatiga, Bandung, Jakarta dan kota-kota lainnya semakin kuat. Pada waktu itu, Budiman Sujatmiko juga terlihat ikut mendampingi kasus tanah Sagara ini.[18]

Lahirnya FPPMG

Pada tahun 1992, GPPG diganti namanya menjadi Forum Pemuda, Pelajar, dan Mahasiswa Garut (FPPMG). Penggantian nama ini dilakukan untuk memperluas dukungan dari kalangan pemuda non-mahasiswa dan pelajar.[19] Penggantian nama FPPMG juga menandai semakin tingginya aktivitas serta pergulatan gagasan-gagasan mereka di dalam kelompok. Hal ini menimbulkan konsekwensi lain pada diri Yani Adnan yang merasa sedang men-

galami krisis identitas seiring dengan semakin tinggi intensitas pendampingan mereka. Disamping itu, di mata Yani Adnan, kepemimpinan Agustiana dirasakan sudah terlalu instruktif. Padahal belum semua orang mempunyai persepsi yang sama mengenai arah perjuangan yang mereka lakukan.

Tidak lama berselang setelah penggantian nama FPPMG itu, Agustiana berusaha semakin memperluas dukungan dengan cara memasukkan unsur Islam di dalam kelompoknya sehingga FPPMG diganti namanya menjadi Forum Pemuda, Pelajar, Mahasiswa Islam Garut (FPPMIG). Dengan nama baru FPPMIG, Agustiana mulai melibatkan kalangan santri di dalam gerakannya.[20] Namun usia FPPMIG ini tidak bertahan lama. Setelah tiga bulan diganti lagi menjadi nama semula yakni FPPMG.

Seiring dengan dinamika di dalam kelompok, kegiatan-kegiatan mereka yang melibatkan jaringan semakin banyak. Mereka mulai terlibat dalam gerakan-gerakan koalisi bukan hanya di kalangan mahasiswa tetapi juga kalangan LSM. Pada tahun 1993 misalnya, Agustiana mengikuti acara Forum Refleksi Pendampingan yang merekomendasikan dibentuknya sebuah forum organisasi pendampingan yang disebut dengan Serikat Pendamping Rakyat (SPR). Jalinan organisasi di dalam jaringan ini antara lain WALHI, Bina Desa, SBSI, PRD, PUDI, ALDERA, MPKR, PIJAR, PIPHAM, YAKOMA, SPR, SP, FKPMT dan lain-lain.

Keterlibatannya yang semakin luas di dalam jaringan mahasiswa dan LSM dan konsekwensi dari jaringan itu terhadap menguatnya kasus tanah di desa Sagara, FPPMG mulai dicurigai oleh aparat keamanan sebagai "embrio organisasi komunis". Di mata aparat keamanan, FPPMG pada waktu itu dipersepsikan sama dengan Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) yang dianggap berafiliasi dengan Partai Rakyat Demokratik (PRD) pimpinan Budiman Sujatmiko.[21] Aparat keamanan juga mempersepsikan FPPMG sebagai organisasi yang berkonspirasi dengan

LSM-LSM besar yang ingin membentuk partai komunis. Kondisi keamanan yang semakin represif itu akhirnya membuat beberapa orang aktivis FPPMG tidak tahan dan mulai surut.

"... bahkan bila matahari tiba para aktivis FPPMG baru bisa melakukan aktivitasnya, dan bila malam tiba mereka para aktivis harus bersembunyi di atap maupun mencari tempat persembunyian yang bisa menjaga keamanannya..." (Lukmanudin, t.t., 5)

Untuk mengurangi bahaya suasana represif dari pihak aparat keamanan, para aktivis FPPMG mulai berpikir untuk mendirikan lembaga dengan status hukum yang dianggap legal oleh pemerintah. Pertimbangan keamanan ini akhirnya melahirkan Yayasan Pengembangan Masyarakat (YAPEMAS) pada tahun 1995. Sebuah LSM yang berbadan hukum yayasan didirikan sebagai payung hukum atas kelangsungan gerakan sosial mereka di kalangan petani yang melibatkan jaringan aktivis mahasiswa yang semakin luas itu.

Sampai dengan tahun 1996, kegiatan aktivis-aktivis FPPMG semakin meningkat terutama karena mereka menganggap sudah mempunyai payung hukum yang sah, tetapi di sisi lain kondisi keamanan juga semakin represif. Keanggotaan baru mereka juga semakin bertambah banyak. Beberapa nama yang pernah tercatat sebagai anggota FPPMG pada saat itu antara lain, Mahmud Yunus, Nurjamansyah, Galih F. Qurbani (ketua umum PMII Garut), Hasanudin (ketua senat STIE Garut), Nisa Wargadipura, Ago Yogi Iskandar Wargadipura, Muhendi, Agus Rully Ardiansyah, Iman Taufik, Iman Firmansyah, Irwan Nirwana, Ibang Lukmanudin (seorang santri dari pondok pesantren di Garut), Mimih Khaeruman (aktivis PMII) dan lain-lain. Sedangkan Toni Munawar akhirnya mengundurkan diri dari FPPMG karena menganggap organisasi ini sudah mulai bertentangan dengan UUD 1945.

Pada tahun ini jaringan FPPMG juga semakin luas dan disisi lain hal ini juga semakin menunjukkan eksistensi mereka dianta-

ra kalangan aktivis mahasiswa dan LSM gerakan di Indonesia. Jaringan itu antara lain dengan KPM Muri, PAN, Bina Desa, Infight, YLBHI, LBH Pas, Akatiga, dan berbagai kalangan aktivis dari daerah Bali, Surabaya, Salatiga, Malang, dan lain-lainnya. Solidaritas mereka di dalam jaringan ditunjukkan dengan aksi saling dukung diantara mereka pada berbagai isu yang sedang dihadapi seperti kebijakan yang semakin represif dari aparat keamanan negara yang diterapkan pada penanganan kasus-kasus buruh, petani, penggusuran tanah, perubahan lima paket UU politik, dwi fungsi ABRI, kekerasan militer, sistem sentralisasi, dan reformasi agraria.

Kekuatan jaringan ini juga ditunjukkan oleh para aktivis FPPMG dengan membentuk Komite Solidaritas Rakyat Sagara yang melibatkan berbagai organisasi mahasiswa dan LSM untuk mendampingi kasus tanah di desa Sagara. Di dalam komite ini dibentuk pembagian kerja antara lain WALHI bertugas sebagai dokumentasi kasus; LPHAM, Infight, dan YLBHI bertugas memobilisasi isu; SKEPHI bertugas memberi bantuan pelatihan calon pendamping yang akan masuk ke lokasi baik yang berasal dari mahasiswa maupun sukarelawan paralegal; PAN dan Yayasan Tirta Karang Sari bertugas memberikan informasi tentang prospek perjuangan petani; LBH Bandung bertugas sebagai pemberi kuasa hukum serta pembela persidangan di pengadilan; dan KPMURI serta KEMAGA mendampingi aksi-aksi serta melindungi para aktivis dari tindakan represif aparat keamanan.[22]

Melihat kegiatan FPPMG dan YAPEMAS yang semakin besar, sebagian aktivis yang sebelumnya pernah surut dalam kegiatan organisasi menjadi tertarik untuk aktif lagi. Disamping organisasi yang semakin besar antara lain juga karena pertimbangan persahabatan diantara mereka yang terus terjalin. Diantara mereka yang sudah lulus kuliah mempunyai pertimbangan yang cenderung pragmatis misalnya dengan menyebutkan alasan sebagai

berikut, "daripada belum mendapatkan pekerjaan tetap lebih baik aktif lagi di FPPMG". Sementara itu Yani Adnan yang pernah menganggap kepemimpinan Agustiana yang cenderung instruktif mulai berubah pikiran. Ia merasakan adanya suatu kebutuhan seorang pemimpin yang dianggap kharismatik di kalangan mahasiswa yang belum memahami dengan baik arti demokrasi serta di kalangan warga desa yang sedang didampingi penanganan kasus-kasus sengketa tanahnya.

Jerat Subversif

Tanggal 26 Desember 1996 terjadi peristiwa yang memancing emosi umat Islam di Tasikmalaya. Peristiwa itu dikenal sebagai kerusuhan Tasikmalaya. Kerusuhan ini bermula dari kejadian pemukulan seorang santri oleh petugas keamanan pondok pesantren Riyadul Ulum Wadda'wah atau lebih dikenal sebagai pesantren Condong karena dicurigai sebagai pencuri. Orang tua santri yang dipukul itu mengadukan kejadian ini ke Kepolisian Resot (Polres) Garut dan selanjutnya dilakukan pemanggilan terhadap pengurus pondok pesantren Condong. Upaya penyelesaian di kantor polisi justru menimbulkan masalah baru karena salah seorang anggota polisi yakni Nursamsi melakukan pemukulan terhadap seorang Habib pengurus pondok pesantren Condong itu. Kejadian ini tersebar di kalangan santri dan kalangan pondok pesantren di Tasikmalaya sehingga menyulut kemarahan umat Islam di daerah itu.

Kerusuhan yang melibatkan ribuan massa santri dari kalangan pondok pesantren di Tasikmalaya tidak terhindarkan lagi. Sasaran atau target kemarahan massa ditujukan ke kantor kepolisian yang bersangkutan namun setelah itu meluas ke kantor-kantor polisi di setiap sektor (Polsek). Kerusuhan semakin meluas dan hampir membumihanguskan kota Tasikmalaya. Akibat kerusuhan itu, sebanyak 89 toko milik Cina dirusak oleh massa dan 45 diantara-

nya dibakar; 100 mobil di bakar dan 17 diantaranya mobil BMW; 22 motor di bakar; 3 hotel dirusak; 6 bank swasta dirusak, 8 dealer mobil dirusak dan 6 diantaranya di bakar, 7 super market dirusak, 12 gereja dirusak dan 4 diantaranya di bakar, 16 kantor Kepolisian Sektor (Polsek) dirusak dan 5 diantaranya dibakar, 7 pabrik dirusak, dan 4 sekolah Kristen dirusak.[23]

Peristiwa kerusuhan ini dimanfaatkan oleh aparat keamanan untuk menjerat Agustiana. Berbagai kegiatan yang sebelumnya ia lakukan, dikait-kaitkan dengan peristiwa kerusuhan Tasikmalaya. Bersama dengan Mimih Khaeruman, seorang aktivis PMII yang juga tercatat aktif di FPPMG serta Asep Ilyas (ketua PMII Tasikmalaya) dan Abdul Muis, ia dituduh sebagai aktor intelektual di balik peristiwa kerusahan Tasikmalaya itu. Setelah menjalani masa persidangan yang panjang akhirnya Agustiana divonis selama 8 tahun penjara.[24] Disamping dituduh sebagai aktor intelektual di balik kerusuhan Tasikmalaya, ia juga dituduh telah melakukan tindakan subversif dan dijerat dengan Undang-undang Subversif PNPS nomor 11 tahun 1963. Diantara tuduhan subversif itu antara lain karena Agustiana pernah berunjuk rasa menuntut turunnya presiden Soeharto[25] dan menodai sejarah bangsa dengan melakukan *plesetan* terhadap isi Sumpah Pemuda dalam aksi-aksinya seperti berikut ini,

Sumpah Pemuda

"Kami pemuda Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan".

"Kami pemuda Indoensia mengaku berbangsa satu, bangsa yang berkeadilan".

"Kami pemuda Indonesia mengaku berbahasa satu, bahasa kebenaran."[26]

Sedangkan berbagai kegiatan yang sejak tahun 1989 dilakukan oleh Agustiana untuk membangun kekuatan jaringan gerakan

sosial justru digunakan sebaliknya oleh jaksa penuntut umum untuk menyerangnya antara lain banyak terlibat dalam organisasi terlarang seperti, pendiri FPPMG, koordinator SPR (Serikat Pendamping Rakyat) wilayah Jawa Barat dan DKI Jakarta, ketua Forum Daerah LSM sewilayah Garut, wakil sekretaris PUDI (Partai Uni Demokrasi Indonesia) yang didirikan oleh Sri Bintang Pamungkas, bendaharawan YKPI, sukarelawan pada *Urban Rural Mission* (URM), aktivis ALDERA, penanggung jawab YAPEMAS, dan pengurus pada sekretaris Komite Anti Korupsi dan Kolusi (KONNAK).[27]

Paska kerusuhan Tasikmalaya, selama masa persidangan Agustiana digelar, dukungan dari berbagai kelompok mahasiswa terus berdatangan. Salah satu dukungan datang dari sekelompok mahasiswa dari Universitas Siliwangi dan Universitas Cipasung di Tasikmalaya dengan cara membentuk FKPPMT pada tahun 1996. FKPPMT ini dibentuk sebagai wujud rasa solidaritas kalangan aktivis mahasiswa di Tasikmalaya yang ditujukan untuk mendampingi persidangan Agustiana.

Vonis 8 tahun penjara bagi Agustiana tidak mempengaruhi kegiatan FPPMG untuk surut walaupun kondisi keamanan yang diciptakan oleh aparat keamanan setempat semakin represif. Pada saat itu juga penangkapan demi penangkapan terhadap kalangan aktivis mahasiswa dilakukan di berbagai kota.[28] Di mata pemerintah, kegiatan para aktivis mahasiswa ini sudah dianggap politis. Untuk menghadapi situasi ini, strategi FPPMG diubah dengan memutus hubungan untuk sementara dengan rakyat dan kembali ke kampus menggalang kekuatan mahasiswa. Kesempatan ini juga memberikan peluang bagi para aktivis mahasiswa itu untuk melakukan refleksi seperti kata Yani Adnan yang mana idealisme gerakan mahasiswa waktu itu masih bersifat umum sehingga perjalanannya lebih ditujukan sebagai upaya pencarian identitas ideologis yang antara lain diwarnai oleh pengaruh mayoritas Islam dan

gagasan-gagasan sosialisme.

Dukungan dari Tasikmalaya dan Ciamis

Satu tahun kemudian yakni tahun 1998 terjadi gelombang reformasi yang digerakkan oleh kalangan aktivis mahasiswa.[29] Situasi ini dimanfaatkan Agustiana untuk bebas dari penjara. Setelah kembali bebas, ia melakukan konsolidasi dengan para aktivis FPPMG untuk membangun kekuatan serta memanfaatkan situasi reformasi untuk kembali turun ke basis massa petani. Oleh karena giatnya mendampingi kasus-kasus sengketa tanah seperti kasus Sagara, Selekta, dan Badega, FPPMG dicitrakan oleh aparat keamanan pada waktu itu sebagai "penjarah tanah".

Dukungan untuk mendampingi kasus-kasus tanah juga datang dari FKPPMT di Tasikmalaya. Organisasi yang pada awalnya dibentuk untuk mendukung kasus subversi dalam persidangan Agustiana itu pada tahun 1998 berganti nama menjadi Forum Pemuda, Mahasiswa, dan Rakyat (FPMR). Pada saat itu, FPMR ini sempat dibubarkan oleh sekitar 15 orang aktivisnya tetapi karena kebutuhan pendampingan waktu itu maka pada tahun 1999 FPMR didirikan lagi.

Disamping FPMR, pada sekitar tanggal 28 Oktober 1998 sejumlah aktivis mahasiswa dari Universitas Galuh, Ciamis membentuk Forum Pemuda, Pelajar, dan Mahasiswa Ciamis (FARMACI). Pada awalnya, forum ini dibentuk karena pristiwa penghinaan yang terjadi di dalam kampus. Suatu hari, kampus Universitas Galuh dikirimi kado yang berisi celana dalam oleh orang yang tidak dikenal. Peristiwa penghinaan ini dijadikan momentum untuk membentuk organisasi mahasiswa atau yang selanjutnya disebut FARMACI itu. Hampir sama dengan FPMR di Tasikmalaya, FARMACI juga dibentuk untuk memenuhi tuntutan atas kebutuhan pendampingan kasus-kasus tanah yang mencuat pada waktu itu.

YAPEMAS, FPPMG, FPMR dan FARMACI menjadi jaringan orga-

nisasi aktivis mahasiswa yang sangat solid di tiga kota yakni Garut, Ciamis, dan Tasikmalaya. Situasi reformasi yang terus bergulir pada waktu itu telah memberikan peluang kepada kalangan petani untuk merebut tanah-tanah sengketa dengan perkebunan dan kehutanan. Situasi ini terus berkembang sampai akhirnya dipandang perlu untuk membentuk suatu wadah organisasi untuk menangani kasus-kasus sengketa pertanahan ini. Pada tanggal 24 Januari 2000, para aktivis YAPEMAS, FPPMG, FPMR, FARMACI beserta dengan ribuan massa petani dari desa Sagara, Pamegatan, Jangkurang, Pakenjeng, Cisurupan (Garut), desa Cibenda (Ciamis), dan desa Cieceng (Tasikmalaya) mendeklarasikan berdirinya Serikat Petani Pasundan (SPP) di lapangan di depan *Islamic Center*, Garut.

1) Penunjukan Jenderal TNI Soeharto sebagai Pejabat Presiden oleh MPR dilakukan pada tanggal 12 Maret 1967. Penunjukan ini dimaksudkan untuk menjalankan tugas kepresidenan yang telah diambil alih dari Presiden Soekarno. Satu tahun kemudian Soeharto dipilih secara resmi sebagai Presiden untuk pertama kalinya sekaligus mengawali era Orde Baru . Dalam kaitannya dengan masa jabatan presiden ini, Soeharto selalu menasehati kepada putra-putrinya agar tidak menempatkan diri mereka sebagai anak-anak presiden, karena jabatan presiden itu hanya lima tahun. "Setelah lima tahun kalian anaknya Pak Harto dan Bu Harto, bukan anak presiden lagi," ujar Presiden Soeharto (lihat http://www.seasite.niu.edu). Tetapi "paduan suara" MPR setiap lima tahun sekali yakni tahun 1973, 1978, 1983, dan 1988 selalu memilih dan mensyahkan Soeharto sebagai presiden RI.
2) Dari kalangan TNI sendiri pernah beredar rumor bahwa Panglima TNI waktu itu yakni Jenderal M. Yusuf sedang menyusun kekuatan internal menjadi presiden, tetapi dipatahkan oleh Letjen Benny Moerdani yang pada waktu itu menjadi ketua GI Hankam/Asintel ABRI. Benny Moerdani pun dirumorkan sedang menggalang kekuatan Islam garis keras dengan membuat skenario bertindak sendiri dalam pembebasan pesawat Garuda Woyla yang dibajak oleh kelompok Imran. Atas jasanya itu kemudian Benny Moerdani diangkat menjadi Panglima TNI menggantikan M. Yusuf. Namun staf khususnya yakni Prabowo Subianto mencium atasanya itu menggalang kekuatan menuju presiden. Sebelum Sidang Umum MPR 1988 tepatnya pada tanggal 24 Februari 1988 Benny Moerdani dicopot oleh Soeharto. Setelah itu beredar rumor lagi bahwa Benny Moerdani dan kawan-kawan sedang merancang Sidang Istimewa MPR 1988. Isu kudeta kembali mencuat pada tahun 1991 ketika Soeharto dan keluarga menunaikan ibadah haji namun tidak terbukti (Mukhijab, dalam http://swaramuslim.net).
3) "Peristiwa MALARI yang bermula dari UI terjadi saat Perdana Menteri (PM) Jepang Kakuei Tanaka sedang berkunjung ke Jakarta (14-17 Januari 1974). Mahasiswa merencanakan menyambut kedatangannya dengan berdemonstrasi di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma. Pada peristiwa itu tercatat sedikitnya 11 orang meninggal, 300 luka-luka, 775 orang ditahan. Sebanyak 807 mobil dan 187 sepeda motor dirusak/dibakar, 144 bangunan rusak. Sebanyak 160 kg emas hilang dari sejumlah toko perhiasan" (Aswi Warman Adam dalam http://www.mesias.8k.com).
4) Apel besar Dewan Mahasiswa se-Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1977 antara lain meminta MPR menyelenggarakan sidang istimewa untuk meminta pertanggungjawaban Presiden RI tentang penyelewengan-penyelewengan Pancasila dan UUD 1945.
5) Pangdam Siliwangi saat itu yakni Mayjen Himawan Sutanto yang diperintahkan oleh Pangkopkamtib Soedomo untuk menumpas unjuk rasa itu dianggap membangkang karena membiarkan mahasiswa mempermalukan Soeharto. Pada tanggal 18 Januari 1978 Soedomo turun tangan sendiri dengan melancarkan "operasi kilat" dengan menangkap serentak semua pimpinan dewan dan senat mahasiswa yang menandatangani ikrar 28 Oktober 1977, melokalisasi dan menangkap dalang yang menggerakkan *pressure group* mahasiswa , melarang terbit untuk sementara waktu koran Kampus , *Kompas* , *Sinar Harapan, Pelita* dan *Merdeka,* serta menindak tegas perwira tinggi ABRI yang memberi angin pada gerakan mahasiswa. Belakangan diketahui, bahwa kekerasan militer tersebut ditempuh bukan sekedar memulihkan ketertiban dan keamanan menjelang Sidang Umum MPR 1978, tetapi karena Mayjen Himawan Sutanto dan rektor ITB saat itu yakni Prof. Iskandar Alisyahbana membiarkan Presiden dipermalukan oleh mahasiswa yang mengarak spanduk sepanjang 50 meter itu. Peristiwa di ITB ini adalah gerakan terakhir mahasiswa sebelum akhir tahun 1980-an dan awal tahun 1990-an terutama karena segera dibekukan oleh Daoed Joesoef dengan kebijakan NKK/BKK pada tahun 1978. (Priyo Pribadi Soemarno, dalam http://www.mailarchive.com)
6) Sebagaimana ditulis dalam Human Rights Watch, "larangan yang menimbulkan akibat paling luas terdapat dalam keputusan-keputusan seperti: 1) SK Mendikbud No. 0156/U/1978, yang melarang mahasiswa melakukan aktivitas ataupun ekspresi politik di kampus, tapi membolehkan diskusi "akademis" tentang masalah politik; 2) SK Dirjen Pendidikan Tinggi No. 002/DK/Inst/1978, yang mengontrol aktivitas mahasiswa di bawah pengawasan Pembantu Rektor III Bidang Kemahasiswaan , dengan dibantu oleh Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan di setiap fakultas. Keputusan-keputusan yang dibuat oleh Badan Koordinasi Kemahasiswaan, institusi kampus yang memberikan Rektor kewenangan efektif untuk menunjuk atau menurunkan pemimpin atau ketua-ketua organisasi mahasiswa melalui keputusannya; 3) Surat Instruksi Mendikbud No. 1/U/1978 dan SK No. 037/U/1979, yang melarang keberadaan Dewan Mahasiswa tingkat universitas dan membatasi kegiatan mahasiswa hanya pada kesejahteraan mahasiswa, rekreasi, dan masalah akademis/intelektual" (http://www.hrw.org).
7) Ngarto Februana, "Himpunan Artikel Ngarto Februana", dalam http://www.geocities.com
8) Lihat di http://www.hrw.org diatas
9) Lihat Ngarto Februana diatas. Selain itu, dia juga menggambarkan situasi di dalam kampus sampai awal tahun 1990-an yang menurutnya sangat sulit mengajak mahasiswa untuk berdemonstrasi.
10) Selain Kelompok Diskusi Palagan, pada akhir tahun 1980-an juga dibentuk Komite Solidaritas Korban Pembangunan Kedung Ombo (KSKPKO) yang terdiri dari komite mahasiswa Yogyakarta, Solo, dan Salatiga. Komite ini dibentuk sebagai respon mahasiswa di ketiga kota itu terhadap masalah penggusuran tanah petani kecil yang ter-

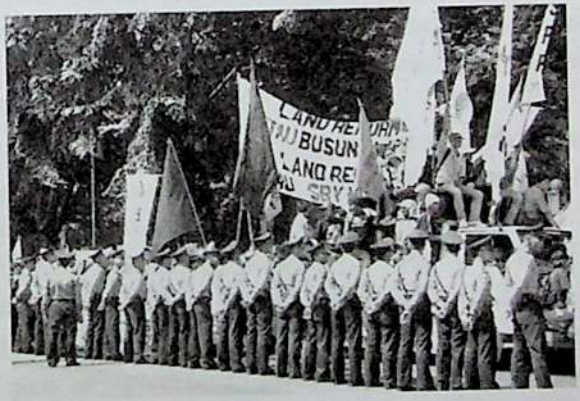
jadi selama pembangunan waduk Kedung Ombo di Jawa Tengah (lihat Februana, ibid). Sedangkan para aktivis MALARI dan gerakan mahasiswa 1977 sejak terjadi penangkapan-penangkapan dan "tragedi militer masuk kampus" pada tahun 1978 mulai terpecah-pecah ke dalam beberapa kelompok baik di dalam kampus maupun di luar kampus seperti kelompok-kelompok LSM.

11) Selain ditunjukan dengan Kelompok Diskusi Palagan, gerakan mahasiswa di Yogyakarta pada awal tahun 1990-an juga ditunjukkan dengan dibentuknya Forum Komunikasi Mahasiswa Yogyakarta (FKMY) yang kemudian pecah menjadi Solidaritas Mahasiswa Yogyakarta (SMY) terdiri dari aktivis mahasiswa UGM, UII, Sarjanawiyata, dan Dewan Mahasiswa dan Pemuda Yogyakarta (DMPY) terdiri dari aktivis mahasiswa ISI, Universitas Janabadra, UMY, dan IAIN Sunan Kalijaga. Selain itu juga dibentuk Komite Rakyat (KR) yang saling bahu-membahu dengan SMY. Tokoh-tokoh KR ini antara lain Sugeng Bahagijo, Budiman Sudjatmiko, Webi Warouw, Yuli Eko Nugroho. Jaringan SMY dan KR di kota-kota lain kemudian membentuk *Student Solidarity for Democracy in Indonesia (SSDI)* yang menjadi cikal-bakal terbentuknya Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) (Lihat Ngarto Februana diatas).
12) Indro Tjahyono sekarang adalah Dorektur Eksekuitf SKEPHI, sebuah LSM yang lahir tahun 1980-an yang bergerak dalam bidang lingkungan. Dalam gerakan mahasiswa 1978, Ia adalah salah seorang dari 17 orang tokoh mahasiswa ITB yang "diciduk" dan diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada "operasi kilat" 18 Januari 1978 yang dilancarkan Pangkopkamtib Soedomo. Tokoh aktivis mahasiswa yang lain antara lain adalah Rizal Ramli, Al Hilal Hamdi, Heri Akhmadi, dan Imadudin Abdulrahim (Daud Sinjal, dalam http://www.aksara.or.id).
13) Bandingkan misalnya dengan komite-komite mahasiswa yang muncul di Yogyakarta pada tahun-tahun itu juga. KMG juga merupakan fenomena bangkitnya gerakan mahasiswa walaupun terjadi di kota kecil dan tidak diuntungkan dengan jaringan mahasiswa antar kampus seperti di Yogyakarta itu.
14) Letjen (Purnawirawan) H.R. Darsono (Macan Siliwangi) juga dikenal sebagai anggota "Petisi 50" yang dipenjara oleh Soeharto pada tahun 1984 (bersama dengan A.M. Fatwa) hanya karena ia bersimpati kepada para korban kasus Tanjung Priok dan dijadikan "kambing hitam" atas peristiwa itu. "Petisi 50" adalah pernyataan keprihatinan yang ditandatangani 50 orang, terhadap pidato Presiden Soeharto di depan Rapim ABRI di Pekan Baru (27 Mare 1980) dan pada HUT Kopasandha di Cijantung (16 April 1980). Pidato tersebut dinilai kalangan "Petisi 50" sebagai, antara lain, membenarkan perbuatan-perbuatan yang kurang terpuji di pihak penguasa untuk secara berencana melumpuhkan UUD 1945, mengajak ABRI untuk berpihak, dan menuduh adanya usaha persiapan bersenjata, subversi, infiltrasi, dan usaha batil lainnya dalam menyongsong pemilu. Para penandatangan tersebut selain Azis Saleh, antara lain adalah Ali Sadikin, AY Mokoginta, Hoegeng, AH Nasution, Kasman Singodimedjo, HM Sanusi, SK Trimurti, Chris Siner Key Timu, Slamet Bratanata, Wachdiat Sukardi, Syafruddin Prawiranegara, Manai Sophiaan, Anwar Harjono, Radjab Ranggasoli, dan Ny D Walandouw. (http://www.Kompas.com)
15) Salah satu pertimbangan penggantian nama ini mungkin karena jumlah mahasiswa di Garut pada tahun 1989 itu belum terlalu banyak sehingga dinilai cukup strategis apabila memasukkan unsur pelajar di dalam kelompoknya yang secara kwantitas jauh lebih besar.
16) Sengketa tanah di desa Sagara mulai ada sejak tahun 1923 (Lukmanudin, t.t., 24). Pemilihan aksi pada kasus tanah ini juga menunjukkan fenomena gerakan mahasiswa akhir tahun 1980-an. Selain Sagara, beberapa kelompok aktivis mahasiswa juga bergabung melakukan aksi pada kasus tanah Badega dan Kedung Ombo.
17) Sebelumnya, seorang pegawai BPN yang bernama Pak Aliman sering menginap di rumah Pak Imid di Sagara. Pertemuannya dengan Pak Umri di rumah Pak Imid itu dilanjutkan dengan pertemuan-pertemuan di kantor BPN. (lihat Lukmanudin, dalam Kisah-kisah Advokasi, tahun ... hal. 312)
18) Pada saat itu Budiman Sujatmiko lebih dikenal sebagai aktivis mahasiswa dari Yogyakarta. Pada saat itu pula jaringan mahasiswa mulai menunjukkan kegiatan yang lebih konret dengan cara saling memberikan dukungan pada kasus-kasus yang dihadapi.
19) Ada kemungkinan karena Toni Munawar menjadi anggota Pemuda Pancasila, organisasi pemuda di bawah naungan Partai yang berkuasa sejak presiden Soeharto yakni Partai Golkar.
20) Salah satu pertimbangan Agustiana mengganti nama FPPMIG antara lain karena daerah Priangan Timur (Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis) ini merupakan basis pesantren. Banyak diantara remaja dan pemuda yang menempuh sekolah di pesantren. Lihat antara lain Aiko Kurasawa (1993:458), "Tasikmalaya, yang terletak di ujung timur Karisidenan Priangan, dikenal sebagai daerah Islam yang taat, dimana terdapat beberapa pesantren dengan disiplin ortodoks".
21) Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) digunakan untuk nama Indonesia dari *Student Solidarity for Democracy in Indonesia (SSDI)* yang dihasilkan pada acara *Student Media Workshop* yang diparkarsai oleh *Asian Student Association (ASA)* tahun 1992 di Puncak. Sedangkan PRD pada awalnya dibentuk sebagai organisasi "paying" namun berkembang menjadi partai politik sejak kepemimpinan Budiman Sujatmiko (Lihat Ngarto Februana diatas)
22) Lihat tulisan Lukmanudin, t.t., p. 11.

23) Perilaku Kekerasan Sosial, PSKP UGM, 1998, tidak diterbitkan.
24) Sedangkan Mimih Khaeruman yang pada waktu itu masih buron dijatuhi vonis 10 tahun penjara, Abdul Muis dijatuhi vonis 2 tahun penjara, dan Asep Ilyas divonis 1 tahun dan 10 bulan penjara. (MATRA, 27/12/1997)
25) Unjuk rasa itu dilakukan oleh Aliansi Demokrasi Rakyat (ALDERA) yang dipimpin oleh Pius Lustrilanang pada rapat pimpinan PDI di Cikopo, Januari 1993, menjelang Sidang Umum MPR. ALDERA mendesak PDI agar tidak mencalonkan kembali Soeharto. "Halangan utama proses demokratisasi adalah Soeharto," ungkap Pius Lustrilanang. (dalam http://www.hamline.edu)
26) Sumpah Pemuda versi gerakan mahasiswa ini sebenarnya juga sangat populer di kalangan aktivis mahasiswa di kota-kota lain seperti di Yogyakarta, Bandung, dan Jakarta.
27) Lihat Laporan Kejaksaan Negeri Tasikmalaya, "Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Subversi atas Nama Terdakwa Agustiana Bin. Suryana", 1997.
28) Penangkapan itu terutama dilakukan terhadap para pengurus pusat PRD yang dicurigai menggalang kekuatan "bawah tanah" untuk memnbentuk Dewan Nasional. Para aktivis PRD yang ditangkap dan kemudian diadili antara lain, 1. Budiman Sudjatmiko (Ketua PRD), 2. Petrus Haryanto (Sekjen PRD), 3. I.G. Anom Swastika (Ketua. Dept. Pendidikan dan Propaganda PRD), 4. Jakobus Kurniawan (Ketua Dept. Organisasi PRD), 5. Dita Indah Sari (Ketua Umum Pusat Perjuangan Buruh Indonesia), 6. Ignatius Pranowo (Sekjen Pusat Perjuangan Buruh Indonesia), 7. Wilson (Ketua Dept. Pendidikan dan Propaganda Pusat Perjuangan Buruh Indonesia merangkap Ketua Dept. Hubungan Internasional dan Ketua Solidaritas Perjuangan Rakyat Indonesia Untuk Maubere), 8. Garda Sembiring (Ketua SMID Cabang Jabotabek), 9. Suroso (Sekretaris SMID Cabang Jabotabek), 10. Ken Budha Kusumandharu (Ketua Dep. Pendidikan dan Propaganda SMID Cabang Jabotabek), 11. Viktor da Costa (anggota SMID Cabang Jabotabek), 12. Ignatius Putut Ariantoko (anggota SMID cabang Purwokerto), 13. Muhammad Sholeh (Ketua Dept. Pendidikan dan Propaganda SMID Cabang Surabaya), 14. Coen Husein Pontoh (Ketua Dept. Pendidikan dan Propaganda Serikat Tani Nasional) (dalam http://www.mail-archive.com, lihat juga http://www.xs4all.nl).
29) Sebagaimana diungkapkan oleh Budiman Sujatmiko, "Dalam sejarah gerakan mahasiswa di dunia, gerakan mahasiswa 1998 yang menjadi embrio gerakan mahasiswa saat ini patut mendapatkan acungan jempol. Gerakan ini tidak hanya bisa memobilisasi jumlah massa yang besar dan berskala nasional, tapi juga bisa menggulingkan sebuah rezim diktator yang telah berkuasa hampir 32 tahun". (*http://www.library.ohiou.edu)*

Bagian 2

SPP dan Dominasi Negara dalam Penguasaan Tanah di Tatar Pasundan



SPP dan Dominasi Negara dalam Penguasaan Tanah di Tatar Pasundan

Tatar Pasundan

Kata Pasundan yang dipakai SPP itu berasal dari kata dasar Sunda. Kata Pasundan biasanya digunakan secara bersama dengan kata tatar menjadi Tatar Pasundan atau Tanah Pasundan. Sebutan ini menunjuk pada suatu wilayah yang terletak di bagian Barat Pulau Jawa. Sekarang, masuk dalam wilayah propinsi Jawa Barat. Di dalam peta topografi yang lama istilah Pasundan ini masih digunakan tetapi di dalam peta topografi yang baru yang dibuat oleh Bakorsutarnal sekarang istilah Pasundan itu tidak digunakan lagi.

Wilayah dan kebudayaan masyarakat Sunda yang terletak di propinsi Jawa Barat berbatasan langsung dengan propinsi Jawa Tengah. Batas wilayah Sunda di sebelah Timur adalah sungai Cimapali namun kemudian bergeser ke sebelah Barat pada sungai Cilosari. Di sebelah Barat, wilayah Sunda berbatasan dengan selat Sunda, di sebelah Selatan dengan Samudera Indonesia dan sebelah Utara dengan laut Jawa. Antara penduduk Sunda dan Jawa Tengah tidak terdapat perbedaan yang menyolok kecuali dari segi bahasanya.

Wilayah Sunda memiliki topografi berbukit-bukit karena berada di daerah dataran tinggi.[1] Berdasarkan informasi yang ada sekitar

2/3 wilayah Sunda merupakan dataran tinggi serta pegunungan. Gunung-gunung yang ada di Tatar Pasundan ini antara lain Gunung Cikuray, Gunung Papandayan, Gunung Guntur, Gunung Talaga Bodas, Gunung Karacak, dan Gunung Galunggung. Dataran tinggi yang bergunung-gunung ini terletak memanjang dari Barat ke Timur di bagian Selatan wilayah Sunda. Dengan demikian hanya sebagian kecil di sebelah Utara wilayah Sunda yang merupakan dataran rendah yang landai.

Istilah Pasundan yang digunakan SPP dan istilah Sunda sebagaimana yang dijelaskan diatas digunakan secara berbeda. Istilah Sunda telah ada sejak munculnya Kerajaan Sunda pada abad ke-8 M sampai runtuhnya pada akhir abad ke-16 (1579) yang pernah berpusat di Galuh, Ciamis, dan Pakuan Pajajaran, Bogor. Sedangkan istilah Pasundan yang digunakan SPP itu digunakan untuk menunjukkan suatu wilayah yang pada masa lalu terletak di Karesidenan Priangan Timur yang meliputi Garut, Ciamis, dan Tasikmalaya.[2] Jadi dapat dikatakan bahwa istilah Pasundan yang digunakan SPP itu mengambil tempat bekas Karesidenan Priangan Timur. Penggunaan istilah ini seolah-olah juga ingin memberikan kesan bahwa wilayah ini mempunyai sejarah sosial yang unik daripada wilayah Sunda (Jawa Barat) secara keseluruhan.

Tabel Kondisi wilayah sengketa tanah SPP (mohon lihat di halaman belakang bagian ini)

Penguasaan Tanah di Tatar Pasundan

Kondisi topografi Tatar Pasundan yang bergunung-gunung, sebagian diantaranya gunung berapi, membuat daerah sekitarnya menjadi subur. Sejak masa pemerintahan Belanda wilayah Tatar Pasundan terutama antara Garut dan Tasikmalaya sudah dimanfaatkan untuk areal perkebunan. Orang Belanda yang tercatat berjasa mengembangkan areal perkebunan dan pertanian di sekitar

Garut ini adalah K.F. Holle.[3] Sejak saat itu tanah-tanah di wilayah Pasundan ini diubah peruntukannya menjadi areal-areal perkebunan.

Beberapa tahun setelah kemerdekaan RI, perusahaan-perusahaan perkebunan Belanda itu dinasionalisasi dan dikuasai oleh pemerintah. Dalam perkembangannya kemudian pengelolaan areal-areal perkebunan itu diserahkan kepada suatu perusahaan negara yang dinamakan PTPN. Praktis, setelah peralihan pemerintahan dari Belanda ke Indonesia masyarakat tidak diberi kesempatan untuk mengelola areal-areal perkebunan yang sangat luas itu.

Luas Perkebunan Besar Negara dan Swasta HGU di Kabupaten Garut

No	Kebun	Nama Perusahaan	Luas HGU	Jumlah
I.	Perkebunan Besar Swasta			
1	Condong	PT Condong Garut	8.021,4000	
2	Pamegatan	PT. Mandala Giri Utama	1.690,5900	
3	Selekta	PT. Harjasari	107,0572	
4	Gunung Badega	PT. Chakra	422,3000	
5	Megawati	PT. Urya Andaka Mustika	413,4500	
6	Neglasari/ Gn Gajah	PT. Tatar Anyar Indonesia	1.340,2969	
7	Baru Ulis	PT Bumi Prada	34,2210	
Jumlah				12.029,3151
II	Perkebunan Besar Negara			
1	Bunisari Lendra		4.082,8750	
2	Dayeuh Manggung		1.205,4025	
3	Papandayan		1.991,4768	
4	Mira Mare		4.267,4000	
5	Cisaruni		1.723,5360	
Jumlah				13.270,6903
Total				**25.300,0054**

Sumber: Dinas Perkebunan Pemda I Jawa Barat tahun 1998, rangkuman data Klasifikasi Perkebunan Besar tahun 1997/1998, dalam laporan TPRHR, LATIN.

Pada masa selanjutnya, penguasaan lahan-lahan milik masyarakat justru semakin terjepit oleh PT. Perhutani, sebuah perusahaan milik negara yang diberi konsesi pengelolaan hutan di tanah Jawa. Seluruh tanah hutan diluar hak milik masyarakat secara

resmi dikuasai oleh negara melalui PT. Perhutani ini. Penguasaan ini telah memberikan legitimasi kepada negara untuk mengusai seperempat tanah di Jawa yang berupa hutan (Peluso, 1992). Dengan demikian, masyarakat di daerah tatar Pasundan ini hanya menguasai sedikit tanah-tanah milik yang tersisa dari perkebunan dan kehutanan itu.

Luas Kawasan Hutan yang Dikuasai Negara di Kabupaten Garut, Tahun 2001

No	Jenis dan Fungsi Hutan	Luas (Ha)	% Dari Luas Hutan	% Dari Luas Kabupaten (306.519 Ha)
I.	Kawasan Hutan Negara			
1	Hutan Lindung	55.432,78	44,65	18,08
2	Hutan Produksi	40.873,04	32,92	13,33
3	Hutan Konservasi/Cagar Alam	17.215,15	13,87	5,62
4	Taman Wisata Alam (TWA)	748,65	0,60	0,24
Jumlah I		114.269,62	92,04	37,28
II.	Hutan Milik/Hutan rakyat	9.880,00	7,96	3,22
	Jumlah II	9.880,00	7,96	3,22
	Total	**124.149,62**	**100,00**	**40,5**

Sumber: Disbunhut Kabupaten Garut 2001, dalam laporan TPRHR, LATIN

Luas Kawasan Hutan yang Dikuasai PT. Perhutani KPH Garut

Bagian hutan	Luas (Ha) Hutan Produksi	Luas (Ha) Hutan Lindung	Jumlah
Garut Barat	13.358,62	28.905,11	42.263,73
Garut Timur	13.981,36	30.985,13	44966,49
Pameungpeuk	8.782,00	293,60	9075,60
Jumlah	**36.121,98**	**60.183,84**	**96.305,82**

Sumber: PT Perhutani Garut tahun 2002, dalam laporan TPRHR, LATIN

Sebagai ilustrasi disajikan penguasaan lahan di wilayah Kabupaten Garut sekarang ini. Dari data yang tersedia, penguasaan lahan di wilayah Kabupaten Garut didominasi oleh jenis usaha lahan kering berupa pertanian, perkebunan, dan kehutanan yang mencapai 95% dari total luas wilayah Kabupaten Garut atau seki-

tar 306.519 Ha (3.065,19 km²).

- Lahan sawah seluas 49.912 Ha atau 16,3%;
- Lahan kering (tegalan dan kebun campuran) seluas 97.401 Ha atau 31,8%;
- Lahan perkebunan seluas 35.756,23 Ha atau 11,7 %;
- Lahan kehutanan seluas 108.741,14 Ha atau 35,5%;
- Penggunaan lahan lainnya untuk pemukiman sebesar 11.235 Ha atau 3,7 % dan industri sebesar 26 Ha atau 0,1 % (Sumber: TPRHR, 2002).

Sementara itu jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Garut mencapai 2.044.129 jiwa (tahun 2000) dengan pertambahan dari tahun sebelumnya sebesar 6%. Dengan jumlah penduduk sebesar itu tingkat kepadatan penduduknya mencapai rata-rata 667 jiwa/Km². Sedangkan tingkat kepadatan di wilayah kecamatan Garut Kota mencapai 4.847 jiwa/Km^2.

Melalui perhitungan kasar diatas bisa diperoleh gambaran sementara mengenai rata-rata penguasaan lahan milik masyarakat yakni sekitar 0,15 Ha. Perkiraan kasar ini belum mengeluarkan luas lahan perkebunan dan kehutanan sehingga kemungkinan penguasaan lahan oleh masyarakat akan jauh lebih kecil atau bahkan banyak diantaranya yang tidak menguasai lahan-lahan garapan. Munculnya kasus-kasus sengketa tanah di sekitar perkebunan dan kehutanan di Tatar Pasundan ini mencerminkan bahwa masyarakat sangat membutuhkan lahan-lahan pertanian di areal-areal yang sangat luas yang dikuasai perkebunan dan kehutanan.

Perkiraan ini juga semakin kuat dengan informasi yang diperoleh dari kalangan petani sebelum mereka menjadi anggota SPP. Banyak diantara mereka sebelum menjadi anggota SPP tidak memiliki lahan garapan sama sekali. Untuk mempertahankan hidup di desa, mereka bekerja sebagai buruh perkebunan atau butuh tani di tanah milik tuan tanah di desanya. Sementara itu

banyak lahan-lahan kehutanan yang tidak produktif hanya bisa dimanfaatkan untuk *pengangonan* atau penggembalaan ternak tetapi itupun dilarang oleh petugas PT. Perhutani.

Posisi Marjinal Kaum Tani

Penguasaan lahan-lahan pertanian yang sempit antara lain ditunjukkan dengan keberanian kaum tani ini memasuki lahan-lahan milik kehutanan. Mereka memanfaatkan lahan-lahan kosong yang tidak digarap oleh pihak kehutanan. Umumnya lahan-lahan itu berada di daerah yang curam ataupun tandus. Lahan-lahan itu dimanfaatkan kaum tani ini untuk bercocok tanam seperti jagung, ubi, pisang, dan sayur-sayuran. Jenis-jenis tanaman ini digunakan untuk mencukupi kebutuhan pangan keluarga mereka sehari-hari.

"Saya awalnya dulu ingin mengambil kembali tanah tapi jumlah (kita) Cuma beberapa orang saja. Hal ini dilakukan karena saya sangat membutuhkan tanah itu. Kalau melihat ke belakang waktu masyarakat disini bisa menggarap secara turun-temurun, rakyat kelihatannya sejahtera dan di setiap (penjuru) memanen jenis tanaman lainnya. Tapi ternyata kedatangan perkebunan itu terasa seperti mencekik leher sendiri". (UT, petani desa Dangiang, Garut)[4]

"Pengusiran selalu terjadi jika kayu sudah berumur 5 tahun, sesudah itu kita bisa menggarap kembali, pokoknya selang hingga 10 tahun. Maksudnya begini, tahun ini kayu ditebang dan warga diperbolehkan menggarap dengan tanaman tumpangsari selama 5 tahun. Setelah itu warga diusir dan harus menunggu sampai umur 10 hingga 15 tahun. Yang mengusir Mantri Kahutanan, Lurah, dan BOMD (Bintara Onder Distrik Militer), dulu masih kerja sama dengan BOMD"(EP)[5]

"Saya masih ingat, Bapak saya pergi mencari kayu bakar dari hutan untuk membeli beras. Saya juga masih ingat gara-

gara hal itu Bapak di bawa ke Garut, ditahan seminggu" (JL)[6]

Menurut catatan statistik, jumlah petani di wilayah Kabupaten Garut yang menggantungkan hidupnya pada jenis mata pencaharian pertanian mencapai 1.289.845 jiwa atau sekitar 63% dari jumlah penduduk. Sementara itu, BKKBN mencatat angka kemiskinan di daerah ini terus meningkat. Menurut data BKKBN, jumlah penduduk miskin di wilayah Kabupaten Garut mencapai 628.100 jiwa atau sekitar 31% dari jumlah penduduk. Walaupun tidak dirinci secara spesifik, namun bisa diduga sebagian penduduk miskin itu adalah mereka yang tidak menguasai lahan-lahan garapan itu.

Apabila melihat angket 'Daftar Isian Pendapatan Keluarga' yang pernah diedarkan oleh para aktivis pendukung SPP terlihat bahwa sebagian besar anggota SPP ini mengaku bekerja sebagai buruh tani dan 'petani gurem'. Pada daftar isian pendapatan misalnya, diisi oleh sebagian besar kaum tani dengan rentang antara Rp400 ribu sampai dengan Rp500 ribu setiap bulannya. Sementara itu pada daftar isian berbagai jenis pengeluaran diketahui bahwa jumlah pengeluaran mereka setiap bulannya mencapai rentang antara Rp500 ribu sampai dengan Rp1 juta.

> *"Saya dulu kalau bekerja menumbuk padi sebaganyak 5 geuges dapat setengah geuges. Bekerja dari pagi hingga jam 4 sore.Begitu juga akalu bekerja melakukan gacong dibayar 10 kg, 9 kg untuk yang punya serang (sawah), untuk saya 1 kg. Waktu itu harga beras cuma Rp250,-. Kalau bekerja membersihkan sawahh dari jam 7 sampai jam 12, Cuma dikasih upah 3 cuntang/cangkir" (ON, petani perempuan dari desa Dangiang, Garut)*[7]

Biaya hidup yang semakin memberatkan kehidupan rumah tangga kaum tani ini terutama berasal dari biaya sekolah dan sumbangan sosial. Setelah tamat SD, anak-anak kaum tani ini harus sekolah diluar desanya karena di desa tidak ada sekolah lanjutan. Untuk mencapai sekolah lanjutan itu anak-anak ini harus menge-

luarkan ongkos kendaraan yang jumlahnya bisa lebih besar dari pendapatan orang tua mereka setiap harinya. Sedangkan sumbangan sosial tidak bisa dihindari karena menyangkut hubungan keluarga dan tetangga.

Keadaan ini menyebabkan anak–anak putus sekolah. Sekitar 80% tingkat pendidikan petani kecil dan buruh tani ini adalah SD. Jaraknya yang jauh dan mahalnya biaya untuk meneruskan sekolah adalah alasan diantara putus sekolah. Pada pertengahan tahun 2004 misalnya, ongkos pergi ke sekolah di kota kecamatan sebesar Rp5.000,- sehingga ongkos pulang-pergi Rp10.000. Sementara umumnya pendapatan orang tua anak-anak petani kecil dan buruh tani ini berkisar Rp 12.000,- per hari. Dengan kondisi upah sebesar itu mereka tidak mungkin menyekolahkan anak-anaknya, tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan karena harga obat dan pelayanan dokter mahal.

1) Kabupaten Garut terletak pada ketinggian 0-2.200 m dpl dan kemiringan lahan yang umumnya diatas 15%, memiliki curahh hujan rata-rata 2.589 per tahun, tipe iklim C dengan bulan basah berlangsung 9 bulan, bulan kering 3 bulan, serta rata-rata hujan 23 hari per bulan, suhu rata-rata berkisar 24° C-29° C. (Tim Teknis Penanggulangan Perambahan Hutan di Kabupaten Garut, 2004)
2) Pada masa lalu, wilayah Priangan atau Parahyangan mencakup Cianjur, Bandung, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis. Di sebelah Utara, wilayahnya dibatasi oleh Kerawang, Purwakarta, Subang, dan Indramayu, sedangkan di sebelah Timur dibatasi oleh Majalengka dan Kuningan yang sama-sama menggunakan bahasa Sunda. Sedangkan wilayah Karesidenan Priangan Timur yang dipimpin oleh seorang Residen terdiri dari Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis (http://su.wikipedia.org).

3) Lihat http://www.sundanet.com
4) Dikutip dari Nissa Wargadipura, t.t., tidak dipublikasikan.
5) Ibid.
6) Ibid.
7) Ibid.

KONDISI WILAYAH SENGKETA TANAH YANG DIKELOLA SPP (GARUT - TASIKMALAYA - CIAMIS)

No.	Desa	Kecamatan	Pihak yang bersengketa	Kawasan	Karateristik	
					Topografi	Ekologi
A.	**Garut**					
1.	Sagara	Cibalong	PT Perhutani	Leuweng Sancang	Berbukit-bukit	Kebun, ladang kering, huma, petani palawija
2.	Karyasari	Cibalong	PTPN VIII Bunisari lendra	Leuweng Sancang	Datar	Perladangan atau kebun petani palawija
3.	Mekarsari	Cibalong	PTPN VIII Bunisari lendra	Leuweng Sancang	Datar	Perladangan atau kebun, petani palawija
4.	Karyamukti	Cibalong	PT Perhutani	Leuweng Sancang	Berbukit-bukit	Kebun, ladang kering, huma, petani palawija
5.	Sindangsari	Cisompet	PTPN VIII Bunisari lendra	Gunung Geulap	Datar	Persawahan, lading kering (huma) dan kebun, petani palawija
6.	Neglasari	Cisompet	PTPN VIII Bunisari lendra	Gunung Geulap	Datar	Persawahan, lading kering (huma) dan kebun, petani palawija
7.	Jatisari	Cisompet	PTPN VIII Bunisari lendra	Gunung Geulap	Datar	Persawahan, lading kering (huma) dan kebun, petani palawija
8.	Sukasenang	Cisurupan	PT Perhutani	Gunung Papandayan	Berbukit	Kebun (holtikultura) , balong-balong, persawahan
9.	Sukatani	Cisurupan	PT Perhutani	Gunung Papandayan	Berbukit	Kebun (holtikultura) , balong-balong, persawahan
10.	Sukawargi	Cisurupan	PT Perhutani	Gunung Papandayan	Berbukit	Kebun (holtikultura) , balong-balong, persawahan
11.	Karamatwangi	Cisurupan	PT Perhutani	Gunung Papandayan	Berbukit	Kebun (holtikultura) , balong-balong, persawahan
12.	Pangauban	Cisurupan	PT Perhutani	Gunung Papandayan	Berbukit	Kebun (holtikultura) , balong-balong, persawahan
13.	Cipaganti	Cisurupan	PT Perhutani	Gunung Papandayan	Berbukit	Kebun (holtikultura) , balong-balong, persawahan
14.	Margamulya	Cikajang	PT Perhutani	Gunung Papandayan	Berbukit	Kebun (holtikultura) , balong-balong, persawahan
15.	Dangiang	Cilawu	PTPN VIII Dayeuh Manggung	Gunung Cikuray	Berbukit	Kebun (holtikultura) , balong-balong, persawahan
16.	Mekarmukti	Cilawu	PTPN VIII Dayeuh Manggung	Gunung Cikuray	Berbukit	Kebun (holtikultura) , balong-balong, persawahan
17.	Sukamukti	Cilawu	PTPN VIII Dayeuh Manggung	Gunung Cikuray	Berbukit	Kebun (holtikultura) , balong-balong, persawahan
18.	Sarimukti	Pasirwangi	PT Perhutani	Gunung Darajat		Kebun (holtikultura) , balong-balong, persawahan
19.	Mekarjaya	Sukaresmi	PT Perhutani	Gunung Darajat	Berbukit-bukit	Kebun (holtikultura) , balong-balong, persawahan
20.	Tegallega	Bungbulang	PBS Condong	Gunung Kembar	Berbukit	Persawahan, lading kering (huma) dan kebun, petani palawija
21.	karangwangi	Bungbulang	PBS Condong	Gunung Kembar	Berbukit	Persawahan, ladang kering (huma) dan kebun, petani palawija
22.	Sinarjaya	Bungbulang	PBS Condong	Gunung Kembar	Berbukit	Persawahan, ladang kering (huma) dan kebun, petani palawija
23.	Jangkurang	Leles	Manipulasi Sertifikasi	Gunung Mandalawangi dan gunung Guntur	Berbukit	Kebun (holtikultura) , balong-balong, persawahan
24.	Rancasalak	Kadungora	Manipulasi Sertifikasi	Gunung Mandalawangi dan gunung Guntur	Berbukit	Kebun (holtikultura) , balong-balong, persawahan
25.	Mandalasari	Kadungora	Manipulasi Sertifikasi	Gunung Mandalawangi dan gunung Guntur	Berbukit	Kebun (holtikultura) , balong-balong, persawahan

26.	Hegarsari	Kadungora	Manipulasi Sertifikasi	Gunung Mandalawangi dan gunung Guntur	Berbukit	Kebun (holtikultura) , balong-balong, persawahan
27.	Sukamulya	Pakenjeng	PT Perhutani	Gunung Halimun	Berbukit	Persawahan, ladang kering (huma) dan kebun, petani palawija
B.	**Tasikmalaya**					
28.	Tanjung karang	Cigalontang	PT Perhutani	Gunung Karacak	Berbukit-bukit	Kebun (holtikultura) , balong-balong, persawahan
29.	Nagrog	Cipatujah	PT Perhutani		Berbukit	Persawahan, ladang kering (huma) dan kebun, petani palawija
30.	Sindangasih	Cikatomas	PTPN VIII Bagjanegara		Berbukit	Persawahan, ladang kering (huma) dan kebun, petani palawija
31.	Sindangasih	Cikatomas	PT Perhutani		Berbukit	Persawahan, ladang kering (huma) dan kebun, petani palawija
32.	Neglasari	Pancateungah	PT Perhutani		Berbukit	Persawahan, ladang kering (huma) dan kebun, petani palawija
33.	Ciandung	Ciandung	PT Perhutani		Berbukit	Persawahan, ladang kering (huma) dan kebun, petani palawija
C.	**Ciamis**					
34.	Margaharja	Sukadana	PT Perhutani		Berbukit-bukit	Persawahan, ladang kering (huma) dan kebun, petani palawija, peternakan ayam, balong-balong
35.	Pamotan	Kalipucang	PT Perhutani		Berbukit-bukit	Persawahan, ladang kering (huma) dan kebun, petani palawija
36.	Bangunkarya	Langkaplancar	PT Perhutani		Berbukit-bukit	Persawahan, ladang kering (huma) dan kebun, petani palawija
37.	Kalikaya	Banjarsari	PT Perhutani		Berbukit-bukit	Persawahan, ladang kering (huma) dan kebun, petani palawija
38.	Jadikarya	Langkaplancar	PT Perhutani		Berbukit-bukit	Persawahan, ladang kering (huma) dan kebun, petani palawija
39.	Bojong	Parigi	PT Perhutani		Berbukit-bukit	Persawahan, ladang kering (huma) dan kebun, petani palawija
40.	Bagolo	Kalipucang	PT Perhutani		Berbukit-bukit	Persawahan, ladang kering (huma) dan kebun, petani palawija
41.	Selasari	Parigi	PT Perhutani		Berbukit-bukit	Persawahan, ladang kering (huma) dan kebun, petani palawija
42.	Pasawahan	Banjarsari	PT Perhutani		Berbukit-bukit	Persawahan, ladang kering (huma) dan kebun, petani palawija
43.	Cigayam	Banjarsari	PT Perhutani		Berbukit-bukit	Persawahan, ladang kering (huma) dan kebun, petani palawija
44.	Cikaso	Banjarsari	PT Perhutani		Berbukit-bukit	Persawahan, ladang kering (huma) dan kebun, petani palawija

45.	Banyaranyar	Banjarsari	PT Perhutani		Berbukit-bukit	Persawahan, ladang kering (huma) dan kebun, petani palawija
46.	Kalijaya	Banjarsari	PT Perhutani		Berbukit-bukit	Persawahan, ladang kering (huma) dan kebun, petani palawija
47.	Pasawahan II	Banjarsari	PTPN VIII H. Rusdi		Berbukit-bukit	Persawahan, ladang kering (huma) dan kebun, petani palawija
48.	Sindangsari	Cijulang	PT. Cikencreng		Datar	Persawahan, ladang kering (huma) dan kebun, petani palawija
49.	Ciparanti	Cijulang				Persawahan, ladang kering (huma) dan kebun, petani palawija
50.	Kertaraharja	Cijulang			Datar	Persawahan, ladang kering (huma) dan kebun, petani palawija
51.	Cimerak	Cijulang	PT. Cikencreng		Datar	Persawahan, ladang kering (huma) dan kebun, petani palawija
52.	Jalatrang	Cipaku	PT. RSI		Datar	Persawahan, ladang kering (huma) dan kebun, petani palawija
53.	Jelat	Cipaku			Datar	Persawahan, ladang kering (huma) dan kebun, petani palawija
54.	Maloya	Ciamis	PT. Maloya		Datar	Persawahan, balong-balong, ladang kering (huma) dan kebun, petani palawija
55.	Kalangsari	Kawali	PT. Cintanegara		Datar	Persawahan, balong-balong, ladang kering (huma) dan kebun, petani palawija
56.	Sukajaya	Cimerak	PT. Cikencreng		Berbukit-bukit	Persawahan, ladang kering (huma) dan kebun, petani palawija
57.	Kalijati	Sidamulih	PT. Cipicung		Berbukit-bukit	Persawahan, ladang kering (huma) dan kebun, petani palawija
58.	Cintanagara	Jatinegara	PT. RSI		Berbukit-bukit	Persawahan, ladang kering (huma) dan kebun, petani palawija
59.	Selacai	Cipaku	PT. RSI		Berbukit-bukit	Persawahan, ladang kering (huma) dan kebun, petani palawija
60.	Cibenda	Parigi	Sertifikat cacat hukum		Berbukit-bukit	Persawahan, ladang kering (huma) dan kebun, petani palawija
61.	Sukamaju	Cihaurbeuti	PT Perhutani		Berbukit-bukit	Persawahan, ladang kering (huma) dan kebun, petani palawija
62.	Kersaratu	Sidamulih	PT Perhutani		Berbukit-bukit	Persawahan, ladang kering (huma) dan kebun, petani palawija
63.	Purbahayu	Pangandaran	PT Perhutani		Berbukit-bukit	Persawahan, ladang kering (huma) dan kebun, petani palawija

Bagian 3

SPP dan Organisasi Pendukungnya



SPP dan Organisasi Pendukungnya

OTL: Basis Massa SPP

Serikat Petani Pasundan (SPP) adalah sebuah organisas massa petani yang berbentuk serikat yang beranggotakan para petani di tingkat Organisasi Tani Lokal (OTL) di desa-desa di wilayah Kabupaten Garut, Ciamis, dan Tasikmalaya, Jawa Barat. OTL ini dibentuk di tiap wilayah kasus yang pada umumnya berada di tingkat kampung atau unit komunitas sosial yang lebih kecil dari satuan wilayah desa. Dalam satu desa bisa dibentuk lebih dari satu OTL oleh karena di setiap desa ada beberapa kampung namun pembentukan OTL ini disesuaikan juga dengan kondisi serta perkembangan kasusnya.

Menurut beberapa sumber, jumlah OTL yang di klaim SPP ini cukup banyak tetapi setiap sumber tidak memiliki jumlah yang sama. Pada laporan *assesment* SKEPO[1] (2002) misalnya, diperkirakan jumlah OTL itu mencapai lebih dari 100. Sedangkan jumlah kasus yang didampingi SPP adalah 52 kasus, dengan perincian 22 kasus di wilayah Kabupaten Garut, 27 kasus di wilayah Kabupaten Ciamis, dan 3 kasus di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Artinya di setiap kasus bisa dibentuk lebih dari satu OTL. Kasus-kasus sengketa tanah yang didampingi SPP sebenarnya tidak didasarkan pada kesatuan desa namun lokasi *(site)*, oleh karenanya kasus itu

bisa berada dalam satu kampung atau bahkan dua desa sekaligus. Tetapi kasus yang paling lazim berada di sebuah kampung di dalam satu wilayah desa.

Informasi yang tersedia di sekretariat SPP per Juni 2004 menyebutkan lain yakni jumlah OTL itu adalah 49 dengan perincian 22 OTL di wilayah Kabupaten Garut, 23 OTL di wilayah Kabupaten Ciamis, dan 4 OTL di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Sementara itu berdasarkan hasil sensus anggota SPP yang dilakukan oleh Dianto Bachriadi, disebutkan bahwa jumlah OTL sebelum sensus adalah 58 tetapi setelah sensus adalah 40.[2]

Jumlah OTL per Kabupaten

Kabupaten	Sebelum Sensus	Setelah Sensus
Garut	33	14
Tasikmalaya	3	3
Ciamis	22	23
Jumlah	**58**	**40**

Sumber: Dianto Bachriadi, 2004, tidak dipublikasikan.

Jumlah OTL per Jenis Sengketa per Kabupaten

Kabupaten	Perhutani	Perkebunan	Tanah Negara	Lain-lain
Garut	4	9	1	-
Tasikmalaya	2	1	-	-
Ciamis	14	7	1	1
Jumlah	20	17	2	1

Sumber: Dianto Bachriadi, 2004, tidak dipublikasikan.

Sedangkan jumlah anggota SPP menurut perkiraan SKEPO (2002) adalah 700.000 orang. Dari jumlah itu, 300.000 orang sudah tercatat memiliki kartu anggota SPP. Perkiraan jumlah ini sangat luar biasa apabila dipertimbangkan umur SPP pada tahun 2002 itu baru dua tahun. Sementara itu berdasarkan hasil sensus Dianto Bachriadi, jumlah anggota SPP adalah 25.770 orang. Jumlah ini sekitar 3,7% dari perkiraan jumlah SKEPO diatas.

Jumlah anggota di setiap OTL berbeda-beda antara puluhan hingga ratusan orang. Jumlah anggota ini bisa berubah setiap saat,

Jumlah Anggota SPP per Kabupaten

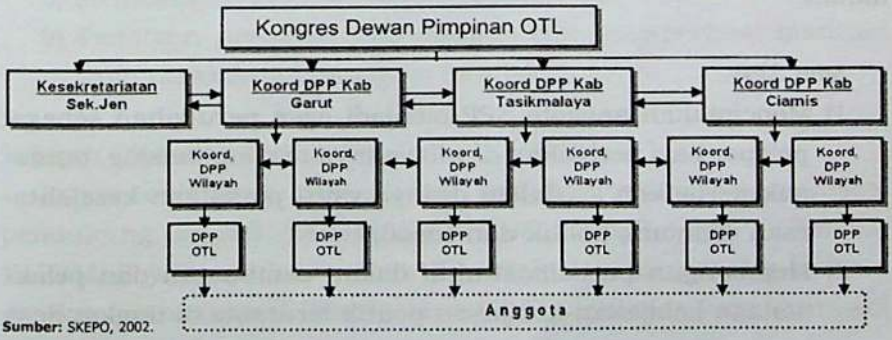
Kabupaten	Keluarga	Dewasa	Anggota
Garut	1.275	3.096	3.825
Tasikmalaya	1.025	2.382	3.075
Ciamis	6.290	14.153	18.870
Jumlah	**8.590**	**19.631**	**25.770**

Sumber: Dianto Bachriadi, 2004, tidak dipublikasikan

bisa bertambah atau berkurang. Di OTL Sukamukti, Kecamatan Cilawu, Garut misalnya, jumlah anggotanya pernah bertambah 5 orang tetapi juga pernah berkurang 20 orang. Penambahan atau pengurangan jumlah anggota ini sangat mungkin terjadi karena dinamika internal yang terjadi di setiap OTL. Pada kasus-kasus yang sudah "mapan" biasanya jumlah anggotanya tidak mengalami penambahan atau pengurangan secara drastis.

Sebagai sebuah organisasi, OTL juga mempunyai struktu seperti ketua OTL, sekretaris OTL, bendahara OTL dan seksi-seks yang dibentuk sesuai kebutuhan OTL setempat seperti seksi pengorganisasian, pendidikan, advokasi, pengembangan ekonomi, seni dan budaya, olah raga dan lain-lain. Di beberapa OTL juga terdapat seksi Laskar (paramiliter) yang mempunyai tugas utama menjaga keamanan SPP. Setiap laskar ini juga merupakan anggota Satgas (satuan tugas) SPP dalam struktur organisasi besarnya.

Struktur Organisasi SPP



Sumber: SKEPO, 2002.

Pada struktur organisasi SPP diatas terlihat bahwa setiap anggota berada di dalam OTL dan setiap OTL atau beberapa OTL berada di bawah koordinator wilayah setingkat kecamatan. Sedangkan setiap wilayah atau beberapa wilayah kecamatan berada di bawah koordinator kabupaten yakni Garut, Ciamis, dan Tasikmalaya. Fungsi sekretariat yang berada di Garut adalah sentral yakni melakukan koordinasi di ketiga kota tersebut.

Untuk membantu koordinasi di sekretariat terdapat pembagian kerja seperti berikut,

Sekretaris Jendral	: Agustiana
Deputi Umum	: Ibang Lukmanudin (Garut)
Deputi I	: Imam (Ciamis)
Deputi II	: -
Divisi Penguatan Organisasi	: Yani Andre
Divisi Pengelolaan Sumber Daya Hutan	: Indra Agustiani
Divisi Informasi dan Dokumentasi	: Yuyus Sopian
Koordinator DPP Kabupaten Garut	: Asep Sirojudin
Koordinator DPP Kabupaten Tasikmalaya	: Lalan
Koordinator DPP Kabupaten Ciamis	: Oma
Koordinator Ciamis Selatan	: Nanang
Koordinator Ciamis Tengah	: Puying
Koordinator Ciamis Utara	: Syarif

Visi SPP:

Membangun tatanan kehidupan sosial, ekonomi, politik yang dilandasi prinsip dan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan ketuhanan.

Misi SPP:

1) Menciptakan anggota SPP menjadi agen perubahan sebagai pelopor bagi perbaikan di wilayahnya masing-masing, termasuk perbaikan ke dalam dirinya yaitu perbaikan kesejahteraan ekonomi, politik dan sosial,
2) Membangun partisipasi aktif dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan politik terutama di tingkat desa

3) Memelihara fungsi optimalisasi lingkungan hidup sebagai pemenuhan kebutuhan manusia dan ekosistem lainnya secara adil, layak, dan berkelanjutan.

Strategi SPP:

1) Pemanfaatan dan pengelolaan atas pemilikan tanah atu sumber daya agraria lainnya secara layak.
2) Pemeliharaan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya lingkungan hidup lainnya agar tetap memberikan pemenuhan bagi kehidupan rakyat dan makhluk hidup lainnya secara layak dan berkelanjutan.
3) Penguatan SDM petani, nelayan, masyarakat adat dan masyarakat agraria lainnya melalui organisasi yang demokratis, setara, partisipatif, transparan, dan mandiri.
4) Menumbuhkan kepemimpinan rakyat yang mandiri kreatif, cerdas, kooperatif, penuh percaya diri, bertanggung jawab serta beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
5) Berpartisipasi aktif dalam pembangunan pedesaan yang mandiri dan berkesejahteraan.
6) Penumbuhan dan penguatan kapasitas organisasi tani yang mandiri dan demokratis.
7) Memperkuat gerakan tani dan gerakan agraria bersama dengan organisasi tani lainnya yang se-visi.
8) Membangun institusi kepemimpinan rakyat.
9) Penataan produksi, membangun dan memperkuat institusi atau organisasi-organisasi tani lokal.

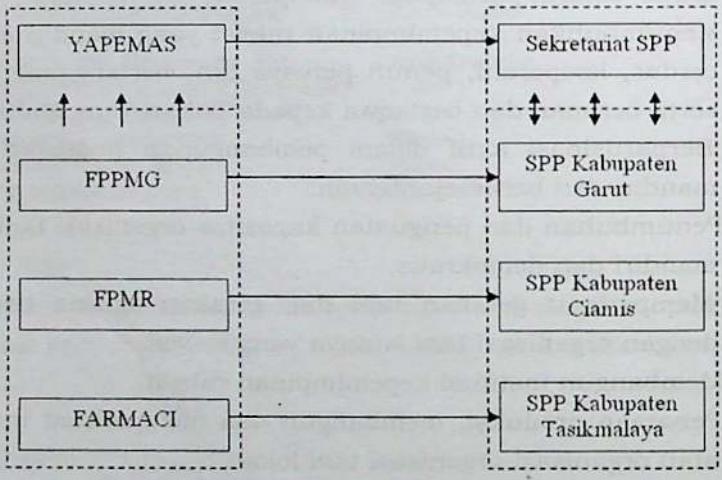
Jaringan Organisasi Pendukung

Diluar organisasi SPP diatas, terdapat organisasi-organisasi pendukung seperti YAPEMAS, FPPMG, FPMR, dan FARMACI. YAPEMAS yang pada awalnya dibentuk sebagai payung hukum gerakan mahasiswa (FPPMG) tahun 1995, sekarang juga berfungsi

sebagai pendukung *(supporting)* sekretariat SPP. Hampir semua kegiatan YAPEMAS adalah kegiatan SPP. Menurut direktur eksekutifnya, Nissa Wargadipura, "YAPEMAS tidak akan membuat program diluar program-program yang dibuat oleh SPP".[3]

Dari skema organisasi pendukung SPP di bawah ini bisa dilihat bahwa peran YAPEMAS sangat sentral. Hampir bisa dikatakan, roda organisasi ada pada YAPEMAS. Selain mendukung sekretariat SPP, YAPEMAS berfungsi sebagai lalu lintas koordinasi jaringan organisasi pendukung SPP di setiap kabupaten yakni FPPMG untuk Kabupaten Garut, FPMR untuk Kabupaten Tasikmalaya, dan FARMACI untuk Kabupaten Ciamis.

Struktur Organisasi SPP dan Organisasi-organisasi Pendukungnya



Sumber: SKEPO, diadaptasi oleh penulis

Pada kenyataannya, aktivis-aktivis yang menjadi pengurus di sekretariat SPP itu berasal dari YAPEMAS. Pada saat yang sama, mereka juga menjadi pengurus YAPEMAS. Dengan pernyataan Nissa Wargadipura diatas bahwa YAPEMAS tidak akan membuat

program selain program-program yang dibuat SPP, menunjukkan bahwa "YAPEMAS sebenarnya dianggap tidak ada". Keberadaannya muncul ketika menjadi arena lalu lintas jaringan organisasi pendukung SPP. Sebagaimana sejarah awalnya, YAPEMAS sekarangpun masih menjadi "payung hukum", hanya saja kini YAPEMAS memayungi ketiga organisasi pendukung SPP itu.

Dewan Pendiri Yapemas
Ketua : Agustiana
Sekretaris : Ibang Lukmanudin
Bendahara : Yudi Kurnia
Anggota : Nissa Wargadipura, Khadyf Am El Ghaft, Agus Rully Ardiansyah, Amin S. Bin Saedin, Yani Sri Mulyani, Nurhafsah.

Pelasana Harian
Direktur : Nissa Wargadipura
Rekonstruksi Penguatan Kapasitas Rakyat dan Pemerintahan Desa: Ibang Lukmanudin dan Khadyf AM El Ghaft
Pengembangan Kapasitas Ruang Kebijakan Pemerintahan Daerah: Yudi Kurnia, Muhendi, dan Anas Nasidin
Penataan Sumber Daya Agraria: Indra Agustiani
Penguatan Organisasi Petani: Yani Andre
Penguatan Masyarakat Sipil dan penguatan Kapasitas LSM Lokal sebagai Pendamping dan Pelaksana Daerah: Anwar Rustandi
Informasi dan Dokumentasi: Yuyus Sopian

Beban lain yang harus dipikul aktivis yang menjadi pengurus sekretariat SPP, selain menjadi pengurus YAPEMAS yang multifungsi itu, juga menjadi koordinator lapangan (korlap) di wilayah kasus-kasus SPP mendampingi koordinator lapangan dari setiap organisasi pendukung di setiap kabupaten. Pembagiannya adalah sebagai berikut: Indra Agustiani sebagai koordinator Sarimukti, Yani Andre sebagai koordinator Cilawu, Agus Rulli ardiansyah sebagai koordinator Sukatani, sedangkan Nissa Wargadipura dan Ibang Lukmanudin sebagai koordinator umum meliputi semua wilayah kasus di tiga kabupaten itu.

Sementara itu FPPMG juga membentuk koordinator lapangan di

Pembagian Kerja SPP dan Organisasi-organisasi Pendukung

Kerja Advokasi	SPP	YAPEMAS	FPPMG	FPMR	FARMACI
Pendidikan	Di tingkat lokal	Pengelola pendidikan untuk seluruh wilayah SPP dan pendamping tiga kabupaten	Operator di tingkat kabupaten	Operator di tingkat kabupaten	Operator di tingkat kabupaten
Peng-organisasian	Di tingkat lokal dan kabupaten	Pengelola kerja peng-organisasian untuk seluruh wilayah SPP	Operator di tingkat kabupaten	Operator di tingkat kabupaten	Operator di tingkat kabupaten
Kampanye	Di tingkat lokal	Pengelola kerja kam-panye	Dukungan terutama untuk di kabupaten Garut	Dukungan terutama untuk di kabupaten Tasikmalaya	Dukungan terutama untuk di kabupaten Ciamis
Kajian	Di tingkat lokal	Pengelola kerja kajian	Dukungan terutama untuk di kabupaten Garut	Dukungan terutama untuk di kabupaten Tasikmalaya	Dukungan terutama untuk di kabupaten Ciamis
Mem-pengaruhi kebijakan	Di tingkat lokal dan sampai tingkat tertentu di tingkat kabupaten	Koordinator untuk tingkat kabupaten ke atas	Dukungan terutama untuk di kabupaten Garut	Dukungan terutama untuk di kabupaten Tasikmalaya	Dukungan terutama untuk di kabupaten Ciamis
Pressure	Mobilisasi anggota	Dukungan	Dukungan terutama di kabupaten Garut	Dukungan terutama untuk di kabupaten Tasikmalaya	Dukungan terutama untuk di kabupaten Ciamis
Jaringan	Di tingkat lokal, sekretariat SPP dengan jaringan pro reformasi agraria	Dengan kalangan NGO dan lembaga donor	Dengan gerakan mahasiswa	Dengan gerakan mahasiswa	Dengan gerakan mahasiswa
Litigasi	Kerjasama dengan LBH Bandung	Membuat unit pembelaan litigasi	Dukungan	Dukungan	Dukungan
Penggalangan dana	Di tingkat kelompok dan OTL	Menggalang ker-jasama program den-gan NGO lain dan lembaga donor	-	-	-
Dokumentasi	Di tingkat kelompok dan OTL	Membantu di tingkat sekretariat SPP	Membantu di tingkat kabupaten Garut	Membantu di tingkat kabupa-ten Tasikmalaya	Membantu di tingkat kabupa-ten Ciamis

Sumber: SKEPO, 2002

wilayah Kabupaten Garut sebagai berikut, Harafat sebagai koordinator Cisompet, Dadan sebagai koordinator Cilawu, Ujang sebagai koordinator Kincir, Atet sebagai koordinator Kadungura, Cencen sebagai koordinator Cibalong, Husni sebagai koordinator Bungbulang, Husni sebagai koordinator Cilawu, Ai' sebagai koordinator Cisurupan, Asep sebagai kooridnator Bungbulang, dan Irna sebagai koordinator Leuwipari.

Demikian pula FPMR membentuk koordinator lapangan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya sebagai berikut, Helmi sebagai koordinator Cigalontang, Herdi sebagai koordinator Cieceng, Erni sebagai koordinator Nagrog, Mumu sebagai koordinator Neglasari, dan Andi sebagai koordinator Cikanyere. Sedangkan aktivis FARMACI tidak ada yang menjadi koordinator lapangan di wilayah Kabupaten Ciamis. Koordinator lapangan di wilayah kabupaten ini dipegang oleh petani.

Masing-masing organisasi pendukung bisa mengembangkan jaringannya sendiri. FPPMG misalnya, sejak lama telah mengembangkan jaringan organisasinya ke berbagai kelompok mahasiswa dan LSM. Jaringan FPPMG di Yogyakarta antara lain: SPY, FMN, FPPI, LMND, SMID. Di Surabaya: FPPI, JMN. Di Jakarta: FORKOT, FORBES, JNNI, PIJAR, ALDERA, KM Bandar, FAM UI, UNAS. Di Bali: FRONTIER. Di Mataram: FKKM. Di Bandung: FKMB, KA UNPAD, KPMB, FMN, PAMI. Di Jambi: FMN. Di Bogor: FPPHR. Di Lampung: FMN. Di Palembang: FMN dan KMP.

Sebagaimana FPPMG di Garut, FPMR di Tasikmalaya juga mengembangkan jaringan organisasinya. Jaringan FPMR di Bandung: KPA, FKMB, FMN, KPMB. Di Tasikmalaya: HMI, KAMI, PMII, SEMUT, TALIBAN, FGT. Di Jakarta: FORKOT, DAMAI, JARI, FAM UI, KAMJAT. Di Sukabumi: HIMASI. Di Bogor: FPPHR. Di Cianjur: PMII, PPC. Di Surabaya: PMII, UNAIR

Demikian pula FARMACI di Ciamis. Jaringannya di Jakarta: Bina Desa, FSPI, KAU, WALHI, PBHI, YLBHI, YAKOMA. Di Ciamis:

INPAM, GEMATITA, AMPEL, KRAF, MAPETAGAL. Di Tasikmalaya: FPMR, SEMUT. Di Bandung: KPA, PERGERAKAN, SKEPO, LBH, KOPI, SAWARUNG, FMN, KPPHR. Di Bogor: JKPP, KPSHK, TELAPAK.

1) SKEPO adalah sebuah LSM yang didirikan oleh para aktivis mahasiswa, aktivis buruh dan petani serta aktivis yang lainnya di Bandung.
2) Sensus anggota SPP yang dilakukan oleh Dianto Bachriadi ini merupakan inisiatif pribadi. Penulis memperoleh data ini secara langsung dari sumbernya walaupun data ini belum dipublikasikan.
3) Wawancara dengan Nissa Wargadipura, 2004.

Bagian 4

Kebangkitan Organisasi Massa Petani





Kebangkitan Organisasi Massa Petani

Situasi krisis yang melanda perekonomian negeri ini sejak tahun 1997 rupa-rupanya telah membawa "berkah" tersendiri bagi kalangan petani kecil dan buruh tani di Tatar Pasundan. Krisis moneter yang kemudian berdampak pada krisis multi-dimensi telah melahirkan gerakan reformasi yang didukung oleh kalangan mahasiswa. Soeharto mengundurkan diri dari jabatan presiden yang ia kuasai selama 31 tahun dan 3 bulan (12 Maret 1967 – 21 Mei 1998).[1] Tatanan sosial, ekonomi, dan politik secara perlahan mulai berubah dari sentralistis, otoriter, dan represif ke suasana yang semakin demokratis; terdesentralisasi dan transparan.

" Pada waktu Soeharto turun saya ikut bahagia, pertama karena Soeharto sudah tua dan sudah waktunya untuk istirahat dan menyerahkan pimpinan kepada yang lebih muda, kedua saya merasakan ketika kepemimpinan Soeharto banyak peristiwa tidak mengenakan hati terjadi. Mulai dari memaksa masuk Golkar sampai masuk KB, juga soal pelarangan – pelarangan lain yang sangat memaksa" (OT, petani desa Sindangasih, Tasikmalaya)[2]

" Saat ketika Soeharto turun merasakan kebahagian juga karena kami adalah basis pesantren yang juga pernah

merasakan bagaimana pahit getirnya dipaksa harus masuk Golkar, ada sebutan 'wajib Golkar'. Kami diuber-uber oleh militer untuk masuk Golkar. Ketika terjadi reformasi tersebut kami berharap di sini yang menang adalah dari NU karena tempat kami adalah basis NU. Ini terbukti ketika pemilu kemarin PKB menang di sini. Kami pun berharap yang menjadi presiden pun dari NU. Kami sudah sangat kesal dan marah dengan kepemimpinan Golkar seperti Soeharto yang selalu memaksa apalagi perkebunan adalah basis Golkar" (MM, petani desa Cieceng, Tasikmalaya)[3]

Di desa-desa para petani kecil dan buruh tani itu tidak takut lagi berbicara. Mereka sekarang bebas berorganisasi, berkesenian dan menjalankan keyakinan ketuhanannya. Reformasi seperti dirasakan "bebas dari belenggu", bahkan sampai ada yang memberi istilah "reformasi *kebablasan*" atau seperti tidak ada aturan. Susana seperti ini telah memberi kesempatan kepada kalangan petani kecil dan buruh tani untuk mengorganisasikan diri ke dalam kelompok-kelompok organisasi tani baik di daerah-daerah maupun nasional.

Selain SPP, pada masa reformasi ini lahir organisasi-organisasi tani lain seperti Koalisi Tani Indonesia (KTI), Aliansi Petani Indonesia (API), Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI), Serikat Tani Nasional (STN), Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Koalisi Rakyat Tani Indonesia (KRTI), IPPHTI, Petani Mandiri, dan berbagai serikat tani yang menggunakan nama kedaerahan seperti Serikat Petani Jawa Barat (SPJB), Serikat Petani Banten, Serikat Tani Lampung, Serikat Petani Jampang, Forum Petani Subang, Paguyuban Petani Cianjur, Himpunan Petani dan Nelayan Pakidulan, Forum Petani Karawang, Aliansi Petani Yogyakarta, Serikat Tani Bengkulu, Komite Tani Bangka Belitung, Forum Aktivis Tani Jawa Timur (FAKTA Jatim) dan sebagainya.

Membangun Organisasi Basis

Di sisi lain, situasi krisis yang melahirkan reformasi juga berdampak pada kondisi perekonomian masyarakat di daerah perkotaan. Buruh-buruh pabrik terpaksa menerima keputusan PHK karena perusahaannya dilanda krisis. Para pedagang kecil memilih pulang kampung karena harga-harga kebutuhan pokok di kota semakin tinggi dan tidak sebanding dengan penghasilan mereka. Situasi krisis seperti ini telah mendorong lapisan masyarakat kecil yang tinggal di kota-kota untuk pulang kampung.

Di desa bukan berarti tidak dilanda krisis. Kehidupan di desa pada saat itu hampir sama sulitnya dengan kehidupan di kota. Hanya saja kehidupan masyarakat desa masih ditopang oleh mekanisme tolong-menolong dan saling membantu diantara sanak saudara dan tetangganya. Mekanisme ini telah terbukti menolon mereka dari gelombang krisis. Namun demikian tidak semua warg desa mampu bertahan dari tekanan krisis ini. Sebagian warga desa justru melakukan hal yang sebaliknya yaitu pergi ke kota mencari pekerjaan sambilan.

Untuk ikut merasakan situasi krisis ini lebih nyata dan menyimak berbagai respon petani kecil di saat krisis itu berikut ini adalah rangkaian petikan wawancara dari berbagai kalangan petani kecil yang saat ini sudah menjadi anggota SPP.

"Kehidupan ekonomi kami sejak dulu sangat memprihatinkan. Hal ini yang menyebabkan saya berangkat ke kota. Kehidupan kota membuat saya jadi keras, tinggal di terminal Bogor, ketika krismon ibarat sudah jatuh tertimpa tangga. Saya memutuskan untuk pulang dan bekerja sebagai buruh tapi kadang-kadang juga menjadi pengggangguran tapi seterusnya malah diajak ikut berjuang untuk mendapatkan tanah dengan SPP". (UT, petani desa Dangiang, Garut)

"Kami mengalami krisis sejak dulu sejak adanya perhutani di sini. Sejak perhutani ada kami tidak boleh menggarap di sini,

mengambil daunnya saja perhutani melarangnya apalagi menggarapnya. Krisis benar-benar terasa pada tahun 1997, masyarakat di sini sudah tidak punya lahan, terjadi krisis moneter membuat kami semakin terpuruk. Segala sesuatunya membaut kami susah. Mau berangkat ke kota pun kami bingung karena orang-orang yang dari kota pun malah pulang kembali ke kampungnya karena di kota banyak di PHK dan kota artinya mengalami kebangkrutan. Kami bingung harus bagaimana? Harga beras mahal, harga-harga kebutuhan rumah mahal tapi kami tidak punya mata pencaharian tetap, dari buruh tani hanya bisa menjawab kebutuhan saat ini dan hari ini, lalu bagaimana dengan besok? Saya ingin mati di hutan ini...". (JL)[5]

"Saat itu kehidupan kami amat sangat miskin, pendapatan kami dari buruh hanya Rp. 2.500 sedangkan harga beras sehari-hari bisa melebihi jumlah harga tersebut yaitu Rp. 1600 per kilo. Bisa dibayangkan bagaimana kehidupan kami seperti apa? Untuk sekolah anak-anak kami harus berpikir keras. Memang banyak dari kampung ini yang pergi ke kota tapi saya yakin ke kota pun tidak menjawab keinginannya untuk bisa hidup sejahtera. Kadang-kadang malah di kota hidupnya lebih banyak diporsir tapi tenaganya sama sekali tidak dihargai, akhirnya kami hanya sebagai buruh dan tidak pernah merasakan hubungan yang manusiawi".(MM, petani desa Cieceng, Tasikmalaya)[6]

"Sebelum krismon harga beras hanya Rp600,-. Setidaknya kehidupan kami tidak terlalu sulit walaupun dengan pendapatan itu kami tidak bisa menyekolahkan anak-anak. Tapi pada saat krismon warga banyak pergi ke kota karena di desa sangat sulit. Pendapatan buruh kebun Rp5.000,- dan buruh tani Rp6.000,- tapi harga beras Rp2.800,-. Sebagian warga ada yang berangkat ke kota dan tetap tinggal bertahan di kampungnya. Tapi ternyata di kota pun warga menghadapi persoalan yang sama. Saya

masih ingat ketika kawan-kawan pemuda pulang dari kampung menjadi pencari burung-burung untuk dijual ke Tasikmalaya, ada juga yang menjadi buruh, tapi kebanyakan dari warga adalah pengangguran kelas berat". (MM, petani desa Cieceng, Tasikmalaya)[7]

Situasi krisis dan dorongan untuk melakukan reformasi ini telah mempengaruhi keberanian kalangan petani kecil dan buruh tani yang hidup terjepit di lahan-lahan perkebunan dan kehutanan yang luas. Mereka berani membuka lagi kasus-kasus sengketa tanah didaerahnya, terutama tanah-tanah garapan yang menurut mereka telah mereka kuasai secara turun-temurun tetapi selama pemerintahan Orde Baru di klaim sebagai tanah milik perkebuna dan kehutanan. "Gerakan lapar tanah"[8] merupakan istilah yan kurang-lebih menggambarkan situasi perebutan tanah-tanah garapan petani di Tatar Pasundan saat itu.

"Sebenarnya perlawanan kami ke perkebunan adalah persoalan ketika kami membutuhkan lahan pengangonan untuk 5 ha. Tapi perkebunan malah tidak memberikan lahan tersebut padahal jelas ada lahan terlantar yang menurut kami seluas 15 ha. Tapi ketika kami minta, perkebunan tidak memberinya. Ketika ada uztad yang lagi mengembalakan kambingnya di wilayah perkebunan uztad itu disiksa oleh mandor kebun yang akhirnya karena peristiwa itu membuat kami merebut tanah. Menurut kami kalau perjuangannya hanya 15 ha tidak cukup maka tokoh-tokoh kampung meminta warga yang tinggal di kota untuk pulang kampung dan memperjuangkan tanah bersama-sama seluas 800 ha". (MM, petani desa Cieceng, Tasikmalaya)[9]

Beberapa lokasi yang kasus-kasus sengketa tanahnya mencuat ke permukaan sejak awal masa reformasi itu antara lain kasus sengketa tanah di desa Sagara, Pamegatan, Jangkurang, Pakenjeng, Cisurupan di wilayah kabupaten Garut; kasus sengketa

tanah di desa Cibenda di wilayah kabupaten Ciamis; dan kasus sengketa tanah di desa Cieceng di wilayah kabupaten Tasikmalaya. Selain itu, sejak sebelum reformasi para aktivis FPPMG sudah terlibat aktif mendampingi kasus-kasus sengketa tanah seperti di Badega dan Selekta.

Tabel Daftar Rekapitulasi kasus tanah SPP di kabupaten Garut, Tasikmalaya, Ciamis, dan Tabel Kasus-kasus Tanah Kehutanan di Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis. (mohon lihat halaman belakang bagian ini)

Deklarasi SPP pada tanggal 24 Januari 2000 telah menjadi tonggak baru bagi sejarah ribuan petani kecil dan buruh tani yang sedang memperjuangkan sengketa-sengketa tanah dengan pihak-pihak perkebunan dan kehutanan. Mereka kini mempunyai organisasi yang mereka bentuk sendiri, tidak ada lagi paksaan seperti ketika dipaksa harus mengakui satu-satunya organisasi tani saat itu yakni HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia).[10] Para petani yang turut mendeklarasikan SPP segera melakukan penataan organisasi di tingkat basis, yakni di kampung-kampung tempat mereka tinggal. Organisasi tingkat basis ini yang selanjutnya disebut sebagai OTL.

Perjuangan para petani kecil dan buruh tani membentuk OTL sebelum dan sesudah dideklarasikannya SPP itu tidak mudah. Sebagai gambaran adalah perjuangan OTL kampung Kiara Jangot, desa Dangiang, Garut. Pada tahun 1998, beberapa orang di kampung itu diajak mengikuti pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh FPPMG dan YAPEMAS di desa Sukamukti dan Mekarmukti. Pada waktu itu, FPPMG dan YAPEMAS sedang menangani kasus tanah perkebunan milik PTPN VIII Dayeuh Manggung di kedua desa itu. Dari serangkaian diskusi dan investigasi di BPN bersama para aktivis FPPMG dan YAPEMAS

diketahui bahwa Hak Guna Usaha (HGU) PTPN VIII Dayeuh Manggung (nomor 15/HGU/DA/72) yang berada di beberapa wilayah desa itu termasuk Sukamukti, Mekarmukti, dan kampung Kiara Jangot itu telah habis masa berlakunya sejak tahun 1997.

"Semua diakui secara terus-terang, bahwa kami melakukan pembabadan pohon teh berdasarkan keterdesakan dan kebutuhan untuk memeuhi hidup terutama ekonomi, kami berani melakukan pembabatan teh karena jelas dasar hukumnya yaitu UUPA yang menyatakan bahwa tanah perkebunan harus dibagikan kalau HGU-nya sudah habis, jangankan sudah habis HGU-nya walaupun HGU-nya masih adapun kalau masyarakat miskin disekitarnya membutuhkan tanah harus segera dibagikan" (AS, petani desa Sukamukti, Garut)[11]

Cerita perebutan tanah perkebunan oleh petani kampung Kiara Jangot, desa Dangiang tahun 1999

Awal pembukaan lahan dilakukan oleh 'Tim 7' yaitu IB (49 tahun), SB (42 tahun), UT (40 tahun), UN (45 tahun), ET (40 tahun), OT (42 tahun), ditambah AS (38 tahun). Mereka melakukan pembabatan pohon teh pada setiap malam hari di wilayah perkebunan PTPN VIII Dayeuh Manggung. Mereka berangkat setelah sholat maghrib dan doa-doa yang mereka panjatkan.

Pada malam pertama, 'Tim 7' diikuti sekitar 50 orang membabat sekitar 1000 pohon teh, malam berikutnya bersama dengan sekitar 70 orang membabat 5000 pohon teh. Pada malam ketujuh bergabung 10 orang yakni ID (60 tahun), ID (70 tahun), SY (45 tahun), IJ (30 tahun), EK (35 tahun), UE (22 tahun), OM (50 tahun), AS (40 tahun), YN (27 tahun), dan ST (25) yang meminta kepada 'Tim 7' untuk melakukan pembabatan pohon teh di blok Kiara Lawang. Gabungan kedua tim ini kemudian disebut sebagai 'Tim 17'.

Bersama 'Tim 17' ini, ratusan warga kampung Kiara Jangot berhasil membabat sekitar 10.000 pohon teh atau sekitar 100 tumbak di blok Ciledug yang kemudian digarap oleh petani di kampung Pasir Kihiang. Pembagian lahan garapan di blok Ciledug ini dilakukan melalui sebuah perjanjian kesepakatan antar tokoh hitam diatas putih diatas kerta segel yang diberi materai dan ditandatangani oleh para tokoh itu.

Perjuangan tidak berlangsung mudah. Pada hari berikutnya datang dua truk Unit Reaksi Cepat (URC) dari Polres Garut. Para petani yang menggarap lahan pada siang hari itu lari berhamburan setelah mendengar bunyi tanda bahaya yang dikirim oleh AS. Pada peristiwa ini tidak ada orang yang berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian.

Sore harinya datang aktivis YAPEMAS yakni Yani Andre dan Nurhafsah menghantarkan surat dari Kapolres Garut yang isinya memanggil IB, AS, dan ID ke kantor polisi. Pada pagi harinya ketiga orang ini diperiksa polisi. Mereka dituduh melanggar pasal 170 ayat 1 dan 2 KUHP yakni

tuduhan kekerasan perusakan barang dengan ancaman hukuman selama tujuh tahun.

Atas tekanan itu IB mengundurkan diri dari ketua 'Tim 17'. Untuk melanjutkan perjuangan mereka memilih ketua baru yakni UT. Ia mewajibkan anggota tim untuk aktif mengajak masyarakat desa Dangiang terus melakukan perluasan pembabatan kebun teh di blok Legok Haji.

Beberapa waktu kemudian diadakan pertemuan dengan pihak perkebunan yang dikuti oleh 'Pak Camat' dan aparat kepolisian di desa Dangiang. Pada waktu itu terjadi perdebatan antara pihak perkebunan dengan AS. Dengan lantang AS melancarkan argumentasi-argumentasinya,

> *"Kami semua menggarap tanah ada latar belakangnya. Tanah garapan kami dirampas sejak jaman kakek dan nenek kami dulu oleh kehutanan. Tahun 1975 dirampok oleh orang-orang perkebunan. Seharusnya bapak-bapak berpihak ke rakyat bukan pada perkebunan. Sudah jelas bahwa HGU-nya sudah habis tahun 1997. UUPA 1960 menyebutkan bahwa jika sudah habis masa HGU-nya maka lahan harus diberikan kepada rakyat yang memerlukan tanah itu. Masyarakat bukannya ingin membeli mobil dengan menggarap lahan itu, tapi untuk memberi makan anak dan istri, tidak lebih Cuma buat makan dua kali sehari. Itu juga karena negara tidak bisa memberi makan, tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonominya, tidak bisa memenuhi UUD 1945 pasal 33. Sekarang sudah jelas aturannya, sudah jelas kalau HGU-nya sudah habis, kalau sudah begini, bapak-bapak mau berpihak ke siapa?"*

sehingga warga yang datang pada pertemuan itu bersoarak sorai dan memukul meja keras-keras. Suasana pertemuan menjadi gaduh dan akhirnya wargapun membubarkan diri.

Sumber: Nissa Wargadipura, 2004.

"Perkebunan membabat jagung, kacang tanah, dan yang masih kecil-kecil diinjak-injak habis hingga ke blok Legok Haji dan Hantap. Pisang dan singkong juga dibabat. Ada tujuh mobil dari pihak perkebunan. Warga yang ada disitu melaporkan ke desa. Orang-orang kemudian naik ke atas, ditambah orang-orang dari Sukamukti dan Mekarmukti, tapi saat sampai disana orang-orang yang merusak tanaman itu sudah tidak ada. Warga kemudian membalas dengan merusak jembatan perkebunan di Pasiran Nabak, menyerang bedeng-bedeng yang sudah tidak didiami lebih dari lima bulan, kaca, genteng, batang-batang besi semua diambil" (cerita beberapa ibu dari Desa Dangiang, Garut).[12]

Setelah deklarasi SPP, para "pejuang Kiara Jangot" ini membentuk OTL. Warga kampung banyak yang tertarik dengan

keberhasilan perjuangan ini. Mereka berbondong-bondong untuk mendaftarkan diri menjadi anggota SPP. Sampai dengan tahun 2004, anggota SPP OTL kampung Kiara Jangot ini mencapai sekitar 200 orang dengan struktur organisasi sebagai berikut, ketua: AG, wakil ketua: RY, Bendahara: DD, sekretaris: NS, seksi ekonomi: SB, dan humas: ST. UT yang sebelumnya menjadi ketua 'Tim 17' sekarang dipilih menjadi koordinator SPP di wilayah kabupaten Garut.

"Saya mengetahui kebijakan-kebijakan dan hukum-hukum menjadi satu kekuatan dalam mengawal organisasi, hasilnya pertemuan-pertemuan baik di Garut atau dimana saja yang sifatnya pendidikan bukan lagi wilayah "gelap". Saya jadi lebih berani, jadi tahu hingga mendalam bagaimana cara berorganisasi dengan baik, apa yang harus dilakukan organisasi agar anggotanya tetap kompak, melobi dan mengkampanyekan SPP"[13]

Memajukan Keswadayaan

Disadari bahwa tanah merupakan basis ekonomi terpenting bagi petani kecil dan buruh tani ini. Untuk itu dipandang perlu dilakukannya sebuah strategi untuk mempertahankan tanah-tanah yang sudah direbut itu. Menurut Wargadipura (2004), beberapa strategi itu antara lain,

a. *Reclaiming*, mampu menguasai, menggarap, mempertahankan dan atau memiliki tanah yang layak untuk sumber pokok kehidupan keluarga secara adil dan terus digarap secara berkelanjutan adalah kewajiban pertama yang harus dilakukan oleh setiap anggota SPP.
b. Meningkatkan kemampuan untuk mengolah tanah secara maksimal serta memiliki semangat untuk menghidupkan perekonomian khususnya peningkatan kesejahteraan keluarga secara terus-menerus.
c. Pertemuan musyawarah menjadi bagian dari kewajiban seluruh

anggota SPP yang dilakukan di rumah-rumah pemimpin atau penggarap lainnya.

d. Pembentukan tabungan beras yang dilakukan oleh kelompok ibu-ibu sebagai cara untuk meningkatkan kemampuan menggali dan mengelola usaha kelompok maupun dana swadaya.

e. Iuran anggota-anggota SPP dilakukan untuk pengumpulan dana cash yang diatur melalui pembagian luas lahan garapan.

Perubahan hidup yang menyangkut kondisi perekonomian rumah-tangga mereka selama kurang-lebih tiga sampai empat tahun setelah penguasaan lahan mulai dirasakan. Banyak diantara mereka mengalami semacam perubahan mendasar di dalam perekonomian rumah-tangganya dari kondisi status buruh tani yang serba kekurangan menjadi petani dengan lahan garapan cukupan. Beberapa persoalan yang dahulu dialami seperti tidak mampu menyekolahkan anaknya, kini secara perlahan mulai teratasi. Beberapa petikan wawancara berikut menggambarkan keadaan itu.

"Sekarang beras tidak terlalu sulit walaupun harus dibeli tapi bisa dibeli dari hasil ladang akar wangi yang ditanam di lahan garapan. Alhamdulillah bisa menabung di kelompok, bisa membangun rumah, bisa mengawinkan dan menyekolahkan anak-anak"[14]

"menanam akar wangi di lahan garapan seluas 300 tumbak, hasilnya besar. Dari sekali panen bisa dapat satu ekor anak sapi, setelah setahun dijual lagi dapat dua ekor anak sapi, ditambah dari hasil panen akar wangi, sekarang punya satu lagi. Jadi semuanya ada lima"[15]

"Saya bisa menyekolahkan anak-anak, yang satu di STM di Bandung dan yang satu di SMP Genteng, bisa menikahkan anak-anak, bisa menabung, tidak susah makanan"[16]

Upaya-upaya lain yang ditujukan untuk memajukan tingkat

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh anggota SPP di berbagai OTL untuk memajukan keswadayaan di tingkat desa

Nama OTL	Kegiatan
Benjang, desa Sindangsari, Garut	Memberikan dana tambahan untuk pembangunan masjid, memberi bantuan untuk orang yang meninggal, gotong royong
Selacai, Ciamis	Gotong royong memperbaiki jalan
Bagolo, Ciamis	Gotong royong memperbaiki jalan
Banjar Anyar II, Ciamis	Pengumpulan dana, melakukan penanaman tanaman keras, penggalangan organisasi
Purbahayu, Ciamis	Menanam tanaman prioritas untuk penghijauan
Kalijati, Ciamis	Memelihara jalan, membuat pos kamling, menggarap lahan kolektif
Kalijaya, Ciamis	Pembuatan jalan dan jembatan
Kalijaya I Cikaso	Menata garapan, mengontrol dan menanami lahan di kemiringan 60° dengan tanaman keras seperti bambu, kihujun, aktif melaksanakan program desa melalui posyandu
Belender, Ciamis	Membuat jalan sepanjang 1500 meter, membanggun sekretariat
Dangiang, Garut Sukamukti, Garut	Kerja bhakti membuat saluran air, survey ke lokasi kehutanan yang ditanami tanaman keras, pertemuan membahas koperasi
Mekarmukti, Garut	Penggalangan dana dari pisang
Cikujang, Ciamis	Gotong royong
Tanjung Karang, Tasikmalaya	Penyuluhan anggota, gotong royong memperbaiki jalan
Cieceng, Tasikmalaya	Pembuatan dan pengembangan demplot Penataan koperasi, pembentukan pengurus, penyadaran koperasi, penataan garapan ulang, pembuatan sekretariat, mencalonkan untuk kepala desa, penyadaran tentang pemerintah desa, mendorong keluarnya peraturan desa, rencana pembentukan sekolah madrasah
Bojong, Ciamis	Musyawarah dua minggu sekali, pengajian dan arisan
Jangkurang, Leles	Pengajian rutin dua minggu sekali, penanaman tanaman keras
Karyasari, Garut	Memelihara garapan yang ada secara serempak
Cikeuyeup, Garut	Melakukan penamanan tanaman keras seperti kopi, coklat, nangka, petay, alpukat dan kelapa
Mukti Barokah	Pengajian bulanan, gotong-royong untuk kebersihan kampung, penguatan kelompok warga, membuat persemaian tanaman keras
Bangunkarya, Ciamis	Pembangunan masjid, membuat jalan, arisan untuk qurban

keswadayaan warga antara lain terlihat pada berbagai jenis kegiatan di tingkat desa. Berbagai kegiatan yang sifatnya untuk memajukan kehidupan gotong-royong seperti memperbaiki jalan, membangun sarana ibadah, sekolahan dan sebagainya didorong oleh para aktivis SPP di tingkat basis ini.

Apabila dicermati dari tabel diatas terlihat bahwa OTL Cieceng kabupaten Tasikmalaya sangat aktif melakukan berbagai kegiatan di tingkat desa. Beberapa diantaranya adalah mencalonkan salah satu anggota SPP di OTL-nya menjadi kepala desa dan mendorong

keluarnya peraturan desa. Upaya-upaya yang dilakukan bukan hanya untuk memajukan kehidupan sosial seperti gotong-royong namun juga masuk ke wilayah politik tingkat desa. Mereka tidak hanya ingin mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah desa dari luar sistem namun justru menjadi bagian dari sistem itu sendiri. Kegiatan seperti ini tidak hanya dilakukan di Cieceng namun juga di OTL lain seperti di OTL Dangiang dan OTL Bangunkarya.

"Saat ini di Cieceng kepala desanya berasal dari SPP. Kami merasa perlu bahwa pemimpin desa harus direbut. Dalam rangka penyelesaian sengketa agraria desa juga harus kita kuasai. Saat ini BPD-nya ada 12 orang yang semuanya anggota SPP. Di kecamatan Cikatomas desa kami mempunyai penilaian nomor 1 sebagai desa swadaya. Artinya adalah desa yang mempunyai pembangunan cepat dengan keterlibatan warga kampung yang tinggi" (TT, petani desa Cieceng)[17]

"Saat ini desa kami pemimpinnya memang bukan dari anggota SPP. Malah anggota BPD-nya juga yang pro kita kurang. Tapi keterlibatan kami dalam pembangunan desa sangat kuat. Program apapun yang datangnya dari luar menuju desa, kami aktif dalam memusyawarahkannya. Kami tidak pernah berhenti dalam mengawal desa. Dulu kami tidak sempat memikirkan supaya ada anggota kami harus masuk BPD dan kepala desa karena sibuk ketika harus terus berhadapan dengan pihak perkebunan dan preman serta polisi. Saat ini kami sudah tidak "panas" lagi jadi kami mulai terlibat dalam pengelolaan sekolah dan desa". (UT, petani desa Dangiang, Garut)[18]

"Meskipun anggota SPP tidak masuk dalam kancah pemerintahan desa tapi saat ini pengurusan dan pengelolaan desa, kepala desa Bangunkarya sering berdiskusi bersama dengan pengurus SPP Bangunkarya." (MM, petani desa Bangunkarya, Ciamis)[19]

"Dulu kami tidak tahu apa itu otonomi daerah tapi sejak gabung dengan SPP kami dididik untuk memahami otonomi daerah sebagai pintu masuk perjuangan kita. Sejak itu kami pun memasuki wilayah-wilayah kepemimpinan formal di desa. Baik sebagai kepala desa maupun sebagai BPD. Saat ini kami berhasil mencapai itu. Pembangunan desa kami menjadi cepat karena tingkat swadayanya. Kami sekarang sudah punya sekretariat SPP, koperasi meskipun kecil-kecilan, sekolah Madrasah, sekolah Tsanawiyah, dan pembukaan jalan. Sejak bergabung dengan SPP kami memahami bahwa motor penggerak pembangunan adalah kami sendiri bukan orang lain". (MM, petani desa Cieceng, Tasikmalaya)[20]

1) Soeharto ditunjuk oleh MPR untuk menjadi Pejabat Presiden pada tanggal 12 Maret 1967 untuk menjalankan tugas kepresidenan yang telah diambil alih dari Soekarno dan mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998 karena krisis ekonomi, tuntutan gerakan mahasiswa pro-reformasi, dan kerusuhan 13-15 Mei 1998 di Jakarta dan Solo.
2) Dikutip dari Nissa Wargadipura, t.t., tidak dipublikasikan
3) Ibid.
4) Ibid
5) Ibid
6) Ibid
7) Ibid.
8) Istilah lain yang bisa digunakan untuk menggambarkan kondisi seperti ini adalah "gerakan rakyat kelaparan" yang digunakan sebagai judul bukunya Fajar Pratikno (2000). Dia mensinyalir ketimpangan lahan yang terjadi di Gunung Kidul itu menyebabkan lahirnya *gerayak*.
9) Ibid.
10 HKTI merupakan organisasi bentukan pemerintah yang dimaksudkan untuk menyatukan wadah organisasi tani di seluruh Indonesia. Pada jaman Soeharto, HKTI merupakan satu-satunya organisasi tani yang sah dan diakui oleh pemerintah. Upaya menyatukan wadah organisasi tani ini antara lain ditujukan untuk menciptakan situasi politik "massa mengambang" *(floating mass)*.
11) Ibid.
12) Ibid.
13) Ibid.
14) Ibid.
15) Ibid.
16) Ibid.
17) Ibid.
18) Ibid.
19) Ibid.
20) Ibid.

Daftar Rekapulasi Data Kasus Tanah di Wilayah Kasus SPP di Kabupaten Garut, Tasikmalaya dan Ciamis, Propinsi Jawa Barat

KABUPATEN GARUT

No.	Jumlah KK	Nama Blok	Luas Obyek	Awal Menggarap	Awal Konflik	Wilayah Sengketa		Pihak yang bersengketa	Pihak yang bersengketa	Tipologi
						Desa	Kecamatan			
1	776	Sagara, Ciniti, Tarisi	1100	1960	1989	Sagara	Cibalong	Perhutani	TN	Berbukit-bukit
2	452	Balegod, Kurumuy	580	1960	1962	Karyamukti	Cibalong	Perhutani	TN	Berbukit-bukit
3	230	Legok Salim, Belengur, Goyobod	150	1982	1982	Mekarjaya	Sukaresmi	Perhutani	TN	berbukit-bukit
4	220	Legok Jeura, Wahi, Gn. Aul, Daruki, Jogjogan	200	1982	1982	Sarimukti	Pasirwangi	Perhutani	TN	berbukit-bukit
5	210	Lutung, barokaso	150	1982	1982	Pangauban	Cisurupan	Perhutani	TN	Datar
6	151	Lutung	100	1982	1982	Cipaganti	Cisurupan	Perhutani	TN	Datar
7	540	Stamplat	200	1982	1982	Keramat Wangi	Cisurupan	Perhutani		Datar
8	500	Sukamulya	300	1982	1982	Sukamulya	Pakenjeng	Perhutani	TN	Berbukit-bukit
9	209	Ciledug, Kiaralawang, Cileutik, Ciajag, Congeang, Balong, Baro	23,5	1968	1970	Sukamukti	Cilawu	PTPN VII Dayeuh Manggung	TN TN	Datar
10	101	Batu Sirep, Ciledug, Congeang	13	1968	1970	Mekarmukti	Cilawu	PTPN VII Dayeuh Manggung	TN	Datar
11	118	Legok Haji, Nabak, Cibitung	28,41	1968	1970	Dangiang	Cilawu	PTPN VII Dayeuh Manggung	TN	Datar
12	211	Cipicung, Cidahu, Burujul	78	1972	1972	Neglasari	Cisompet	PTPN VII Bunisari Lendra	TN	Datar
13	50	Benjang, Cikeuyeup, Kubang	27	1972	1972	Neglasari	Cisompet	PTPN VII Bunisari Lendra	TN	Datar
14	30	Cineungah	12	1972	1972	Jatisari	Cisompet	PTPN VII Bunisari Lendra	TN	Datar
15	138	Batu Beureurn, Batu Bero, Leuwi Panjang	75	1972	1972	Karyasari	Cibalong	PTPN VII Bunisari Lendra	TN	Datar
16	131	Dayeuh Manggung, Sancang	125	1972	1972	Sagara	Cibalong	PTPN VII Miramare	TN	Datar
17	100	Koreak, Cigorowek, Batu Beulang	100	1984	1984	Tegalega	Bungbulang	PBS Condong	TN	Berbukit-bukit
18	200	Cikoromong, Pamoyanan, Cigorowek	100	1984	1984	Karangwangi	Mekarmukti	PBS Condong	TN	Berbukit-bukit
19	150	Gn. Masigi, Gn. Kembar	150	1984	1984	Sinarjaya	Bungbulang	PBS Condong	TN	Berbukit-bukit
20	300	Kiara Pugur, Leuweung Buntu, Kiara Jangot, Lawang	200	1943	1994	Jangkurang Rancasalak Mandalasari Hegarsari	Leles Kadungora	Pengusaha	TN	Berbukit-bukit
21	150	Buka Tanah, Purbol	30	1987	1991	Mekarmukti	Cilawu	Perhutani	TN	Berbukit-bukit
22	50	Balong, Ciledug	5	1987	1991	Sukamukti	Cilawu	Perhutani	TN	Berbukit-bukit
23	50	Kimerak	50	1987	1991	Dangiang	Cilawu	Perhutani	TN	Berbukit-bukit
24	100	Mansur, Berecek, Kiarajigang, Pasangrahan	50	1990	1989	Sukatani	Cisurupan	Perhutani	TN	Berbukit-bukit
25	250	Sanukri, Santogo	100	1990	1989	Sukawargi	Cisurupan	Perhutani	TN	Berbukit-bukit
26	150	Pengkolan Margabakti	60	1990	1993	Margamulya	Cikajang	Perhutani	TN	Berbukit-bukit
	5.533		**3955**							

KABUPATEN CIAMIS

No.	Jumlah KK	Nama Blok	Luas Obyek	Awal Menggarap	Awal Konflik	Wilayah Sengketa		Pihak yang bersengketa	Pihak yang bersengketa	Tipologi
						Desa	Kecamatan			
1	1107	Cikamuran, Ciistri, Desa Kolot, Cihaur, Cibalimus, Lebak Jambe	350	1954	1987	Margaharja	Sukadana	Perhutani	TN	Berbukit-bukit
2	847	Ciawitali, Kiaralawang, Mandala, Palatar	400	1963	1989	Pamotan	Kalipucung	Perhutani	TN	Berbukit-bukit
3	90	Patrol, Jajrog, Karang Tengah, Cigorok, Karang Peuteuy	760	1975	1978	Bangun Karya	Langkap Lancar	Perhutani	TN	Berbukit-bukit
4	200	-	800	1973	1973	Kalijaya	Banjar Sari	Perhutani	TN	Berbukit-bukit
5	50	-	150	1975	1978	Jadikarya	Langkap Lancar	Perhutani	TN	Berbukit-bukit
6	60	-	100	1993	1993	Bojong	Parigi	Perhutani	TN	Berbukit-bukit
7	250	Cileungsi, Curug Kacapi, Beureum Ceuli, Cipangbokongan	200	1989	1990	Bagolo	Kalipucung	Perhutani	TN	Berbukit-bukit
8	200	Karangmukti, Karangtalun, Banjarkai, Kalicai	300	1951	1987	Selasari	Parigi	Perhutani	TN	Berbukit-bukit
9	1535	Pasir Katel, Pasir Semut, Pasir Arca, Bagong	708,725	1987	1992	Pasawahan Cigayam Cikaso Banjaranyar Kalijaya	Banjar Sari	Perhutani	TN	Berbukit-bukit
10	324	-	300	1972	1972	Pasawahan	Banjar Sari	PTPN VII H. Rusdi	TN	Berbukit-bukit
11	1700	-	1318,12	1994	1995	Sindangsari, Ciparanti, Kertaraharja	Cijulang	PT. Cikencreng	TN	Datar
12	551	-	368,17	1994	1995	Cimerak	Cijulang	PT. Cikencreng	TN	Datar
13	120	-	74,97	1985	1990	Jalatrang	Cipaku	PT. RSI	TN	Datar
14	75	-	41,76	1985	1990	Jelat	Cipaku	PT. RS1	TN	Datar
15	215	-	300	1994	1995	Maloya	Ciamis	PT. Maloya	TN	Datar
16	200	-	300	1993	1995	Kalangsari	Kawali	PT. Cintanagara	TN	Datar
17	492	-	368	1975	1983	Sukajaya	Cimerak	PT. Cikencreng	TN	Berbukit-bukit
18	650	-	200	1980	1982	Kalijati	Sidamulih	PT. Cipicung	TN	Berbukit-bukit
19	850	-	922	1977	1979	Cintanagara	Jatinagara	PT. RSI	TN	Berbukit-bukit
20	290	-	40	1977	1979	Selacai	Cipaku	PT. RSI	TN	Berbukit-bukit
21	513	-	50	1991	1992	Cibenda	Parigi	Sertifikat Cacat Hukum	TN	Berbukit-bukit

KABUPATEN CIAMIS

No.	Jumlah KK	Nama Blok	Luas Obyek	Awal Menggarap	Awal Konflik	Wilayah Sengketa		Pihak yang bersengketa	Pihak yang bersengketa	Tipologi
						Desa	Kecamatan			
22	138	-	255	1981	1983	Sukamaju	Cihaurbeuti	Perhutani	TN	Berbukit-bukit
23	68	-	110	1976	1978	Kersaratu	Sidamulih	Perhutani	TN	Berbukit-bukit
24	69	-	69	1981	1989	Purbahayu	Pangandaran	Perhutani	TN	Berbukit-bukit
	10.594		8485,745							

KABUPATEN TASIKMALAYA

No.	Jumlah KK	Nama Blok	Luas Obyek	Awal Menggarap	Awal Konflik	Wilayah Sengketa		Pihak yang bersengketa	Pihak yang bersengketa	Tipologi
						Desa	Kecamatan			
1	900	Tanjung Singuru, Cidadangrat, Sajeum, Maledug, Patrol, Babakan Karang, Citoke, Kiara Ramba, Labuhan Bulan	460	1970	1995	Tanjung Karang	Cigalontang	Perhutani	TN	Berbukit-bukit
2	280	Luluk, Pareang, Cigaru	400	1982	1998	Nagrog	Cipatujah	Perhutani	TN	Datar
3	800	Gn.Batu, Jalanlima, Sinagar, Datar Jalanopat, Pencutineh, Sintok, Jogjogan	460	1985	1986	Sindangasih	Cikatomas	PTPN VII Bagja Negara	TN	Berbukit-bukit
4	102	Cibadodon	180	1989	1990	Sindangasih	Cikatomas	Perhutani	TN	Berbukit-bukit
5	195	Gunung Tonjong	170	1989	1990	Neglasari	Pancatengah	Perhutani	TN	Berbukit-bukit
6	220	Ciandung	200	1987	1987	Ciandung	Cipatujah	Perhutani	TN	Berbukit-bukit
	2.497		**1.870**							

NAMA KASUS TANAH YANG MELAWAN KEHUTANAN DI **KABUPATEN GARUT** PROPINSI JAWA BARAT

No.	Jumlah KK	Nama Blok	Luas Ha	Awal Menggarap	Awal Konflik	Wilayah Sengketa		Lawan Sengketa	Status Tanah	Tipologi	Pimpinan OTL
						Desa	Kecamatan				
1	776	Sagara, Ciniti, Tarisi	1100	1960	1989	Sagara	Cibalong	Perhutani	TN	berbukit-bukit	AS
2	452	Balegod, Kurumuy	580	1960	1999	Karyamukti	Cibalong	Perhutani	TN	Berbukit-bukit	AS
3	131	Cijeruk, Cibajing	100	1976	1999	Sancang	Cibalong	BKSDA	TN	Datar	ES
4	12	Pasir Leube	32	1972	1999	Mekarjaya	Sukaresmi	BKSDA	TN	Curam	AS
5	230	Legok Salim, Belengur, Goyobod,	150	1982	1999	Mekarjaya	Sukaresmi	Perhutani	TN	Berbukit-bukit	AS
6	542	Lewikatel, Wahi, Pasir Buntu,	200	1982	1999	Sarimukti	Pasirwangi	Perhutani	TN	Berbukit-bukit	UB
7	-	Legok Panjang, Penelut, Jogjogan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	210	Lutung, Barokaso	150	1982	1997	Pangauban	Cisurupan	Perhutani	TN	Datar	SR
9	115	Lutung	100	1982	1997	Cipaganti	Cisurupan	Perhutani	TN	Datar	MY
10	540	Stamplat	200	1982	1997	Karamat Wangi	Cisurupan	Perhutani	TN	Datar	RM
11	500	Sukamulya	300	1982	1997	Sukamulya	Pakenjeng	Perhutani	TN	Berbukit-bukit	AA
	3.508		**2.912**								

NAMA KASUS TANAH YANG MELAWAN KEHUTANAN DI **KABUPATEN TASIKMALAYA** PROPINSI JAWA BARAT

No.	Jumlah KK	Nama Blok	Luas Ha	Awal Menggarap	Awal Konflik	Wilayah Sengketa		Lawan Sengketa	Status Tanah	Tipologi	Pimpinan OTL
						Desa	Kecamatan				
12	900	-	400	-	1999	Tanjung Karang	Cigalontang	Perhutani	TN	berbukit-bukit	LL
13		-	100	-	2000	Nagrog		Perhutani	TN	Datar	

NAMA KASUS TANAH YANG MELAWAN KEHUTANAN DI **KABUPATEN CIAMIS** PROPINSI JAWA BARAT

No.	Jumlah KK	Nama Blok	Luas Ha	Awal Menggarap	Awal Konflik	Wilayah Sengketa		Lawan Sengketa	Status Tanah	Tipologi	Pimpinan OTL
						Desa	Kecamatan				
14	750	Cikamuran, Ciistri, Desa Kolot, Cihaur, Cibali Naga, Cipancur, Pasir Beuneur, Cangkore, Lebak Limus, Lebak Jambe	280	-	1998	Margaharja	Sukadana	Perhutani	TN	berbukit-bukit	WT
15	-	-	300	-	-	Pamotan	Kalipucung	Perhutani	TN	berbukit-bukit	-
16	90	Patrol, Jajrog, Karang Tengah Cigorok, Karang Peuteuy	50	-	2000	Bangun Karya	Langkap Lancar	Perhutani	TN	berbukit-bukit	ED
17	200	Idem	200	-	2000	Kalijaya	Banjar Sari	Perhutani	TN	-	-
18	50	Idem	150	-	2000	Jadikarya	Langkap Lancar	Perhutani	TN	-	ED
19	60	-	100	-	2000	Bojong	Parigi	Perhutani	TN	-	ED
20	250	Cileungsi, Curug Kacapi,	200	-	2002	Bagolo	Kalipucung	Perhutani	TN	-	-
21	-	Beureum Ceuli, Ciangbokongan	300	-	1999	Selasari	-	Perhutani	TN	-	TH
	1.400		**1.580**								

Bagian 5

Melakukan Aksi Massa



Melakukan Aksi Massa

Aksi Massa SPP

Salah satu kewajiban anggota SPP setelah ia bergabung dengan OTL setempat adalah melakukan aksi massa Beberapa aksi massa yang dimaksudkan itu antara lai adalah, (a) *reclaiming* atau secara aktif melakukan penguasaar tanah, (b) ekspansi anggota baru di lingkungan sekitarnya untuk menambah jumlah anggota OTL, (c) dukungan solidaritas terhadap OTL-OTL yang lain melalui pengerahan massa, dan (d) aksi demonstrasi untuk mendesakkan isu-isu penyelesaian sengketa tanah dan reformasi agraria yang dilakukan secara bersama-sama dengan organisasi lain.[1]

Apabila dicermati, sejumlah strategi aksi massa SPP itu ditujukan antara lain untuk semakin memperkuat organisasi ke dalam dan seiring dengan itu adalah melakukan tekanan *(pressure)* terhadap pemerintah daerah dan pusat berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang akan berdampak langsung terhadap kondisi perjuangan mereka. Aksi massa "di dalam" seperti *reclaiming* dan ekspansi biasanya hanya dilakukan di tingkat lokal dan jauh dari telinga wartawan. Aksi-aksi massa ini merupakan bentuk perlawanan *face to face* antara kekuatan petani dengan perkebunan atau kehutanan. Sebagai suatu bentuk

perlawanan langsung, aksi massa "di dalam" ini seringkali dilakukan secara rahasia *(underground)*, terutama aksi reclaiming yang mana mereka harus berhadapan dengan "preman perkebunan", kepolisian atau bahkan militer. Massa SPP di dalam aksi massa ini "tidak terlihat" karena menyatu dengan warga desa lainnya, sementara secara bergerilya mereka melakukan perlawanan sehingga pihak lawan akan kesulitan mendeteksi gerakan-gerakannya.

Sedangkan aksi massa "diluar" atau yang sering disebut demonstrasi dilakukan dengan cara sebaliknya. Aksi massa ini dilakukan secara terbuka dan justru menggalang kekuatan-kekuatan dari organisasi-organisasi tani lain diluar SPP. Strategi aksi massa yang terbuka antara lain diperlihatkan pada jumlah massa yang sangat besar di tempat-tempat tertentu seperti kantor DPR, DPRD, di jalan-jalan protokol; sejumlah poster, baliho, bendera SPP, lagu-lagu perjuangan, dan menyebarkan *"statement"* yang terkait dengan tema aksi saat itu. Galangan kekuatan dari organisasi-organisasi lain dilakukan terhadap antara lain pada serikat-serikat tani dan kelompok-kelompok aktivis mahasiswa dari berbagai kota terdekat. Terlebih lagi, aksi massa yang dilakukan secara terbuka dengan melibatkan jumlah massa yang sangat besar ini biasanya sengaja dipublikasikan yakni dengan cara mengundang wartawan dari berbagai media massa. Tujuan dari aksi massa ini antara lain adalah melakukan *pressure* terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang secara langsung berdampak pada kondisi perjuangan mereka.

Pada tabel di bawah ini terlihat ada perbedaan isu yang diangkat dalam sejumlah aksi massa yang berupa demontrasi SPP sebelum tahun 2000 dengan sesudahnya. Antara tahun 1990-2000, aksi-aksi massa SPP belum terfokus hanya pada masalah agraria saja. Sejumlah aksi yang ditujukan terhadap situasi politik yang represif seperti "menuntut mundurnya Soeharto", dihapuskannya pende-

Sejumlah demonstrasi massa SPP yang terekam media massa (1990-2004)

Tanggal	Topik aksi	Aliansi	Lokasi	Massa
?	Kasus tanah Sagara	FPPMG	DPRD Garut	?
?	Kasus tanah Selekta	FPPMG	DPRD Garut	?
?	Kasus tanah Cigembong	FPPMG	DPRD Garut	?
?	Menuntut Sidang Istimewa MPR	FPPMG, FAMI	DPR	?
1993	Mencalonkan ketua umum PDI sebagai presiden	FPPMG	Cikopo	?
1994	Menuntut ditiadakannya pendekatan keamanan dalam rangka ditahannya 21 mahasiswa	FPPMG	?	?
1994	Menuntut dicabutnya 5 paket UU politik dan dwi fungsi ABRI	FPPMG	?	?
30/3/1994[2]	Menuntut kepastian hukum tanah garapan	FPPMG	Depdagri, Jakarta	30
1995	Menuntut dihapuskannya pengekangan hak berpendapat	FPPMG	?	?
28/6/1995[3]	Menuntut agar calon Kades terpilih segera dilantik	?	DPRD Garut	Puluhan
1996	Menuntut pertanggungjawaban Soedomo, Sumarlin pada kasus Bapindo (Edy Tansil) dan Dicky Iskandar Dinata pada kasus bank Duta	FPPMG	?	?
1997	Boikot Pemilu 1997	FPPMG	Jakarta	?
2/9/1999[4]	Menuntut diselesaikannya kasus-kasus tanah	FPPMG	DPRD Garut	1500
23/11/1999[5]	Menuntut modal besar untuk petani	FPPMG	Kantor Menko Ekoin	Ribuan
23/2/2000[6]	Menuntut tanah pengangonan menjadi tanah milik	Petani Tasikmalaya	Gedung Sate Bandung	Ratusan
14/3/2000[7]	Mengeluhkan lahan 100.000 yang dicaplok PTP	-	DPRD Jabar	Ratusan
23/4/2002[8]	Pembukaan Munas III KPA	Petani Ciamis, Tasikmalaya, Sumedang, dan Garut	Lapangan bekas term. Ciawitali, Garut	50 truk, 30 pick up, dan 50 delman
24/9/2002[9]	Peringatan Hari Agraria	Petani Ciamis, Tasikmalaya, Cianjur, Karawang, Subang	Lapangan Gasibu Bandung	5000
26/11/2002[10]	Menuntut surat garapan resmi dari Bupati Ciamis	SPP Ciamis	Pendopo Bupati Ciamis	300
26/11/2002[11]	Dukungan terhadap empat tersangka kasus pembakaran mobil PTPN VIII	SPP, FPMR	PN Tasikmalaya	350
8/6/2004[12]	Menolak RUU Perkebunan	Aliansi Petani Indonesia, Serikat Petani Banten, Petani Mandiri, Serikat Petani Jampang, FAM UI, Barisan Orang Bersatu, Front Kota, dan Forum Jayabaya	Gedung DPR	Ribuan

katan militer dalam menangani demonstrasi massa, dicabutnya lima paket UU politik, serta menuntut mundur pelaku kasus korupsi negara masih dilakukan pada saat itu. Alat perjuangan atau organisasi yang digunakan saat itu adalah FPPMG, belum terbentuk SPP sehingga isu yang diangkat merupakan gabungan antara kepentingan mahasiswa dan massa rakyat lainnya seperti petani, buruh, nelayan, dan pedagang kecil.

Setelah tahun 2000, aksi-aksi massa SPP terfokus pada masalah agraria. Persoalan yang diangkat pada aksi-aksi massa ini seperti menuntut tanah *pengangonan* menjadi tanah milik, mengeluhkan lahan yang dicaplok perusahaan perkebunan, dukungan terhadap kasus kekerasan yang dilakukan oleh kalangan petani terhadap perusahaan perkebunan, dan menuntut dibatalkannya pengesahan RUU Perkebunan. Alat perjuangan atau organisasi yang digunakan setelah tahun 2000 jauh lebih kompleks. Untuk aksi massa seperti demonstrasi besar-besaran SPP biasanya mengerahkan seluruh kekuatannya, seperti YAPEMAS, FPPMG, FPMR, FARMACI, dan OTL-OTL yang siap secara pendanaan dan logistik. Dan setiap organisasi mahasiswa itu biasanya juga mengundang organisasi lain diluar jaringan SPP tetapi yang masih dianggap mempunyai visi dan misi perjuangan yang sejalan untuk bersama-sama melakukan demonstrasi sehingga dari segi jumlah massa, aksi-aksi massa setelah tahun 2000 jauh lebih bersifat massif.

Sumber Pendanaan dan Logistik

Pada setiap aksi tidak terdapat dana khusus yang disediakan oleh organisasi tertentu *(sponsor)* ataupun donatur perorangan dalam jumlah yang besar. Dana dari setiap aksi diperoleh secara swadaya dari kelompok masing-masing. Untuk jenis aksi massa yang berupa reclaiming dan ekspansi tidak terlalu banyak membutuhkan dana atau terkadang bisa dikatakan "praktis tidak membu-

tuhkan dana". Aksi massa yang berupa reclaiming hanya melibatkan kelompok kecil di dalam OTL yang walaupun anggotanya mencapai ratusan orang.

Di setiap OTL terdapat suatu mekanisme penggalangan dana secara swadaya yang dilakukan rutin pada setiap bulannya. Penggalangan itu biasanya disebut "iuran anggota SPP" yang dibeberapa tempat besarnya adalah Rp1000,- per bulannya untuk setiap anggota. Dana ini dikelola oleh kelompok kecil ini untuk kepentingan kelompok dan sosial anggota kelompoknya, seperti membantu keluarga yang sedang berduka. Tetapi terkadang dana ini juga digunakan untuk membantu kebutuhan kelompok lain yang muncul pada setiap aksi massa mereka.

Disamping itu, keperluan aksi massa di tingkat OTL biasanya dicukupi dari bekal masing-masing anggota. Kebutuhan aksi-aks

Aksi Massa SPP Menolak RUU Perkebunan

Pada tanggal 8 Juni 2004, di Jakarta telah berkumpul sejumlah besar massa yang menyebut diri sebagai Koalisi Aksi Tani Indonesia.[13] Mereka merupakan gabungan besar dari anggota-anggota serikat tani serta elemen-elemen mahasiswa khususnya dari wilayah Jawa Barat dan DKI Jakarta. SPP, jelas menjadi motor aksi besar-besaran ini. Dalam jumlah massa, SPP yang penuh menurunkan elemen organisasinya seperti OTL-OTL dari tiga kabupaten, ditambah elemen LSM dan mahasiswanya yakni YAPEMAS dan FPPMG, FPMR, serta FARMACI menyumbang jumlah massa yang besar, bahkan terbesar dibandingkan misalnya dengan massa anggota serikat tani lainnya.[14]

Pada aksi tersebut, tuntutan mereka jelas yakni menolak pengesahan RUU Perkebunan yang dinilai akan merugikan petani.[15] RUU Perkebunan dinilai bertentangan dengan semangat UUPA nomor 5 tahun 1960 tentang Pembaharuan Agraria dan Tap MPR IX/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Dengan RUU Perkebunan itu, anggota SPP yang dalam beberapa tahun terakhir sudah menguasai lahan-lahan eks perkebunan akan terancam.

Dalam aksi massa ini kita mencatat bahwa upaya massa anggota SPP mempengaruhi kebijakan itu tidak dilakukan sendirian sebagai organsiasi SPP. Walaupun besar, setidaknya dalam jumlah massa namun SPP merasa perlu menggalang dukungan dari berbagai pihak terutama dari serikat-serikat tani lainnya yang setidaknya menghadapi persoalan yang sama.[16] Bahkan SPP merasa perlu menggalang dukungan dari massa mahasiswa yang selama ini dikenal sebagai gerakan kelas menengah perkotaan. Strategi SPP mempengaruhi kebijakan bisa dibilang jitu karena telah berhasil mengembangkan dukungan secara lebih luas dari sekedar anggota SPP sendiri. Hal ini juga berarti 'politik kelas menengahnya' cukup berhasil dimanfaatkan untuk mempengaruhi proses kebijakan pemerintah.

massa setiap anggota sama dengan bekal mereka sebagai petani sehari-hari, seperti misalnya cangkul, sabit, air minum, dan sebungkus makanan. Alat-alat seperti cangkul, sabit, parang dan lainnya itu digunakan untuk melakukan pembukaan lahan-lahan baru secara bersama-sama, seperti misalnya harus digunakan untuk membongkar pohon teh yang akarnya sangat kuat, meratakan tanah dengan cangkul, menebang pohon yang menghalangi rencana lahan garapan, membersihkan semak-semak, dan sebagainya.

Sedangkan kebutuhan dana pada aksi massa mendukung OTL lain dikeluarkan dari iuran sukarela dan jika masih kurang ditambah dari simpanan kelompok. Dana untuk mendukung aksi massa di OTL-OTL yang lain biasanya digunakan untuk menyewa truk untuk mengangkut massa, misalnya seharga Rp300.000,-. Sedangkan untuk konsumsi disamping mereka membawa bekal sendiri, untuk hari-hari berikutnya biasanya pihak OTL tuan rumah yang menyediakannya. Di sisi lain, hubungan ini juga menunjukkan solidaritas diantara OTL yang sangat tinggi.

Demikian pula dengan penggalangan dana pada kasus demonstrasi besar seperti yang dilakukan di Jakarta pada tanggal 7 Juni 2004 dimana sejumlah massa petani dari berbagai organisasi tani bergabung ke dalam Koalisi Tani Indonesia menuntut dibatalkannya RUU Perkebunan karena sudah dinilai mengancam kondisi perjungan mereka. Untuk aksi massa sebesar ini, kebutuhan yang cukup penting adalah transportasi. Para anggota SPP di setiap OTL menggalang dana dari kelompoknya untuk menyewa bus, sehingga ada ratusan bus pengangkut massa petani saat demonstrasi besar ini dilakukan di Jakarta.

Senjata-senjata Ideologis: Lagu-lagu Perjuangan

Selain orasi dari berbagai kalangan yang biasanya cukup memanaskan semangat para demonstran, spanduk, poster dan

baliho yang berisi tulisan-tulisan "protes", biasanya juga terdapat lagu-lagu ciptakan mereka yang dinyanyikan bersama-sama selama menempuh perjalanan. Lagu-lagu itu selanjutnya disebut sebagai lagu-lagu perjuangan petani, tidak diproduksi secara komersial, tetapi diciptakan untuk membangkitkan semangat ideologis perjuangan-perjuangan petani.

Lirik lagu yang diciptakan secara singkat ini menggambarkan susana petani yang sedang berjuang mencari keadilan seperti yang ia sebutkan, "aku berjuang, demi keadilan, keadilan manusia". Lahirnya lirik ini tentunya dilatarbelakangi oleh suasana ketidakadilan di kalangan petani, seperti misalnya pada *pencaplokan* lahan-lahan garapan petani oleh perusahaan-perusahaan perkebunan dan kehutanan. Pihak swasta dan negara menguasai lahan yang sangat luas sementara rakyatnya terjepit sehingga miskin lahan. Konteks situasi sosial inilah yang mendorong lahirny lirik-lirik lagu bertemakan keadilan di bawah ini.

Tema lagu yang mengekspresikan realitas sosial tampakny. menjadi tema-tema lagu favorit kalangan petani. Sebagaimana lirik lagu di bawah ini yang menggambarkan realitas petani yang miskin lahan karena terjepit perusahaan-perusahaan perkebunan dan kehutanan sehingga mereka kurang mampu untuk mencukupi kebutuhan rumah-tangganya. Digambarkan dalam kalimat, "Anak kurus tak sekolah, pemuda desa tak kerja". Anak kurus menggambarkan kebutuhan gizi di kalangan anak-anak petani yang sangat kurang atau bahkan kekurangan makanan, dan tak sekolah menggambarkan realitas sosial mereka yang tidak mampu menyekolahkan

AKU PETANI

Aku petani
Aku berjuang
Bela euy 3x , euy, euy

Aku berjuang
Demi keadilan
Keadilan manusia

anaknya hingga tingkat lanjut. Biaya sekolah yang semakin besar dan uang transportasi untuk pulang-pergi sekolah karena jauh diluar desa tidak memungkinkan bagi pendapatan keluarga tani miskin sehari-hari untuk mencukupinya. Banyak diantara anak-anak yang juga putus sekolah karena tidak mampu secara finansial.

DARAH JUANG

Disini negeri kami, tempat padi terhampar
Samuderanya kaya raya
Tanah kami subur, tuhan

Di negeri permai ini, berjuta rakyat tersimbah duka
Anak kurus tak sekolah pemuda desa tak kerja

Reff
Mereka dirampas haknya
Tergusur dan lapar
Bunda relakan darah juang kami
Untuk membebaskan rakyat
Padamu kami berbakti (padamu kami berjanji)

Berbeda dengan konteks lirik lagu diatas, lagu di bawah ini menyuarakan tirani yang membelenggu kaum tani. Lirik lagu ini sangat kontekstual pada masa pemerintahan Soeharto yang membatasi ruang gerak petani dalam organisasi-organisasi sosial, ekonomi, politik, seni, budaya, dan agama. Setelah "tidur" sekian lama karena kondisi yang sangat represif sehingga pikiran-pikiran warga mati oleh hegemoni Soeharto selama 32 tahun itu, maka perlu dibangkitkan kembali menyongsong reformasi. Semangat juang yang ditanamkan dalam lirik ini antara lain semangat untuk

bangkit membangun organisasi tani yang mandiri dan dengan organisasi yang kuat untuk menghancurkan tirani. Dengan semboyan yang pasti: "Rakyat pasti menang". Lirik lagu ini juga populer di kalangan demostran mahasiswa yang berhaluan "kiri".

BANGKITLAH PETANI

Bangkitlah wahai petani
Mari rapatkan barisan
Jadilah pejuang sejati siap hancurkan tirani

Mari kobarkan api
Dari jiwa kita yang suci
Tuk membebaskan negri ini dari tangan-tangan serakah

Ayo berseru kita bersatu
Rakyat pasti menang 2X

PETANI-PETANI (lagu Pelangi-Pelangi)

Petani petani
Malangnya nasibmu
Ditipu ditindas dan dirampas haknya
Pemerintah diam
Tak mau peduli
Petani-petani ayo berjuang !

Tema lagu-lagu lain yang diekspresikan dalam bahasa Sunda juga dimaksudkan untuk mengobarkan semangat juang para petani melawan rezim ketidakadilan. Namun di sisi lain tema lagu-lagu perjuangan dalam bahasa Sunda ini juga menunjukkan unsur primordialisme dalam perjuangan kaum tani. Sebagaimana juga yang

digunakan pada nama organisasi mereka Serikat Petani Pasundan yang dengan jelas menonjolkan unsur kedaerahan.

TEKAD PATANI

Kaula sarekat tani
Ti pasundaan
Boga tekad nanjeurkeun bebeneran
Teu ringrang teu hariwang

Kaula maju ka medan perang
Mata hatekomara waja
Ngabelaan lemah cai batining getih sajati
Bajoang keur lemah cai

Reff.
Gap kana pacul
Ulah hese jeungtalangke
Prang kana parang
Babarengan yu bajoang
Bral geura miang
Geura tandang makalangan
Hey dulur-dulur pada-pada masing makmur

TEU HONCEWANG (VERSI SPP)

Teu honcewang sumoreang
Tekad patani pasundan
Cadu mundur pantrang mulang
Mun maksud tacan laksana

Berjoang keur lemah cai
Lali rabi tur tega pati
Taya basa sieun ke BRIMOB jeung PREMAN
Hayu batur urang lawan babarengan

1) Nissa Wargadipura, t.t., tidak dipublikasikan.
2) Jayakarta, 31/03/1994.
3) Bandung Pos, 29/06/1995.
4) GALA, 3/09/1999.
5) Rakyat Merdeka, 24/11/1999.
6) Pikiran Rakyat, 24/02/2000
7) KOMPAS, 17/03/2000.
8) Pikiran Rakyat, 24/04/2002.
9) Pikiran Rakyat, 25/09/2002, Republika, 25/09/2002, KOMPAS, 25/09/2002.
10) Pikiran Rakyat, 27/11/2002.
11) Pikiran Rakyat, 27/11/2002.
12) Suara Pembaharuan, 8/06/2004, KOMPAS, 9/06/2004, AKSI, 9/06/2004, Rakyat Merdeka, 9/06/2004, Sinar Harapan, 8/06/2004, Koran Tempo, 9/06/2004, Non Stop, 9/06/2004, Radar Tasikmalaya, 8/06/2004
13) Mengenai aksi ini bisa dibaca antara lain di berbagai harian nasional dan lokal seperti Kompas, Media Indonesia, Republika, Suara Pembaharuan, Koran Tempo, Bisnis Indonesia, Rakyat Merdeka, Merdeka, Pikiran Rakyat, Radar Tasikmalaya, Harian Aksi, Non Stop, pada tanggal 9 Juni 2004.
14) Menurut informasi aktivis Yapemas, SPP memberangkatkan 100 bus, jauh lebih besar dari massa anggota serikat tani lainnya. Dalam catatan beberapa harian, jumlah massa aksi ini mencapai 12.000 orang.
15) Penolakan petani terutama pada butir yang bertentangan dengan UUPA nomor 5 tahun 1960. Dalam pasal itu ditegaskan bahwa luas lahan minimal 5 ha. Sedangkan dalam RUU Perkebunan pasal 16 disebutkan setiap pelaku usaha budidaya perkebunan .... dengan luas lahan 25 ha atau lebih. Dengan RUU Perkebunan itu para petani terancam akan kehilangan lahan garapannya. (Medikom, 10-16 Februari 2003)
16) Disamping SPP yang terdiri dari elemen-elemen organisasinya yakni OTL-OTL SPP di tiga kabupaten, Yapemas, FPPMG, FPMR, Farmaci, juga dari serikat tani lain seperti Aliansi Petani Indonesia, Serikat Petani Banten, Petani Mandiri, dan Serikat Petani Jampang. Dari elemen mahasiswa pendudukung antara lain Front Aksi Mahasiswa (FAM) UI, Barisan Orang Bersatu, Front Kota, dan Forum Jaya Baya. (Non Stop, 9 Juni 2004)

Bagian 6

Identifikasi Politik Petani



Identifikasi Politik Petani

Pengelompokan Petani

Munculnya banyak serikat tani sejak awal masa reformasi hingga sekarang telah membuka peluang bagi sejumlah besar massa petani untuk memilih serikat-serikat tani yang cocok dengan pilihan serta kebutuhan perjuangannya. Dalam satu desa misalnya, tidak menutup kemungkinan sebagian warga desanya menjadi anggota serikat tani A dan sebagian yang lain menjadi anggota serikat tani B dan seterusnya.

Satu pertanyaan barangkali bisa dikemukakan, apa yang terjadi di kalangan petani jika di dalam satu desa terdapat lebih dari satu serikat tani? Salah satu jawaban yang paling mungkin adalah pilihan. Kalangan petani akan dihadapan pada suatu pilihan untuk menjadi anggota suatu serikat tani. Hal ini juga terjadi di desa Dangiang yang mana sebagian warganya menjadi anggota SPP sementara sebagiannya yang lain ada yang menjadi anggota Serikat Tani Nasional (STN).

Apabila digunakan satuan wilayah yang jauh lebih besar dari desa yakni lingkup nasional maka sebenarnya gejala yang sama juga muncul. Ada petani yang merupakan warga negara Indonesia ini yang menjadi anggota Aliansi Petani Indonesia (API), ada yang menjadi anggota Federasi serikat Petani Indonesia (FSPI), ada yang

menjadi anggota organisasi Petani Mandiri, dan banyak lagi diantara mereka yang menjadi anggota serikat-serikat tani yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia bersamaan dengan munculnya serikat-serikat tani kedaerahan.

Di tingkat basis, seperti kampung ataupun desa, proses identifikasi kelompok ini juga terjadi. Mungkin tidak terlalu terasa jika di desa hanya ada satu serikat tani, tetapi di tingkat nasional proses identifikasi kelompok ini sudah berlangsung. Bergabungnya organisasi-organisasi tani kecil-kecil dari berbagai daerah ke dalam serikat-serikat tani nasional yang berbeda-beda seperti diatas setidaknya menunjukkan hal itu. Kini di tingkat nasional terjadi identifikasi kelompok, "siapa menjadi anggota serikat tani apa?".

Pengelompokan yang jauh lebih besar yang melibatkan jaringan-jaringan juga sedang terjadi misalnya antara anggota Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) dengan Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI) dan sementara itu di sisi lain juga terdapat jaringan petani seperti IPPHTI di tingkat nasional. Sehingga pada akhirnya, apa yang menentukan pengelompokan ini terjadi? Apakah semata-mata proses identifikasi politik yang terjadi di dalam setiap kelompok ataukah (lebih jauh) merupakan proses pembentukan kelas petani?

Proses Identifikasi SPP

Pada kenyataannya, proses pembentukan identitas baru di dalam kelompok itu tidaklah mudah, apalagi secara mental para petani kecil dan buruh tani ini telah dikooptasi oleh rejim yang represif dan otoriter selama bertahun-tahun. Setelah sekian puluh tahun mereka dikooptasi dan dibentuk dengan mekanisme perlawanan tersembunyi, kini mereka harus mengatur strategi organisasi dan memulai serangan-serangan secara terbuka, baik serangan-serangan verbal maupun pada kenyataannya harus siap berhadapan dengan orang-orang suruhan perkebunan atau kehu-

tanan.

Identitas baru telah diuntungkan oleh situasi krisis, dengan pertumbuhan anggota di dalam kelompok yang sangat cepat sehingga sekarang menjadi petani penggarap. Penguasaan lahan-lahan baru ini telah sedikitnya mengurangi diferensiasi sosial atas kelompok-kelompok sosial lain yang sama-sama berat menanggung beban akibat krisis ini. Artinya, kelompok penggarap lahan-lahan baru ini telah terjamin kondisi perekonomian rumah-tangganya, mempunyai sumber penghasilan dari lahan garapan, kecukupan pangan dan bisa menjual sebagian hasil panenannya

Gambaran sebagian penguasaan lahan-lahan petani yang sudah menjadi anggota SPP

Nama OTL	Kabupaten	Luas lahan garapan yang sekarang dikuasai	Rata-rata kepemilikan lahan	Luas lahan kolektif
Selacai	Ciamis	40 Ha	30-100 bata	1 Ha
Bagolo	Ciamis	150 Ha	280 bata	-
Banjar Anyar II	Ciamis	215 Ha	50- .... bata	-
Purbahayu	Ciamis	70 Ha	1000 m²	Ada
Kalijati	Ciamis	150 Ha	0,5 – 1 Ha	Ada
Nagrog	Tasikmalaya	400 Ha	2/3 Ha	-
Kalijaya	Ciamis	200 Ha	0,5 Ha	-
Pamotan	Ciamis	90 Ha	550-800 m²	1 Ha
Kalijaya I	Cikaso	114 Ha	2000-10.000 m²	Ada
Belender	Ciamis	69 Ha	9500 m²	2,5 Ha
Cintanagara	Ciamis	160 Ha		Ada
Sagara	Garut	940 Ha	1 Ha	-
Dangiang	Garut	40 Ha	150 tumbak	-
Sukamukti	Garut	?	35-300 tumbak	-
Mekarmukti	Garut	110 Ha	35-200 tumbak	150 tumbak
Cikujang	Ciamis	50 Ha	200 bata	-
Tanjung Karang	Tasikmalaya	450 Ha	200 bata	Ada
Cieceng	Tasikmalaya	600 Ha	0,25-1 Ha	Ada
Bojong	Caimis	24 Ha	350 bata – 1 Ha	Ada
Jangkurang	Leles	250 Ha	100 bata-1 Ha	-
Karyasari	Garut	80 Ha	5000 m²	Ada
Cikeuyep	Garut	41 Ha	2000-3000 Ha	Ada
Mukti Barokah	Garut	100 Ha	3 patok – 0,5 Ha	-
Banjar Anyar I	Ciamis	118 Ha	3300 m²	Ada
Bangun Karya	Ciamis	600 Ha	350 bata	Ada
Benjang	Garut	30 Ha	500-5000 m²	Ada

Sumber: Dokumentasi SPP, diolah.

untuk biaya sekolah anak-anaknya, termasuk untuk memulihkan tradisi sosial mereka seperti sumbang-menyumbang dan bentuk-bentuk gotong-royong lainnya.[1]

SB adalah nama petani di desa Dangiang yang dahulu dicirikan dengan petani kecil yang berasal dari kelas sosial rendahan. Tetapi kini karena peranannya yang menonjol di dalam OTL, dia diangkat menjadi pengurus OTL Dangiang. Selang dua tahun kemudian, ia telah diangkat menjadi ketua Komite Dewan Sekolah di desanya. Suatu posisi sosial yang setidaknya melengkapi meningkatnya identitas mereka sebagai petani penggarap. Dimata masyarakat, para pejuang di "barisan depan" ('Tim 17') ini cukup disegani. Citranya mendekati "pemimpin OTL" yang walaupun kelompok kecil tetapi mempunyai pengaruh yang cukup besar pada penataan kembali hubungan-hubungan sosial di desa.

Pada bagian sebelumnya juga dijelaskan tingkat keswadayaan para anggota SPP ini sehingga memajukan desa. Di mata para anggota SPP, desa merupakan arena politik identitas yang baru. Bukan lagi tingkat kampung melainkan tingkat desa atau suatu tempat dimana identitas dan status sosial mereka meningkat. Desa menjadi penting bukan hanya dalam pengertian sosial seperti di kampung, tetapi desa juga merupakan sistem pemerintahan terendah negara ini. Mulai memikirkan desa berarti mulai memikirkan hal-hal yang bukan sekedar status sosial tetapi juga identitas politik mereka.

Tetapi sejauhmana orang-orang yang dahulu menjadi *frontier* ini berhadapan dengan sistem pemerintahan desa? Agenda ini tampaknya belum diselesaikan secara tuntas. Persoalannya jauh lebih rumit dengan sistem politik desa yang dipertahankan oleh alat-alat kekuatan politik negara, daripada sistem sosial di kampung dimana interaksi dan perubahan yang cepat memungkinkan diakomodasi oleh warga masyarakat kampung itu. Belum lagi mereka berhadapan dengan masyarakat desa yang struktur sosial-

nya jauh lebih kompleks daripada kampung, dan masyarakat yang secara politik telah menerima aturan-aturan sistem pemerintahan desa dari pemerintah pusat seperti mekanisme pemilihan kepala desa, BPD serta format desa itu sendiri sejak UU 5/1976 hingga UU 32/2004. Desa yang kompleks dan sekaligus terkontrol tampaknya masih menjadi arena pembentukan identitas politik yang belum terlalu nyata.

Jaringan antar OTL

Pada struktur organisasi SPP terlihat bahwa kekuatan basis massa ini terletak pada OTL. Sebuah organisasi terkecil dalam struktur SPP yang berada di kampung-kampung atau desa-desa. Jumlah anggotanya bisa mencapai ratusan orang. Di dalam setiap OTL terdapat kepengurusan yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal.

Di beberapa OTL sudah mulai didukung dengan organisasi lair

Tata tertib anggota SPP:

1) Mendaftarkan diri pada dewan pimpinan Organisasi Tani Lokal setempat dan direkomendir oleh Koordinator Dewan Pimpinan Organisasi Tani Lokal.
2) Melaksanakan agenda dan program yang telah diputuskan secara parsitipatif oleh musyawarah Dewan Pimpinan Organisasi Tani Lokal.
3) Membayar iuran wajib anggota yang diputuskan secara musyawarah yang besarnya ditetapkan oleh musyawarah Dewan Pimpinan Organisasi Tani Lokal masing-masing.
4) Memiliki kartu anggota Serikat Petani Pasundan.
5) Menjaga nama baik Serikat Petani Pasundan.
6) Menjalin silahturahmi dengan sesama anggota dan pimpinan Organisasi Tani Lokal dan sesama anggota lainnya
7) Memperjuangkan hak untuk membangun kesejahteraan ekonomi, sosial, politik, dan budaya bagi anggota.
8) Memelihara dan menjaga keseimbangan lingkungan hidup yang berkeadilan dan kesetaraan.
9) Berjuang membangun kepintaran dan kecerdasan.
10) Berjuang merebut keadilan dan kecerdasan.
11) Meningkatkan kebersamaan dan gotong-royong.
12) Melaksanakan 9 (Sembilan) Wajib SPP.
13) Mengontrol dan mengawasi kinerja Dewan Pimpinan Organisasi Tani Lokal masing-masing.
14) Hal-hal yang belum tercantum dari poin 1 sampai dengan poin 13 akan diatur dan dimusyawarahkan dikemudian hari.

seperti simpan-pinjam yang dilakukan oleh kelompok ibu-ibu. Beberapa OTL yang sudah maju mulai membentuk koperasi untuk memfasilitasi para anggota SPP seperti penyediaan bibit, pupuk, dan obat-obatan yang dikelola melalui koperasi. Beberapa OTL juga didukung oleh Satgas SPP yang terdiri dari pemuda dengan kegiatan seperti latihan seni beladiri. Pembentukan Satgas ini ditujukan untuk melakukan tugas-tugas keamanan terhadap OTL-nya. Disamping itu mereka dibentuk untuk memenuhi kebutuhan Satgas SPP secara keseluruhan.

Ilustrasi Scott (1990) tentang sebuah organisasi cukup sesuai untuk menggambarkan sifat organisasi SPP ini: "sebuah organisasi yang tidak kelihatan formal, cara kerjanya sangat efektif hanya dengan sedikit instruksi, dan jarang terlihat rapat-rapat sebagaimana di kantor, dan hanya mengandalkan hubungan keseharian mereka". Ilustrasi ini barangkali lebih cocok untuk menggambarkan organisasi SPP daripada merujuk ke organisasi formal, seperti birokrasi pemerintahan, perusahaan swasta, partai politik, militer, organisasi olah raga, dan sebagainya. Tidak akan ditemukan kecocokan dengan organisasi-organsiasi itu karena OTL pada dasarnya berbasis pada hubungan keseharian.

Barangkali satu hal yang sulit dibayangkan jika OTL-OTL seperti itu bisa menjalin jaringan organisasi antar wilayah kecamatan dan kabupaten. Memang sebagian kerja-kerja jaringan itu digarap oleh para aktivis YAPEMAS dan organisasi pendukungnya di setiap kabupaten. Mereka yang paling dinamis bergerak ke setiap OTL hampir setiap hari. Diantara aktivis FPPMG misalnya, banyak diantara mereka yang berasal dari basis; anak-anak yang disekolahkan orang tuanya di kota kemudian menjadi aktivis FPPMG. Sungguh mengagumkan, anak-anak petani yang dahulu dikatakan "bersimbah duka" tetapi kini mendampingi OTL di kampung atau desanya.

"Preman jadi Kawan"

Cerita tentang preman di kalangan anggota SPP cukup menarik untuk disimak. Keberadaan preman atau setidaknya mantan preman di kalangan anggota SPP juga berpengaruh terhadap proses identifikasi kelas mereka. Beberapa orang yang mendengar serba sedikit tentang SPP menganggap seperti, "organisasi ini banyak premannya". Keberadaan preman dalam cerita yang tidak utuh akan mempengaruhi identitas politik mereka dan lebih jauh adalah perjuangan kelas mereka.

Cerita pertama dimulai dari Agustiana. Beberapa nara sumber penelitian ini menyebutkan bahwa selama Agustiana di penjara, ia banyak bergaul dengan preman. Maksud perkataan preman disini adalah orang-orang tahanan, sementara di mata beberapa pihak para tahanan itu dicitrakan sebagai preman walaupun tidak seluruhnya benar karena banyak pula para tahanan itu yang bukan berasal dari kalangan preman.

Sopir mobil *land cruiser* tahun 1970-an milik YAPEMAS misalnya adalah kawan Agustiana selama di penjara. Ia di penjara bukan karena kejahatan preman melainkan karena secara tidak sengaja mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Sebelumnya ia adalah kusir delman di kota Garut. Tetapi karena kejadian itu, ia ditahan dipenjara dan dicitrakan sebagai preman.

Tabel Preman yang menjadi anggota SPP (mohon lihat di halaman belakang bagian ini)

Cerita yang lain misalnya, pada masa lalu sekitar tahun 1996, FPPMG dianggap bermusuhan dengan organisasi Pemuda Pancasila (PP). Kantor FPPMG yang berada di Jl. Ranggalawe, Gg. Rapih nomor 230 Garut waktu itu sempat diserang anggota PP.[2] Beberapa orang terluka dan barang-barang milik sekretariat FPPMG dirampas sebagian yang lainnya dirusak. Atas kejadian itu

pihak FPPMG melalui LBH Nusantara mengadukan ke kantor kepolisian setempat. Selang lima tahun kemudian seiring dengan membaiknya hubungan diantara mereka terutama karena banyak pula preman-preman di kampung yang bergabung dengan SPP, hubungan antara SPP dan PP menjadi baik. Digambarkan hubungan diantara mereka itu seperti *"SPP and The Gank"* yakni SPP dan para Satgas PP yang sudah akur dan mulai saling mendukung.

Di tingkat basis, cerita tentang preman ini sangat melegenda terutama di Dangiang. Cerita di Dangiang terutama karena kembalinya UT ke kampung Kiara Jangot setelah lama merantau. Selama di perantauan, yakni di Bogor, UT sengaja menantang ketua preman terminal bus Baranangsiang, Bogor. Setelah adu kekuatan fisik dan UT dinyatakan sebagai pemenangnya, maka ia menggantikan posisi ketua preman di terminal bus itu. Selama menjadi ketua preman, penghasilannya cukup banyak tetapi kehidupan preman telah menjerumuskannya ke dalam kehidupan yang kelam. Sampai pada suatu saat ia insaf dan kembali ke kampung untuk menikah. Keberadaannya di kampung cukup disegani dan pada sekitar tahun 1998 ketika petani di kampung Kiara Jangot ini bersengeketa dengan perkebunan, UT tampil menjadi "pahlawan". Menurut cerita yang beredar di kalangan anggota SPP, UT mempunyai kekuatan tenaga dalam yang hebat, ia bahkan bisa mencabut pohon teh milik perkebunan itu hanya dengan satu tangan.

Keberadaan UT membuat pihak perkebunan gentar. Pihak perkebunan kemudian menyewa preman-preman bayaran yang dipimpin oleh DL, salah seorang preman yang sebelumnya menguasai terminal bus Tanjung Priok. Di kampungnya di Garut, DL dikenal juga sebagai seorang jawara. Namun UT dengan ksatria menghadapinya dan akhirnya DL pun kalah. Ia bahkan kini bekerjasama dengan para anggota SPP di kampung Kiara Jangot untuk mendukung perjuangan mereka.[3]

Lain lagi cerita dari Cieceng. Selama masa perjuangan merebut

lahan, para petani desa Cieceng ini sering diteror oleh preman-preman bayaran dari Tasikmalaya. Sampai pada suatu saat merekapun kehilangan kesabaran, disusunlah suatu strategi menghadapi preman-preman bayaran ini yang dipimpin oleh TT, seorang yang mengaku pernah menjadi mantan pemuda jalanan di Tasikmalaya. Pada suatu hari preman-preman bayaran itu datang dengan menggunakan truk dan akan menyerbu para petani di desa Cieceng. Namun karena sudah dihadang, para preman bayaran ini bisa dipukul mundur. Sejak saat itu, preman-preman di sekitar kampungnyapun agak segan menghadapi petani-petani dari desa Cieceng ini.

Sebagaimana terlihat pada beberapa cerita diatas bahwa kehadiran preman-preman diantara kalangan petani anggota SPP ini telah meneguhkan perjuangan mereka. Di sisi lain kehadiran preman-preman ini juga memberi kesan tersendiri pada proses identifikasi politik mereka dan pada kenyataannya mantan-mantan preman telah menjadi bagian yang sangat intensif dalam perjuangan kelas. "Preman jadi kawan" barangkali merupakan ungkapan yang bisa digunakan untuk menggambarkan proses pembentukan identitas itu.

Hubungan Kekerabatan Baru

Pembentukan identitas baru SPP juga diwarnai oleh hubungan kawin-mawin diantara sesama aktivis. Hubungan kawin-mawin ini menciptakan keluarga di dalam SPP. Setidaknya terdapat enam pasangan aktivis dari organisasi pendukung SPP yang saling kawin-mawin. Diantara mereka itu adalah Agustiana yang menikah dengan RN yang keduanya berasal dari FPPMG. Agustiana sekarang menjadi sekjen SPP sedangkan RN mundur dari kegiatan aktivis karena pertimbangan mengurus rumah tangga. Walaupun demikian, ikatan dengan organisasi SPP tetap ada seperti ditunjukkan dengan beberapa anak petani SPP yang numpang di rumahnya.

Selain Agustiana adalah Ibang Lukmanudin yang menikah dengan Nissa Wargadipura, keduanya berasal dari FPPMG. Sekarang, Nissa menjadi direktur YAPEMAS sedangkan Ibang menjadi Deputi Umum SPP. Di dalam keluarga Nissa sendiri terdapat beberapa orang yang menjadi aktivis FPPMG seperti Indra Agustiani, adik kandung Nissa. Begitu juga dengan keluarga Nissa, di rumahnya juga menjadi tumpangan anak-anak dari kalangan petani SPP dan hubungan ini bahkan sudah seperti "anak angkat".

Tabel Aktivis yang menikah (mohon lihat halaman belakang bagian ini)

Warna baru kekeluargaan di dalam SPP ini semakin memperkuat tali persaudaraan diantara mereka. Hubungan di dalam organisasi tidak hanya didasarkan pada hubungan struktural dan fungsional melainkan juga dikarakteristikkan oleh hubungan-hubungan kekeluargaan. Sehingga dilihat dari segi organisasi, hubungan-hubungan perkawinan diantara sesama aktivis organisasi pendukung SPP ini berpengaruh pada ikatan angggota yang semakin kuat. Suasana organisasi bisa berkembang menjadi suasana kekeluargaan yang menyenangkan.

1) Nissa Wargadipura, t.t., tidak dipublikasikan.
2) Menurut Desmon J. Mahesa dari LBH Nusantara, peristiwa tersebut bermula dari rencana digelarnya acara debat public tentang PEMILU yang menghadirkan ketua presidium Komite Independen Pemantau PEMILU (KIPP), Goenawan Muhammad, dan ketua Komite Nasional Pemantau Pemilu (KNPP) yakni Efendi Saman. (nn., 10/05/1996)
3) Pada kasus DL itu telah terjadi transformasi dari "setan desa"= bandit desa ke identitas kelompok SPP. (Mengenai tujuh setan desa menurut D.N. Aidit itu antara lain lihat White, dalam Suhendar, dkk., 2004, 58). Hobsbawm (2000), menggambarkan kemungkinan besar kebanditan akan masuk ke dalam revolusi petani hanya sebagai satu aspek dari mobilisasi yang bermacam-macam, dan mengetahui dirinya hanya sebagai sebuah aspek yang subordinat, kecuali di dalam satu hal: menyediakan petempur dan pemimpin pertempuran (hlm. 106).

PREMAN YANG TERLIBAT DI DAN SIMPATISAN SPP PERIODE TAHUN 2002 - 2004

No.	Nama preman	Asal daerah	Peran Dalam Organisasi SPP	Aktivitas bantuan	Jenis Kasus
	GARUT				
	PP (pemuda Pancasila) sejak dipimpin oleh Endang Harlan tahun 1999 dan sekarang kepemimpinannya oleh Endang secara organisasi dekat dengan SPP, mereka tidak memberikan pernyataan dukungan tapi tidak pernah mengganggu SPP dan dalam setiap moment kegiatan mereka selalu datang dengan dukungan berupa kehadiran mereka dalam kegiata-kegiatan SPP. Orang-orang penting dalam PP dalam setiap pengajian rutin kadang-kadang memberikan materi pengajian dan yang paling sering adalah H. EH. Dan secara organisasi banyak anggota SPP mulai memasuki organisasi ini. Misalnya adalah para preman yang ada di Tasikmalaya yang ada di bawah ini.				
	TASIK				
1.	ID	Preman Sukadana	Satgas SPP Tanjung Karang	Tasikmalaya	Masyarakat lawan Perhutani
2.	AJ	Preman Sukadana	Satgas SPP Tanjung Karang	Tasikmalaya	Masyarakat lawan Perhutani
3.	SM	Preman Sukadana	Satgas SPP Tanjung Karang	Tasikmalaya	Masyarakat lawan Perhutani
4.	AG	Preman Sukadana	Satgas SPP Tanjung Karang	Tasikmalaya	Masyarakat lawan Perhutani
5.	US	Preman Sukadana	Satgas SPP Tanjung Karang	Tasikmalaya	Masyarakat lawan Perhutani
6.	YD	Preman Sukadana	Satgas SPP Tanjung Karang	Tasikmalaya	Masyarakat lawan Perhutani
7.	DT	Preman Sukadana	Satgas SPP Tanjung Karang	Tasikmalaya	Masyarakat lawan Perhutani
8.	AM	Preman Dokar	Simpatisan	Tasikmalaya	Masyarakat lawan Perkebunan
9.	BB	Gaza (gabungan anak jalanan)	Pelatih Satgas SPP OTL Cieceng	Tasikmalaya dan perhutani	Masyarakat lawan Perkebunan
	CIAMIS				
10.	MZ	Ciamis	Simpatisan	Ciamis	-

AKTIVIS YANG MENIKAH DALAM SPP: PERIODE TAHUN 1996 - 2004

No.	Nama Aktivis	Asal Organisasi	Peran Dalam Organisasi sekarang		Menikah
1.	Agustiana dengan RN	FPPMG	Agustiana adalah Sekjen SPP	Rina sebagai Ibu rumah tangga	1999
2.	Ibang Lukman Nurdin dengan Nisa Wargadipura	FPPMG	Ibang Lukman Nurdin adalah Deputi Umum SPP	Nisa adalah Direktur Eksekutif Yapemas	1996
3.	Yani Andre dan Ridwan Ince	FPPMG	Ridwan Ince di Unit sekolah SPP	Yani Andre sebagai Koord. Div. Penguatan OR	2004
4.	Muhendi dan Sugiarti	FPPMG	Muhendi di PDIP	Sugiarti sebagai Ibu rumah tangga	1999
5.	Mahmud Yunus dan Ima Mahmudah	FPPMG	Mahmud di KPP	Ima sebagai ibu rumah tangga	1999
6.	A. Ruli Ardiansyah dan Ani	FPPMG	Rull di FSPI	Ani sebagai ibu rumah tangga	1999

Bagian 7

Dukungan Kaum Terpelajar



Dukungan Kaum Terpelajar

Dalam berbagai kajian mengenai gerakan mahasiswa, kaum terpelajar terutama mahasiswa selalu ditempatkan sebagai aktor utama gerakan. Kajian-kajian seperti ini telah menghantarkan pada sebuah analisis baru tentang munculnya "kelas menengah" di perkotaan yang terutama dipelopori oleh kalangan mahasiswa di kampus-kampus. Pada bagian ini kaum terpelajar tidak akan ditempatkan sebagai aktor utama gerakan namun sebagai pendukung gerakan sosial. Gejala dukungan para mahasiswa terhadap gerakan sosial masyarakat bawah ini telah berlangsung sejak lama, setidaknya sejak ide-ide Karl Marx mengenai perjuangan kelas buruh diadopsi dalam gerakan mahasiswa di berbagai negara di belahan dunia seperti di Indonesia, Philipina, Korea Selatan, dan negara-negara Amerika Latin.

Salah satu pertanyaan yang selalu menarik untuk dikemukakan adalah, bukannya "seberapa besar dukungan itu telah diberikan?", melainkan "apakah alasan-alasan yang melatarbelakangi "kelas menengah" ini melakukan pemihakan terhadap "kelas bawah"?. Istilah yang muncul dalam perjuangan kelas seperti "bunuh diri kelas" misalnya, merupakan suatu bentuk meniadakan keberadaan status sosialnya. Pilihannya dijatuhkan untuk "membunuh" status sosial kelasnya dan melebur menjadi satu ber-

sama dengan "kelas bawah". Kontribusi perilaku "bunuh diri kelas" ini secara konseptual juga cukup penting terutama menyangkut kajian-kajian gerakan mahasiswa yang melahirkan analisis baru tentang keberadaan "kelas menengah" di perkotaan itu.

Pertentangan konseptual semacam ini bukannya tidak disadari karena sejak tahun 1980-an gerakan mahasiswa di Indonesia mulai terbelah ke dalam berbagai garis ideologi dan politik. Penolakan terhadap analisis baru itu terutama muncul dari kelompok "kiri" yang mengganggap kelas sosial itu hanya terdiri dari kelas borjuasi dan kelas buruh. Keberadaan "kelas menengah" dianggap telah mengaburkan arti perjuangan kelas buruh ini. Untuk menyatukan perjuangan dengan kelas bawah, maka kaum terpelajar harus meleburkan dirinya ke dalam kelas bawah atau berjuang bersama-sama dan seolah-olah menjadi kelas bawah. Namun demikian pada kenyataannya mereka tidak akan pernah menjadi kelas bawah yang sebenarnya selama atribut kaum terpelajar itu tetap melekat pada dirinya.

Terlepas dari perdebatan tentang keberadaan "kelas menengah" itu, bagian ini akan mencoba menjelaskan dukungan kaum terpelajar terhadap SPP. Dalam sejarah perkembangan SPP, dukungan kaum terpelajar ini tidak bisa dilepaskan. Sejak tahun 1988, pemihakan kaum terpelajar terhadap kaum tani sudah mulai ditunjukkan oleh para aktivis mahasiswa yang tergabung dalam KMP di Garut. Sampai sekarang kira-kira sudah selama 17 tahun, dukungan kaum terpelajar terhadap SPP ini masih terus mengalir dan bahkan semakin bertambah banyak.

"Bunuh Diri Kelas"

Tanpa bermaksud untuk membuka perdebatan lama diatas, istilah "bunuh diri kelas" digunakan dalam sub bagian ini untuk menjelaskan keterlibatan kaum terpelajar dalam gerakan SPP. Istilah ini digunakan semata-mata untuk menggambarkan aktivi-

tas para pemuda, mahasiswa, dan pelajar di Garut, Ciamis dan Tasikmalaya yang diluar kebiasaan aktivitas kelompok mereka pada umumnya. Secara jelas dapat dibedakan misalnya antara para aktivis-aktivis YAPEMAS, FPPMG, FPMR, dan FARMACI itu dengan kelompok-kelompok mahasiswa yang tetap berbasis di kampus-kampus. Perbedaannya cukup jelas bahwa aktivitas mereka mendampingi petani jauh berbeda dengan aktivitas kelompok-kelompok aktivis mahasiswa yang berbasis di kampus-kampus yang biasanya cukup dengan menyuarakan aspirasi kaum tani dari dalam kampus atau dari sebuah tempat di dalam kota. Sebaliknya, para aktivis pendukung SPP terjun langsung ke bawah mendampingi kasus-kasus sengketa tanah, terlibat dalam penyerangan-penyerangan, penataan lahan-lahan garapan, dan bersama-sama dengan para petani membangun sebuah organisasi tani yang kuat untuk terus-menerus memperjuangkan nasib nya.

Sebenarnya, aktivitas para aktivis organisasi pendukung SPP ini juga dilakukan oleh beberapa kalangan LSM terutama yang mengembangkan metode partisipasi, namun aktivitas mereka dipandang jauh lebih militan. Memang tidak terlalu tepat apabila organisasi-organisasi pendukung SPP itu disebut sebagai organisasi mahasiswa sebagaimana yang ada di kampus-kampus. Ketidaktepatannya bukan hanya dari segi aktivitas yang lebih partisipatif dan militan, tetapi juga dari segi keanggotaan yang mana melibatkan unsur pemuda bukan mahasiswa dan pelajar. Terkecuali YAPEMAS karena organisasi ini memang didirikan bukan sebagai organisasi mahasiswa tetapi sebagai LSM yang mempunyai payung hukum yayasan, walaupun tujuannya juga untuk memayungi gerakan para aktivis organisasi pendukung SPP ini.

Pernyataan lebih militan diatas ditunjukkan dari berbagai cerita pendampingan mereka. Untuk melakukan kerja-kerja pen-

dampingan mereka tidak dibayar. Seringkali mereka juga tidak diberi uang transportasi untuk pergi ke lokasi-lokasi dampingan. Jika mereka mempunyai uang, maka uang sendiri itu yang digunakan sebagai ongkos transportasinya pergi ke lokasi dampingan. Tetapi jika para aktivis ini benar-benar tidak mempunyai uang, mereka tetap akan berangkat dengan cara mencari-cari tumpangan kendaraan di jalanan yang menuju lokasi dampingan. Mereka juga tidak dibekali uang untuk makan selama hari-hari pendampingan. Para aktivis ini makan di rumah-rumah petani secara bergantian. Mereka makan apa yang hari itu petani makan, tetapi jika petani sedang tidak makan maka merekapun tidak makan. Untuk ongkos transportasi pulang, biasanya mereka dibayari petani dari uang kas OTL.

Beberapa aktivis organisasi pendukung SPP yang menjadi pendamping OTL

Nama	Lokasi dampingan
YAPEMAS	
Indra Agustiani	OTL Sarimukti
Yani Andre	OTL Cilawu
Agus	OTL Sukatani
Nisa Wargadipura dan Ibang Lukmanudin	OTL untuk semua wilayah SPP
FPPMG	
Harafat	OTL Cisompet
Dadan	OTL Cilawu
Ujang	OTL Kincir
Atet	OTL Kadungura
Cencen	OTL Cibalong
Husni	OTL Bungbulang
Ai'	OTL Cisurupan
Asep	OTL Bungbulang
Irna	OTL Luwipari
FPMR	
Erni	OTL Nagrog
Helmi	OTL Cigalontang
Herdi	OTL Cieceng
Mumu	OTL Neglasari
Andi	OTL Cikanyere
FARMACI	
Tidak ada yang menjadi pendamping OTL karena semua pendamping OTL langsung diketuai oleh petani setempat.	

"... kelaparan, penindasan, intimidasi, jalan kaki ke lokasi yang harus ditempuh, kedinginan, fitnahan, cacian, makian, kurang tidur, bahkan diisolasi oleh pihak-pihak yang menjadi penyanggah penguasa dan bentuk-bentuk lain baik dari pihak militer, sipil ataupun dari organIsiasi yang mengatasnamakan rakyat ....." (Lukmanudin, t.t., 6)

Berbeda dengan para aktivis FPPMG yang banyak berasal dari basis. Mereka ini adalah anak-anak petani SPP yang disekolahkan ke kota Garut. Pada umumnya, mereka sekolah di Garut sejak tingkat SLTA. Oleh orang tuanya yakni para petani SPP itu, mereka dititipkan di sekretariat FPPMG dan sekaligus menjadi anggota FPPMG sejak pelajar tinggkat SLTA dan kemudian dilanjutkan pada masa kuliah.

Di dalam organisasi FPPMG, sebagaimana terlihat pada tabel diatas, nama-nama aktivis seperti Dadan, Ujang, Atet, Cencen, Husni, Ai' (perempuan), Asep, dan Irna (perempuan) diberi tugas menjadi pendamping OTL. Mereka ada yang menjadi pendamping OTL di kampungnya sendiri. Hal ini memudahkan mereka untuk melakukan pendampingan selain setiap kali mereka melakukan pendampingan di kampungnya, mereka juga pulang ke rumah untuk memperoleh uang saku dari orang-tuanya.

Di sekretariat, uang saku yang ia peroleh dari orang tua tidak digunakan sendiri secara individual. Selain untuk kebutuhan sendiri, uang saku itu juga disisakan untuk membantu kegiatan-kegiatan organisasi seperti misalnya untuk menambah uang sewa sekretariat dan membayar fasilitas listrik setiap bulannya. Tetapi yang paling sering adalah digunakan untuk memfasilitasi kerja-kerja pendampingan di lapangan.

"... dana yang diperlukan untuk melakukan pendampingan dan pemberdayaan, FPPMG selalu melakukan bentuk swadaya antara para aktivis, sumbangan pribadi yang

kadang menjual pakaian, arloji, menggadaikan sepatu, jaket, menjual kertas, mencari orang yang akan memberikan zakat, menjual selebaran, kliping koran, buletin, buku, sumbangan petani, aktivis LSM, dan pers (Lukmanudin, t.t., 6)

Selain berasal dari sumber pribadi, keuangan FPPMG juga diperoleh dari pembuatan poster atau spanduk untuk keperluan aksi-aksi massa petani. Untuk wilayah Garut, kegiatan aksi massa petani khususnya dalam pembuatan poster dan spanduknya selalu diserahkan para aktivis FPPMG. Dari ongkos yang diberikan biasanya terdapat kelebihan sehingga bisa digunakan untuk membayar listrik setiap bulannya dan membeli barang-barang keperluan sehari-hari, seperti minyak tanah untuk memasak.

Tabel Aktivis yang berasal dari basis SPP (mohon lihat halaman belakang bagian ini)

Hampir sama dengan para aktivis FPPMG, para aktivis FPMR juga melakukan hal yang sama untuk melakukan pendampingan di tingkat OTL. Perbedaannya, apabila para aktivis FPPMG banyak yang berasal dari basis maka para aktivis FPMR banyak yang berasal dari luar basis. Mereka tidak mempunyai ikatan batin dengan kampung-kampung yang didampinginya karena mereka memang bukan berasal dari kampung-kampung yang ada kasus sengketa tanahnya ini. Ikatan mereka sebenarnya jauh lebih longgar jika dibandingkan dengan para aktivis FPPMG yang jelas-jelas mereka berasal dari anak-anak petani yang mana orang tuanya berjuang merebut lahan untuk menyekolahkan mereka.

Para aktvis FPMR seperti Erni adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Garut (STHG) yang berasal dari Sukabumi, namun ia kini menjadi pendamping OTL Nagrog. Selain Erni yang juga merupakan koordinator FPMR, ada Helmi mahasiswa STISIP yang berasal dari Tasikmalaya yang menjadi pendamping OTL Cigalontang;

Herdi mahasiswa STHG yang berasal dari Cikalong yang menjadi pendamping OTL Cieceng; Mumu mahasiswa STISIP yang berasal dari Cieceng yang menjadi pendamping OTL di Neglasari; dan Andi mahasiswa STISIP yang berasal dari Tasikmalaya yang menjadi pendamping OTL di Cikanyere. Para mahasiswa ini dikuliahkan oleh orang tuanya di Tasikmalaya tetapi kemudian mereka juga memilih menjadi aktivis FPMR.

Demikian pula dengan para aktivis FARMACI seperti Agus mahasiswa UNIGAL, Jack mahasiswa UNIGAL, Asep mahasiswa UNIGAL, Yoga yang berasal dari Tasikmalaya, dan Surahmat yang berasal dari Majalengka. Mereka adalah para mahasiswa yang berasal dari luar basis tetapi memiliki militansi yang tinggi dalam perjuangan SPP. Sebagaimana FPPMG dan FPMR, di sekretariat FARMACI juga tidak ada pengelolaan dana bersama. Dana yang digunakan untuk kerja-kerja SPP berasal dari uang saku masing-masing atau dari OTL. Untuk kegiatan bersama mereka biasanya melakukan iuran, selain menyisihkan bantuan dana dari YAPE-MAS. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari mereka berhutang di warung makan.

Sekolah SPP

Terdapat dua sekolah SPP yakni Institut Keguruan Rakyat (IKR) dan MTs Assururon. Apabila IKR didirikan untuk pendidikan reforma agraria bagi para aktivis organisasi pendukung SPP maupun kalangan petani SPP, maka MTs Assururon diperuntukkan bagi anak-anak petani yang kurang mampu menyekolahkan anaknya ke jenjang setingkat SLTP.

MTs Assururon ini didirikan di desa Sarimukti, Garut yang merupakan salah satu lokasi basis SPP. Anak-anak yang mengikuti pendidikan di MTs Assururon ini berasal dari berbagai tempat. Mereka semuanya berasal dari basis atau lokasi kasus sengketa tanah. Jumlah siswa MTs Assururon ini mencapai 36 orang

yang terdiri dari 18 anak laki-laki dan 18 anak perempuan.

Tabel Daftar murid MTs Assururon (mohon lihat halaman belakang bagian ini)

Sedangkan jumlah guru ada 18 orang yang umumnya berasal dari kalangan aktivis organisasi pendukung SPP, kecuali kepala sekolah yakni Ustazd Aang Mukhsan yang merupakan kyai yang cukup disegani di desa Sarimukti. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan bagi guru tamu mengajar di MTs Assururon ini. Guru tamu biasanya berasal dari para aktivis petani dari berbagai kota yang kebetulan berada di Garut dan bisa mengajar apa saja yang ia kuasai seperti otonomi daerah, politik agraria, pemerintahan desa, dan sebagainya.

Tabel Daftar guru MTs Assururon (mohon lihat halaman belakang bagian ini)

MTs Assururon bisa dikatakan sebagai wahana pendidikan alternatif terutama karena selain kurikulum yang diajarkan mengacu pada kurikulum resmi, anak-anak didik di MTs Assururon ini mendapatkan tambahan ilmu langsung dari lingkungan aktivis dan petani SPP. Pada usia belianya, mereka sangat kritis menyikapi suatu masalah sosial disekelilingnya. Mereka pandai berpidato layaknya pidato politik seorang aktivis gerakan dan kelebihannya yang lain juga terlihat pada kelihaiannya membuat sisindiran atau semacam pantun bersautan yang dimainkan di atas pentas. Kata-kata yang digunakan di dalam sisindiran itu sangat kritis yang mencerminkan realitas sosial di sekitarnya.

Sisindiran yang dibuat oleh anak kelas 2 MTs Assururon,

** Beribu-ribu rasa buah*
tapi tidak ada yang di sukai (Keritik Pemerintah) (Deni)
Beribu – ribu pemerintah
tapi banyak yang korupsi
** Buat apa ada tong sampah*
kalau hanya di isi alpukat (KP) (Irman)
Buat apa jadi pemerintah
Kalau tidak mikiran rakyat
** Buat apa ada rambutan*
kalau tidak berwarna merah (KP) (Irman)
Buat apa ada kedaulatan
Kalau rakyat masih di jajah
** Buat apa tanam padi*
kalau tidak makan beras (petani) (Hendrayani)
Buat apa kita jadi petani
Kalau tanah kita terus dirampas
** Buat apa makan cokelat*
kalau tidak cokelat yang manis (P) (yasa)
Buat apa jadi rakyat
Kalau rakyat masih mengemis
** keur naon boga kalapa*
lamun masih di makan kera (P) (Yasa)
Keur naon urang merdeka
Lamun pemerintah masih berkuasa
** Aya tangkal boga getah*
getah eta di golakeun jeung minyak (P) (Euis M)
Lamun urang boga tanah
Urang bisa nyakolakeun anak
** Buat apa makan arben*
kalau tidak dengan cokelat (KP) (Ojon)
buat apa jadi presiden
kalau tidak ingat rakyat

** Eker naon ngadahar petis ketimun*
lamun henteu make cikur (P) (Iip)
Lamun rakyat boga garapan
Desa bisa makmur
** Buah mangga tali kelapa*
minyak tanah didreuman (P) (Siti Aminah)
Bagja teuing kuring sakulawarga
boga tanah digarap babarengan
** Keur naon boga cokelat*
lamun masi ngadahar buah (P) (Siti Aminah)
Keur naon jadi rakyat
Lamun masih keneh lemah
** Abdi bagja boga tanah*
hanjakal make gula (P) (Siti Aminah)
Abdi bagja boga tanah
Ngarah budak bisa sakola
** Jangan mimpi punya alpukat*
kalau hanya di bikin keramat (KP) (Agus)
Jangan mimpi jadi pejabat
Kalau hanya menyengsarain rakyat
** Jangan ingin beli baju*
kalau hanya ingin berburu (P) (Iip)
Jangan mimpi untuk maju
Kalau rakyat belum bersatu
** Dimana keramat jeung jamur*
klau sampah masih di jemur (KP) (Agus)
Gimana rakyat bisa makmur
Kalau pemerintah masih tidur
** Buat apa jual minyak tanah*
kalau tidak bisa jual mangga (P) (Euis M)
Buat apa kita punya tanah
kalau kita tidak bahagia

** Keur naon ngadahar buah*
lamun ososk ngadahar alpuket (KP) (Herawati)
Keur naon jadi pemerintah
Lamun osok ngarampas tanah rakyat
** Hayang teuing boga damar*
hanyakal teu boga minyak tanah (KP) (Herawati)
Hayang teuing boga tanah 200 hektar
hanyakal dicokot ku pemerintah
** Ekeur naon beli samangaka*
lamun henteu meli tomat (KP) (Reza Imut)
Keur naon jadi penguasa
Lamun henteu mikirkeun rakyat
** Keur naon ngadahar buah*
lamun ngadahar strobery (KP) (Reza Imut)
Keur naon jadi pemerintah
kalau jadi tukang korupsi
** Aku ingin punya rumah*
yang bebas dari sampah (P) (Iip)
Aku ingin punya tanah
Yang bebas dari pemerintah
** Hayang teuing boga alpuket*
anu bebas tina getah (P) (Komar)
Hayang teuing jadi rakyat
anu bebas ti pamarentah
** keur naon ngala cai*
lamun eta cai kiruh (P) (Komar)
Keur naon jadi petani
lamun teu boga tanah
** Hayang teuing boga nangka*
lamun hese ngalana (KP) (Sata Euis Farida)
Hayang teuing boga penguasa
anu nyaah karakyatna

** Keur naon meli kueh*
lamun ukur make coklat (KP) (Sata Euis Farida)
Keur naon jadi pamarentah
lamun ukur nindas rakyat
** Abdi hoyong rujak buah*
tapi ulah anu atah (Euis M)
Abdi hoyong gaduh tanah
tapi ulah ku pemerintah
** Abdi hoyong makan tomat*
anu bebas tina kuman (P) (Hendrayani)
Abdi hoyong jadi rakyat
anu bebas tina hukuman
** Buat apa jadi buah*
kalau jadi nanas
Buat apa jadi pemerintah
Kalau jadi penindas

Anak kelas 1 Mts As-sururron

** Hayang teuing ngadahar nangka*
ejeung kentang (C) (Samrizal)
Hayang teuing sakola
menjadi pejuang
** Keur naon ngadahar nangka*
lamun tara nyikat ku pepsoden (C) (Samrizal)
Hayang teuing jadi budak sakola
ngarah jadi presiden
** Hayang teuing ngadahar mangga*
anu dihijikeun jeung stroberry (C) (Mufti)
hayang teuing sakola
meh jadi pejung sejati

* *Buat apa beli jambu*
  kalau tidak jadi batu (KG) (Duloh)
  Buat apa jadi guru
  kalau tidak tepa waktu
* *Hayang teuing boga buah nangka*
  hanjakal nangkana laleutik (Masalah) (Nina)
  Hayang teuing jadi budak sakola
  hanjakal teu boga duit
* *Buat apa makan buah*
  kalau tidak punya kaca (Proses) (Pupu)
  Buat apa jadi anak seklah
  Kalau tidak bisa baca
* *Keur naon ngadahar duku*
  lamun teu ngadahar kentang (KG) (Ahmad Taufik Hidayat)
  Keur naon jadi guru
  Lamun tara datang
* *Hayang teuing boga biola*
  biola warnaana coklat (C) (Didih)
  Hayang teuing jadi budak sakola
  Budak sakola an getol sholat
* *Ekeur naon ngadahar jamu*
  lamun teu ngadahar cau (KG) (Nubih)
  Keur naon jadi guru
  lamun henteu malulu
* *Ekeur naon ngadahar buah duku*
  lamun henteu ngadahar samangka (KG) (Nubih)
  Ekeur naon jadi guru
  lamun tara sakola
* *Keur naon ngadahar nangka*
  lamun teu ngarujak nangka (Proses) (Pupu)
  Keur naon sakola
  lamun teu bisa matematika

** Buat apa kita beli buah*
kalau tiadak bisa dibawa (C) (Mukhsan)
Buat apa kita sekolah
kalau tidak berjasa
** Buat apa beli kola – kola*
kalau hanya untuk dilempar (Masalah) (Nina)
Buat apa kita sekilah
kalauhanay mencari pacar
** Buat apa beli kola – kola*
kalau tidak punya angsa (C) (Mukhsan)
Buat apa kita seklah
kalau tida k menjadi penerus bangsa
** Keur naon ngadahar anggur*
mening oge ngadahar nangka (Ngajak) (Pupu)
Ekeur naon urang nganggur
mening oge urang sakola
** Keur naon ngadahar jamu*
lamun henteu ngadahar ganas (KG) (Ahmad Taufik Hidayat)
Keur naon jadi guru
lamun males
** Keur naon ngadahar jamu*
lamun henteu ngadahar anggur (KG) (Azid)
Keur naon jadi guru
lamun pagawean nganggur
** Keur naon ngadahar jamu*
lamun teu boga balimbing (KG) (Azid)
Ekeur naon jadi guru
lamun enteu bisa ngabimbing
** Hayang teing ngadahar nangka*
anu jadina diluhur (C) (Mufti)
Hayang teuing sakola
ameh jadi gibernur

** Buat apa makan buah*
kalau tidak maka buah es lemon (H) (Duloh)
Buat apa kita sekolah di Mts
kalau tidak seindah di Mts as-sururron
** Kudu daek tumpak kuda*
sabab tumpak raos karasana (C) (Didih)
Kudu daek jadi budak sakola
Sabab budak penerus bnagsa
** Hayang teing ngarujak mangga*
tapi hese ngalana (Masalah) (Rani)
Hayang teuing jadi budak sakola
tapi teu boga biyayana
** Keur naon ngopi kalapa*
lamun dibelahna ku kaca (Masalah) (Rani)
Keur naon jadi pamuda
lamun henteu bisa maca
** Keur naon ngopi nangka*
lamun henteu nginum panta (Masalah) (Nina Sulastri)
Keur naon jadi budak sakola
lamun hayang main cinta

Penulis: Reza Imut
Dicutat: 27 – 08 – 2004

DAFTAR GURU MTs ASSURURON

No.	Nama/Tempat, Tanggal Lahir	L/P	Jabatan	Pendidikan			Mengajar		Kelas	Tahun Kerja	
				Tingkat	Jurusan	Tahun	Agama	Umum		Tahun	Bulan
1	Ust Aang Mukhsan, Garut	L	Kepsek				*		1	2003	Juli
2	Ir. Boy Fidro, Padang	L	Guru	S-1	Fisika- ITB	1989	-	*	1	2003	Juli
3	Dayat Suhendar,S.Ag., Garut	L	Guru	S-1			*	-	1	2003	Juli
4	Indra Agustiani, S.Sos., Garut	P	Guru	S-1	Kes.Sosial STISIP	1997	-	*	1	2003	Juli
5	Ir. Ikbang Lukman Nurdin ,S. Ag., Garut	L	Guru	S-1	Arsitek STTG	2002	-	*	1	2003	Juli
6	Herlina Dewi, S,Eko, Sumedang	P	Guru	S-1	Eko&Akunt. UNSIL	2002	-	*	1	2003	Juli
7	S. Maulana Rahayu, S.Pd, Ciamis	L	Guru	S-1	Pend. Sejarah UNIGAL	2003	-	*	1	2003	Juli
8	Saeful Millah, S.Pd., Ciamis	L	Guru	S-1	Pend. Biologi UNIGAL	2003	*	*	1	2003	Juli
9	Ai Nanan Hanadayani, Ciamis	P	Guru	D-2	Farmasi	2002	-	*	1	2003	Juli
10	Syahdi Sutisna, S.Pd., Ciamis	L	Guru	S-1	Pend.B.Inggris UNIGAL	2003	-	*	1	2003	Juli
11	Ridwan Saefudin, Garut	L	Guru	SMU		1990	-	*	1	2003	Juli
12	Ahmad Zaenul	L	Guru/TU	SMU			*	-	1	2003	Juli
13	Agus Suherman, Garut	L	Guru	SMU			-	*	1	2003	Juli

AKTIVIS YANG BERASAL DARI BASIS SPP PERIODE TAHUN 1996 - 2004

No.	Nama Aktivis	Tanggal Lahir	Organisasi	Peran Dalam Organisasi	Nama Orangtua	Jenis Kasus	Sekolah
1	TN	24 Juli 1986	FPPMG (Forum Pemuda Pelajar Mahasiswa Garut)	C0 dan di divisi informasi dan dokumentasi	ED	Manipulasi sertifikasi di Desa Jangkurang di Garut	SPP - SPMA Kelas 3
2	DK	23 Juli 1983	FPPMG (Forum Pemuda Pelajar Mahasiswa Garut)	Co dan di div. pendidikan	UR	Kasus Masyarakat Vs Perhutani di Desa Sagara di Garut	STTG semester 6
3	AS	1983	FPPMG (Forum Pemuda Pelajar Mahasiswa Garut)	Co dan di divisi pengorganisasian	IM	Kasus perkebunan Rancahayam dan Poliandri di Garut	STH semester 4
4	ID	1982	FPPMG (Forum Pemuda Pelajar Mahasiswa Garut)	Co di divisi Propaganda	ES	Kasus Masyarakat Vs Perhutani di Desa Sagara di Garut	Sekolah Tinggi Desain Winaya Bangsa semester 4
5	UR	1983	FPPMG (Forum Pemuda Pelajar Mahasiswa Garut)	Co dan di Divisi Pendidikan	AD	Kasus perkebunan Rancahayam Garut	Faperta Universitas Garut semester 4
6	AM	20 September 1983	FPMR (Forum Pemuda dan mahasiswa untuk Rakyat) Tasikmalaya	Co dan Div. Eksternal	MM	Kasus Perkebunan di Cieceng Tasikmalaya	STISIP semester 4
7	HM	18 Juli 1980	FPMR (Forum Pemuda dan mahasiswa untuk Rakyat) Tasikmalaya	Co dan Div. Pendidikan	SR	Kasus Cidadap di Tasikmalaya	STISIP

DAFTAR MURID MTS AS-SURURON SARIMUKTI GARUT SEBAGAI SALAH SATU SEKOLAH UNIT SEKOLAH SPP
Periode tahun 2003-2004

No.	Nama Murid	Jenis Kelamin	Asal Daerah	Nama Orangtua	Jenis Kasus
1	Ade jalaludin	Laki-laki	Sarimukti	H. Sambas	Masyarakat Vs Perhutani
2	A. Fatah	Laki-laki	Sarimukti	Juhara	Masyarakat Vs Perhutani
3	A. Sehabudin	Laki-laki	Sarimukti	Undang	Masyarakat Vs Perhutani
4	Aang Rohman	Laki-laki	Sarimukti	Oyih	Masyarakat Vs Perhutani
5	Agus Dudih	Laki-laki	Sarimukti	Koko	Masyarakat Vs Perhutani
6	Ai Dewi Sadiah	Perempuan	Sarimukti	Nenah	Masyarakat Vs Perhutani
7	Ai Nurjanah	Perempuan	Sarimukti	Ust. Ade	Masyarakat Vs Perhutani
8	Ai Zenab	Perempuan	Sarimukti	Aab	Masyarakat Vs Perhutani
9	Asep	Laki-laki	Sarimukti	Ust. Juju	Masyarakat Vs Perhutani
10	Dedah Jubaedah	Perempuan	Sarimukti	Maman	Masyarakat Vs Perhutani
11	Deni	Laki-laki	Sarimukti	Bandi	Masyarakat Vs Perhutani
12	Euis Maesaroh	Perempuan	Desa Sagara Cibalong	Usup	Masyarakat Vs Perhutani
13	Hamid	Laki-laki	Sarimukti	Solihin	Masyarakat Vs Perhutani
14	Haris	Laki-laki	Sarimukti	Ukas (alm)	Masyarakat Vs Perhutani
15	Hendrayani	Perempuan	Desa tegallega Bungbulang	Dadan	Masyarakat Vs Perkebunan PT Condong
16	Herawati	Perempuan	Desa tegallega Bungbulang	Supyadin	Masyarakat Vs Perkebunan PT Condong
17	Iip	Laki-laki	Sarimukti	Ahmad	Masyarakat Vs Perhutani
18	Irman	Laki-laki	Desa Sagara Cibalong	Tarman	Masyarakat Vs Perhutani
19	Jamaludin	Laki-laki	Sarimukti	Uhas	Masyarakat Vs Perhutani
20	Muslim Tamimi	Laki-laki	Sarimukti	Ade	Masyarakat Vs Perhutani
21	Rida Farida	Laki-laki	Desa Sagara Cibalong	Apud	Masyarakat Vs Perhutani
22	Rini Nuraini	Perempuan	Sarimukti	Ade Dana	Masyarakat Vs Perhutani
23	Rohman	Laki-laki	Sarimukti	Hamdan	Masyarakat Vs Perhutani
24	Rosmawati	Perempuan	Sarimukti		Masyarakat Vs Perhutani
25	Saepulah	Laki-laki	Sarimukti	Nandang	Masyarakat Vs Perhutani
26	Sahanah	Perempuan	Sarimukti	Aan	Masyarakat Vs Perhutani
27	Sata Euis Farida	Perempuan	Desa Tegallega Bungbulang	Rukman	Masyarakat Vs Perkebunan PT Condong
28	Siti Aminah	Perempuan	Sarimukti	H. Sudrajat	Masyarakat Vs Perhutani
29	Siti Halimah	Perempuan	Sarimukti	Aap	Masyarakat Vs Perhutani
30	Siti Komara	Perempuan	Sarimukti	Muksin	Masyarakat Vs Perhutani
31	Siti Rohmah	Perempuan	Sarimukti	Rohmah	Masyarakat Vs Perhutani
32	Sohib	Laki-laki	Sarimukti	Dadan	Masyarakat Vs Perhutani
33	Sopiah	Perempuan	Sarimukti	H. Sambas	Masyarakat Vs Perhutani
34	Wiwin Yulianti	Perempuan	Sarimukti	Undang	Masyarakat Vs Perhutani
35	Yasa	Laki-laki	Sarimukti	Hari	Masyarakat Vs Perhutani
36	Yulia	Perempuan	Sarimukti	Oji	Masyarakat Vs Perhutani

Bagian 8

Refleksi



Refleksi

Jumlah Massa dan Kapasitas Internal Gerakan

Bagaimanapun harus diakui bahwa dalam kurun waktu dua tahun pertama yakni antara tahun 2000-2002 jumlah massa SPP seperti sedang mengalami "lompatan kuantum". Dalam kurun waktu dua tahun pertama sejak dideklarasikan itu jumlah anggota SPP tercatat sebanyak 700 ribu orang. Sejumlah massa yang luar biasa yang bahkan mungkin tidak terjadi di "tubuh partai politik" yang baru dibentuk. Dari jumlah massa sebesar itu, dinyatakan pula bahwa 300 ribu orang diantaranya telah memiliki kartu anggota SPP.[1]

Dua tahun kemudian yakni tahun 2004, Dianto Bachriadi mencoba melakukan perhitungan melalui metode sensus yang berarti menghitung setiap OTL dan setiap anggota OTL di tiga kabupaten itu. Berapa jumlah massa yang terhitung setelah sensus? Diluar dugaan, sangat mengejutkan. Data sementara yang diolah dari hasil sensus itu menunjukkan angka yang jauh dari perkiraan sebelumnya. Jumlah anggota SPP terhitung sebanyak 25.770 orang, bukan 300 ribu orang lagi. Dua tahun berselang seperti telah terjadi "lompatan kuantum" kembali, tetapi sekarang "lompatan kuantum" ke arah yang sebaliknya.

Apakah yang sebenarnya sedang terjadi di kalangan anggota

SPP? Benarkan grafik dua tahun pertama itu melonjak sedemikian drastisnya dan dua tahun kedua kemudian anjlok secara drastis pula? Apabila benar, kemungkinan gejala pada dua tahun pertama itu lebih merupakan euforia *"reclaiming"* yang memanfaatkan situasi reformasi ke dalam sebuah arti "kebebasan".[2] Selain itu ideologi UUPA nomor 5 tahun 1960 yang selalu menjadi dasar *"reclaiming"* setiap anggota SPP juga telah mendoktrinasi ideologi massa melalui wacana "tanah untuk rakyat". Sedangkan gejala pada dua tahun kedua kemungkinan adalah "hilangnya" sejumlah besar massa anggota SPP itu karena lemahnya pemeliharaan terhadap gerakan *("reclaiming")* ini.

Sebagai sebuah refleksi mungkin harus diakui bahwa lonjakan jumlah anggota SPP yang drastis itu tidak diikuti dengan penataan kapasitas internal dalam melayani gerakan. Para aktivis yang berasal dari organisasi pendukung sedikit kewalahan dengan lonjakan kasus-kasus sengketa tanah di Tatar Pasundan selama masa reformasi itu. Hal ini juga disinggung pada bagian ketiga buku ini, dimana hampir setiap aktivis itu memikul beban yang terlalu berat *(overload)* karena duplikasi kepengurusan di YAPEMAS dan di kesekretariatan SPP. Dengan kata lain, lonjakan jumlah anggota SPP itu tidak sebanding dengan kapasitas internal gerakan sehingga setiap beban yang bertambah di dalam SPP dibagi secara merata kepada setiap aktivis pendukungnya.

Hal ini antara lain juga diperkuat dengan sistem rekruitmen kepengurusan di tubuh YAPEMAS. Pihak YAPEMAS membatasi jumlah aktivisnya dengan hanya menerima pengurus baru dari kalangan FPPMG, FPMR, atau FARMACI.[3] Batasan inipun masih dilakukan dengan cara yang sangat ketat; antara lain dilihat dari kesungguhan perjuangannya selama mendampingi kasus-kasus sengketa tanah di tingkat OTL. Dengan cara ini maka tertutup kemungkinan bagi orang lain diluar organisasi pendukung itu untuk menjadi pengurus YAPEMAS dan sebaliknya para aktivis ini harus menghadapi kenyataan

bahwa pada kenyataannya regenerasi di dalam organisasi-organisasi pendukung itu tidak bisa dilakukan secara cepat.

Beban di dalam manajemen organisasi seperti ini yang kemungkinan telah menyebabkan anjloknya anggota SPP dari 300 ribu orang pada tahun 2002 itu menjadi 25.770 orang pada tahun 2004. Hal ini dimungkinkaan jika banyak kasus-kasus sengketa tanah yang tidak dikelola dengan baik kemudian hilang. Kemungkinan lain juga sangat mungkin terjadi pada pemeliharaan OTL-OTL yang kurang baik karena kapasitas manajerial di dalam strategi pengorganisasian selanjutnya yang cenderung *mandeg,* terutama setelah aksi *"reclaiming"* dan penataan kembali lahan-lahan garapan.

Contoh yang cukup menyolok terjadi pada OTL Sagara. Di mata beberapa pihak, Sagara adalah kasus OTL yang sukses. Kasusnya telah dianggap selesai dengan kemenangan di tangan kaum tani dan telah dilakukan penataan lahan-lahan garapan dengan pembagiar rata-rata untuk setiap anggota seluas 1 Ha. Tetapi apa yang terjac beberapa tahun setelah kemenangannya itu? Pada "Lembar Pertanyaan Evaluasi OTL SPP" yang diedarkan oleh kesekretariatan SPP sekitar tahun 2004 menunjukkan bahwa OTL Sagara mempunyai kecenderungan *mandeg.* Selain mungkin ikatan moral antara petani Sagara dengan para aktivis organisasi pendukung yang masih menjaga hubungan diantara mereka sampai sekarang, mungkin tidak ada lagi yang dijadikan dasar kelangsungan hubungan keorganisasian. Antiklimak merupakan salah satu kemungkinan buruk yang sedang terjadi pada OTL Sagara.

Berdasarkan lembar evaluasi itu, dari segi organisasi, OTL Sagara cenderung *mandeg.* Beberapa pertanyaan yang diajukan berkenaan dengan organisasi antara lain perkembangan OTL, fluktuasi jumlah anggota, kegiatan 6 bulan terakhir, iuran dan keswadayaan anggota, dan fungsi sekretariat umumnya menunjukkan respon yang kurang berkembang seperti tampak pada tabel di bawah ini.

Lembar Evaluasi tentang Organisasi pada OTL Sagara, 2004

Evaluasi organisasi	Jawaban pada lembar evaluasi	Tafsiran
Bagaimana perkembangan OTL?	Tidak ada perkembangan	Stagnan
Apakah ada penambahan atau penurunan anggota?	Tidak ada penambahan atau penurunan anggota	Stagnan
Kegiatan 6 bulan ke belakang?	"pembukaan lahan"	Seharusnya sudah memasuki tahap penataan produksi dan pasar
Iuran dan keswadayaan?	Tidak jalan	Stagnan
Sekretariat?	Belum ada sekretariat, masih numpang di rumah anggota	Cenderung stagnan

Sebagaimana diketahui, Sagara adalah kasus yang paling awal ditangani oleh para aktivis FPPMG yakni sejak tahun 1989. Sampai dengan lembar evaluasi itu dibagikan yakni pada tahun 2004, kira-kira usia pendampingan di OTL itu sudah berumur 15 tahun. Pada pertanyaan tentang "kondisi umum ekonomi anggota OTL Sagara" terutama yang menyangkut perubahan sebelum dan sesudah menguasai lahan dijawab "minim". Dari segi ekonomi juga tidak ada usaha tambahan untuk meningkatkan pendapatan rumah-tangga. Bahkan pada pertanyaan tentang "produksi" dinyatakan bahwa, "penataan produksi belum dilakukan".

Lembar Evaluasi tentang Organisasi pada OTL Lainnya, 2004

OTL	Pertanyaan tentang organisasi	Jawaban pada lembar evaluasi
Benjang, Cisompet, Garut	- Bagaimana perkembangan OTL?	- Ada kemunduran dalam persatuan, 75% tidak kompak
	- Apakah ada penambahan dan pengurangan jumlah anggota?	- Tidak ada
	- Iuran dan keswadayaan	- Iuran wajib anggota belum berjalan
	- Sekretariat?	- Belum ada
Cikeuyeup, Cisompet, Garut	- Bagaimana perkembangan OTL?	- Keadaan OTL stabil
	- Apakah ada penambahan dan pengurangan jumlah anggota?	- (Tidak dijawab)
	- Iuran dan keswadayaan	- Iuran 2 minggu sekali saat panen pisangg
	- Sekretariat?	- Belum ada

Dangiang, Garut	- Bagaimana perkembangan OTL? - Apakah ada penambahan dan pengurangan jumlah anggota? - Iuran dan keswadayaan - Sekretariat?	- Ada kemajuan - Ada penambahan sekitar 40 kk - Iuran rutin dari penggalangan pisang tidak berjalan karena adanya kecenburuan anggota terhadap pengurus - Sudah ada
Banjar Anyar II, Ciamis	- Bagaimana perkembangan OTL? - Apakah ada penambahan dan pengurangan jumlah anggota? - Iuran dan keswadayaan - Sekretariat?	- Perkembangan tetap - Tidak ada - Iuran OTL belum lancar - Belum punya kantor
Kalijati, Ciamis	- Bagaimana perkembangan OTL? - Apakah ada penambahan dan pengurangan jumlah anggota? - Iuran dan keswadayaan - Sekretariat?	- Jalan ditempat - Tidak ada penambahan - Iuran berjalan Rp1000/bln - Sekretariat ada tapi dibakar orang
Bojong, Ciamis	- Bagaimana perkembangan OTL? - Apakah ada penambahan dan pengurangan jumlah anggota? - Iuran dan keswadayaan - Sekretariat?	- Kurang aktif - Tidak ada penambahan - Iuran anggota sebagian jalan sebagian tidak - Sudah mempunyai sekretariat yang dibangun dengan cara gotong-royong
Nagrog, Tasikmalaya	- Bagaimana perkembangan OTL? - Apakah ada penambahan dan pengurangan jumlah anggota? - Iuran dan keswadayaan - Sekretariat?	- Maju-mundur - Ada tapi belum terorganisir - (tidak dijawab) - (tidak dijawab)
Tanjung Karang, Tasikmalaya	- Bagaimana perkembangan OTL? - Apakah ada penambahan dan pengurangan jumlah anggota? - Iuran dan keswadayaan - Sekretariat?	- Masih berjalan - Tidak ada penambahan - Iuran wajib tidak berjalan - Sudah ada
Cieceng, Tasikmalaya	- Bagaimana perkembangan OTL? - Apakah ada penambahan dan pengurangan jumlah anggota? - Iuran dan keswadayaan - Sekretariat?	- Ada perkembangan - Tidak ada penambahan - Iuran tetap berjalan Rp500/bln - Sudah ada

Selain sistem rekuitmen pengurus YAPEMAS yang sangat ketat dan terbatas sehingga menyebabkan para aktivisnya mengalami *overload*, kecenderungan *mandeg* di dalam OTL seperti terlihat pada tabel diatas juga mungkin disebabkan oleh karena tahapan perjuangan untuk mencapai cita-cita akhir (visi dan misi) yang kurang bisa diterjemahkan ke dalam strategi dan praktik pendampingan sehari-hari. Hal ini sangat mungkin terjadi ketika jumlah OTL semakin banyak sedangkan sumber daya manusia yang tersedia untuk mendampingi kasus-kasus sengketa tanah itu sangat terbatas maka tidak menutup kemungkinan para aktivis ini akan kehilangaan fokus dan arah pendampingan. Hal lain juga mungkin terjadi ketika OTL-OTL itu telah berkembang dalam situasi yang semakin komplek seperti terlibat hubungan-hubungan sosial, ekonomi, dan politik dalam tatanan kehidupan di pedesaan.[4] Sementara itu kebijakan tentang desa seperti yang tertuang dalam UU nomor 32 tahun 2004 itu belum sepenuhnya menciptakan situasi politik yang mendukung cita-cita reformasi agraria di kalangan petani.[5]

Kapasitas Bermain di Arena Politik

Sejak Agustiana bergabung dengan sekelompok mahasiswa Sekolah Tinggi Pertanian di Garut pada tahun 1989, kepemimpinannya sudah mulai terasa menonjol. Dinamika kelompok mahasiswa itu sampai dibentuknya FPPMG misalnya, sangat diwarnai oleh pemikiran dan sepak terjang Agustiana. Kepemimpinannya juga memberikan warna tersendiri bagi Serikat Petani Pasundan sampai sekarang ini.

Di sisi lain, fenomena kepemimpinan Agustiana yang sangat menonjol ini melahirkan ketergantungan di kalangan massa pendukung SPP. Banyak hal yang berkaitan dengan koordinasi keluar dilakukan sendiri oleh Agustiana. Hal ini juga menyebabkan seolah-olah adanya semacam pembelahan pada wilayah pembagi-

an kerja antara hampir semua pengurus sekretariat SPP yang juga duduk di YAPEMAS itu dengan Agustiana seorang diri. Untuk urusan "ke dalam" dipegang oleh para aktivis organisasi pendukung ini, sedangkan untuk "urusan keluar" dipegang oleh Agustiana.[6]

Beban yang harus dipikul oleh setiap orang di dalam "wilayah pembagian kerja" ini menjadi sangat berat. Agustiana yang melayani seorang diri hampir semua koordinasi keluar menjadi "super-sibuk", sementara itu yang lainnya dibebani oleh tugas-tugas ke dalam yang semakin banyak seperti diuraikan diatas. Apabila tidak berhati-hati, pembelahan "wilayah pembagian kerja" seperti ini akan sangat berbahaya bagi citra gerakan. Agustiana karena hubungannya keluar yang sangat intensif bisa terjebak dalam promosi yang salah.[7]

Pertanyaan yang muncul di kalangan aktivis LSM dilua anggota SPP terhadap kapasitasnya bermain di arena politi telah melahirkan citra (promosi yang salah) semacam itu.[8] Apabila hal ini terjadi tentunya akan bersifat kontra-produktif terutama terkait dengan upayanya membangun jaringan keluar yang lebih luas itu. Citra semacam itu bahkan bisa dimanfaatkan oleh lawan-lawan politiknya untuk kepentingan-kepentingan yang berlawanan.

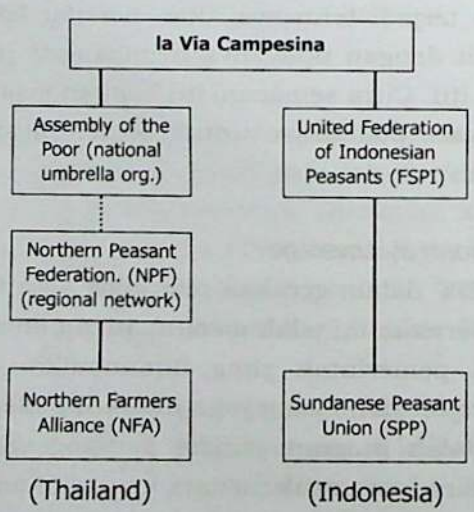
Wacana *Land Reform by Leverage*

Kontribusi SPP dalam gerakan reformasi agraria di Indonesia cukup besar. Gerakan ini telah memunculkan anti-*discourse* terhadap wacana pemerintah yang dimunculkan melalui *Land Administrasi Project (LAP)* yang juga didukung oleh Bank Dunia. Program ini adalah program jangka panjang yakni selama 25 tahun yang antara lain untuk menata kepemilikan tanah melalui program sertifikasi. Di tingkat nasional, gerakan ini juga melahirkan anti-*discourese* terhadap wacana kebijakan pembaharuan

agraria yang diselenggarakan oleh pemerintah atau yang berisi kepentingan-kepentingan negara. Secara konseptual, gerakan ini juga memunculkan anti-*discourse* terhadap wacana *land reform by grace* dan melahirkan organisasi sosial yang berperanan penting di dalam pembentukan wacana *land reform by leverage.*[9]

Andeer dan Jelmin (2004), juga menyebutkan bahwa SPP merupakan gerakan petani terbesar di wilayahnya dengan anggota mencapai lebih dari dua ratus orang petani *landless*. Pelibatan jumlah massa yang semakin besar ini menurut Nasikun (dalam Suhendar, 2004) merupakan tolok ukur keberhasilan gerakan sosial.[10] Kontribusi SPP di tingkat internasional antara lain juga bisa dilihat dari laporan kedua orang itu, seperti pada skema berikut.

International coordination between the local organisations and Via Campesina, formal and informal ties.



Koordinasi di tingkat internasional ini telah melahirkan solidaritas bagi gerakan petani di seluruh dunia sehingga secara ekonomi-politik daya tawarnya terhadap kebijakan-kebijakan lembaga-lembaga internasional seperti Bank Dunia dan WTO juga semakin besar. Gerakan petani di tingkat dunia ini tidak hanya melahirkan wacana *land reform by leverage* di tingkat dunia, melainkan juga melahirkan isu-isu internasional seperti HAM, demokratisasi, anti liberalisasi dan pasar bebas serta globalisasi dalam gerakan petani itu. Perasaan "kekitaan" diantara sesama petani di seluruh dunia bisa menciptakan identitas kelompok yang kuat sehingga bisa digunakan untuk kepentingan *lobby-lobby* internasional itu.

1) SKEPO, 2002
2) Hal ini setidaknya bisa dikonfirmasi dengan "jumlah perambah hutan pada tahun 2003 dan 2004" yang dikeluarkan oleh Perum Perhutani (Tim Teknis Penanggulangan Perambahan Hutan di Kabupaten Garut, 2004)
3) Wawancara dengan Nissa Wargadipura, 2005.
4) "Pada saat ini kita hampir jarang menemukan desa-desa prakapitalis — sebagai potret masyarakat manusiawi, penuh nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas sesama warganya. Umumnya wilayah pedesaan telah sangat terbuka dan terintegrasi ke dalam sistem ekonomi makro, baik di tingkat nasional maupun dunia" (Bahari, dalam Suhendar, 2004, 168)
5) Perbedaan kepentingan antara negara dan petani dalam mewujudkan cita-cita reformasi agraria antara lain disampaikan oleh Powelson dan Stock, "keduanya mengkritik pelaksanaan reformasi agraria di negara-negara berkembang yang dilakukan atas kedermawanan dan inisiatif negara sepenuhnya, atau bahkaan dengan keterlibatan pihhak asing, tidak (akan) mampu meningkatkan kesejahteraan petani", (Suhendar, dalam Suhendar dkk., 2004, 319)
6) Wawancara dengan Nissa wargadipura juga menyiratkan hal ini, dimana Agustiana lebih banyak memegang peranan diluar sedangkan ke dalam dipegang oleh Ibang Lukmanudin, sebagai Deputi Umum SPP. Tetapi antara Agustiana dan Ibang Lukmanudin jarang sekali bertemu karena kesibukannya masing-masing.
7) Beberapa aktivis LSM diluar SPP yang ditemui juga mengindikasikan hal itu sehingga terkesan "menjual SPP".
8) Beberapa aktivis mempertanyakan peranan Agustiana dalam pemilihan Bupati di Kabupaten Kuningan.
9) *Land reform by leverage* ini secara konsisten juga dilontarkan oleh Gunawan Wiradi pada berbagai diskusi yang membahas tentang pentingnya reformasi agraria di Indonesia (Suhendar, dalam Suhendar, 2004, 320)
10) Menurutnya, "kriteria keberhasilan gerakan sosial hanya dapat diukur sampai seberapa jauh la berhasil melibatkan semakin banyak penduduk miskin, terutama buruh tani dan petani-petani berlahan sempit, di dalam proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan pembaharuan agraria" (dalam Suhendar 2004: 292).

Daftar Pustaka

Buku

Andéér, Lina dan Kristina Jelmin, 2004, "Peasant's resistance in global context, a two case study of solidarity within the transnasional peasant movement", Uppsala University; Sweden Departement of Government, Minor Field Study No: 125, Bachelor Thesis.

Bahari, Syaiful, 2002, "Petani dalam Perspektif Moral Ekonomi dan Politik Ekonomi", dalam Suhendar, Endang, dkk., 2002, *Menuju Keadilan Agraria 70 Tahun Gunawan Wiradi*, AKATIGA, Bandung.

Gutomo Bayu Aji, 2000, "Resistensi Penduduk Pedesaan dalam Cerita Keseharian di Kaliloro", dalam *Populasi Buletin Penelitian Kebijakan Kependudukan*, Pusat Penelitian Kependudukan UGM.

———————, 2004, "Bukan Demokrasi, Melainkan Dominasi dan Resistensi (Catatan Perlawanan di Kaliloro)", dalam *Yang Pusat dan Yang Lokal Antara Dominasi, Resistensi, dan Akomodasi Politik di Tingkat Lokal*, Pustaka Pelajar dan Pustaka Percik.

Hobsbawm, Eric J., 2000, *Bandit Sosial*, Teplok Press, Jakarta

Kurasawa, Aiko, 1993, *Mobilisasi dan Kontrol Studi Tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945*, GramediaWidyasarana Indonesia, Jakarta.

Lukmanudin, Ibang, t.t., "Menolak Klaim Perhutani atas Tanah Sagara", dalam *Kisah-kisah Advokasi*, penerbit.

Nasikun, 2002, "Pembaruan Agraria: Perjalanan yang Tidak Boleh Berakhir", dalam Suhendar, Endang, dkk., 2002, *Menuju Keadilan Agraria 70 Tahun Gunawan Wiradi*, AKATIGA, Bandung.

Peluso, N., 1992, *Rich forest, poor people: resource control and resistance in Java,* Berkeley: University of California Press.

Pratikno, Fajar, 2000, *Gerakan Rakyat Kelaparan Gagalnya Politik Radikalisasi Petani*, Media Pressindo, Yogyakarta.

Suhendar, Endang, 2002, "Land Reform By Leverage: Perjuangan Petani Mewujudkan Kebijakan Agraria yang Berkeadilan", dalam Suhendar, Endang, dkk., 2002, *Menuju Keadilan Agraria 70 Tahun Gunawan Wiradi*, AKATIGA, Bandung.

White, Ben, 2002, "Agrarian Debates And Agrarian Research in Java, Past, And Present", dalam Suhendar, Endang, dkk., 2002, *Menuju Keadilan Agraria 70 Tahun Gunawan Wiradi*, AKATIGA, Bandung.

Artikel

Lukmanudin, Ibang, t.t., "Membangun Organisasi Petani di Tatar Pasundan Studi Kasus Gerakan Pendamping di Masa Orde Baru".

Wargadipura, Nissa, .t.t., "Gerakan Nyata Perlawanan Arus Bawah Organisasi Tani Lokal Dangiang, Cilawu Serikat Petani Pasundan".

Laporan

Human Rights Watch, "Bab VIII The Ban on Student Political Political Activity and Expression", dalam http://www.hrw.org/reports98/indonesia2/Borneote-09.htm

Kejaksaan Negeri Tasikmalaya, 1997, "Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Subversi Atas Nama Terdakwa Agustiana Bin Suryana",

Tim Teknis Penanggulangan Perambahan Hutan di Kabupaten Garut, Departemen Kehutaann dan Perkebunan, 2004.

Tobing, HL. Dan Candra Kusuma, 2002, "Laporan Assesment Kapasitas advokasi Serikat Petani Pasundan (SPP) Mei-Juni 2002", SKEPO dan SPP.

Tim Peneliti, 1998, "Perilaku Kekerasan Sosial", PSKP UGM.

Website

Adam, Asvi Warman, "Sisi Gelap Sejarah", dalam http://www.mesias.8k.com

Anwar, Rosihan, "Peristiwa Haji Hasan dari Cimareme 1919", dalam *Renungan Sejarah dan Proklamasi Kemerdekaan.*

Februana, Ngarto, "Himpunan Artikel Ngarto Februana", dalam http://www.geocities.com

Laporan Human Right Watch, "The Ban on Student Political Activity and Expression", dalam http://www.hrw.org

Mukhijab, http://swaramuslim.net

Priyo Pribadi Soemarno, "Sikap Himawan Sutanto dalam Menghadapi Gerakan Mahasiswa 1978", http://www.mail-archive.com

Sinjal, Daud, 2000, "Agar Tak Seperti Tentara Nazi", dalam http://www.aksara.or.id

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0104/05/nasional/angg06.htm

http://www.mail-archive.com/siarlist@minipostgresql.org/msg00541.html

http://www.library.ohiou.edu/indopubs/2000/12/19/0050.html

http://www.seasite.niu.edu/Indonesian/Reformasi/Soeharto.htm

http://www.semanggipeduli.com/index.php?krs

http://www.sundanet.com

http://swaramuslim.net/more.php?id=A1982_0_1_0_M

http://su.wikipedia.org/wiki/Priangan

http://www.xs4all.nl/~peace/arc/arceng/state/1112965.html

Koran

Bandung Pos, "Warga Sagara Datangi DPRD Minta Calkades Sagara Dilantik", 29 Juni 1995

Cala, "DPRD Kabupaten Garut "Diserbu" Petani", 3 September 1999.

Jayakarta, "Warga Cibalong, Garut Mengadu ke Depdagri", 31 Maret 1994

Kompas, "SPP Pertanyakan Status Lima Perkebunan di Garut", 17 Maret 2000

Kompas, "Petani Unjuk Rasa Tepat pada Hari Agraria Nasional", 25 September 2002

Media Indonesia, "Warga Sagara Jabar Datangi Kantor BPN", 30 Maret 1994

Medikom, "SPP Garut Tolak RUU Perkebunan", 10-16 Februari, 2003

Pikiran Rakyat, photo, 24 Februari 2000.

Pikiran Rakyat, "Petani Meminta Tanah Perkebunan PTPV VIII", 15 Maret 2000

Pikiran Rakyat, " Kota Kabupaten Garut Menjadi Lautan Petani", 24 April 2002.

Pikiran Rakyat, "Ratusan Petani Demo di Pendopo", 27 November 2002.

Pikiran Rakyat, "Ratusan Massa "Serbu" Pengadilan, 27 November 2002

Pikiran Rakyat, "SPP Dukung "Wanalaga" Sayangkan Penangkapan", 15 Agustus 2003

Pikiran Rakyat, " Pemuda, Mahasiswa, SPP Protes Operasi Wanalaga", 20 Agustus 2003.

Radar Tasikmalaya, "Ribuan Petani Pasundan Demo ke Jakarta", 8 Juni 2004

Rakyat Merdeka, "Ribuan Petani Pasundan Protes Menko Ekoin", 24 November 1999

Majalah

MATRA, "Vonis Pemicu Tanpa Saksi", 27 Desember 1997.

Lampiran I
Kronologi Kasus Tanah di Beberapa OTL

Kronologi Tanah Blok Mansur, Kirtil, Pasangrahan, Kamper dan Kiara Jinggang, Desa Sukatani, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut

Tahun 1905 tanah di Blok Mansur, Kirtil, Pasangrahan, Kamper dan Kiara Jigang adalah tanah masyarakat Desa Sukatani Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut yang kemudian di rebut oleh Belanda dengan alasan bahwa masyarakat tidak bisa membayar pajak tanah, karena tekanan dari pihak Belanda akhirnya tanah tersebut dengan berat hati ditingalkan oleh masyarakat. Oleh Belanda tanah tersebut dijadikan areal perkebunan mrben yang dikelola oleh Jawatan Kehutanan Belanda.

Tahun 1950 masyarakat menggarap kembali lahan tersebut oleh 50 kk dengan luas garapan 50 ha dan ditanami oleh sayur - mayur.

Tahun 1955 masyarakat meninggalkan kembali garapannya dengan alasan terjadinya pemberontakan DI/TII yang membuat masyarakat takut berada digarapan.

Tahun 1973 Perhutani masuk di Desa Sukatani tanpa basa basi dengan warga sekitar tentang asal usul lahan tersebut langsung saja tanah diblok tersebut ditanami oleh pinus dan rasamala dengan melibatkan masyarakat sekitar untuk menanaminya tanpa ada upah.

Tahun 1985 diblok tersebut sudah penuh dengan rasamala dan pinus yang sudah siap ditebang. Pertengahan tahun 1985 sekitar bulan Juli - Agustus terjadi badai yang merobohkan tanaman terutama pinus hanya sebagian kecil saja Rasamala yang tumbang, kayu yang sudah roboh sebagian besar dijual oleh Perhutani hanya sebagian kecil yang dimanfaatkan oleh masyarakat itupun ranting - rantingya untuk kayu baker.

Tahun 1986 – 1990, diawal tahun 1986 masyarakat mulai memanfaatkan lahan yang sudah tidak ada kayunya untuk lahan pertanian sayur - mayur guna menambah penghasilan keluarga, luasnya 150 ha. Selain menggarap masyarakat dibebankan untuk menanam pinus ditiap garapan masing - masing dengan bibitnya harus membeli sendiri dari Perhutani apabila tidak melaksanakan intruksi tersebut maka garapannya dicabut. Jangka waktu menggarap juga dibatasi antara 2-3 tahun setelah itu pengarap harus ketuar dan lahan garapannya.. Tapi lain halnya untuk petani kaya Perhutani malah memberikan keleluasaan untuk menggarap lahan dengan catatan harus membeli garapan kepada pihak Perhutani secara otomatis untuk petani gurem tidak mampu untuk membeli lahan garapan terpaksa harus menggarap dilahan sempit yang sekiranva tidak dibutuhkan oleh petani kaya itupun masih di minta bayaran dari hasil panen oleh mandor[r] hutan, praktek jual beli garapan kawasan hutan produksi yang dilakukan oleh Perhutani berjalan sampai tahun 1998 reformasi

Tahun 1949 - 2002 masyarakat kembali menggarap tanah - tanah yang dulunya pernah menjadi lahan garapan mereka yaitu di Blok Mansur, Kirikil, Pasangrahan, Kamper dan Kiara Jigjag seluas 1 Ha.

Tahun 2003 bulan Juli pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan Surat Edaran Gubernur no.522 tentang pelarangan tumpang sari serta mengelar Clperasi Wanalaga Lodaya yaitu sebuah operasi terpadu yang melibatkan semua instansi untuk mengusir penggarap dihutan lindung tapi kemudian tanpa ada alasan yang jelas merembet kewilayah hutan produksi otomatis penggarap disekitar hutan produksi ikut terusir.

Tahun 2004 dampak operasi wanalaga lodaya banyak masyarakat yang kehilanagn mata pencaharian seperti buruhtani, petani gurem tukang ojek dli yang mengatung diri pada tanah kehutananan yang dulunya tanah masyarakat. Perjuangan masyarakatpun tidak berhenti pada bulan Mei tahun

2004 masyarakat desa hutan diwilayah Papandayan dan Cikuray termasuk desa Sukatani mengadakan audensi dengan para pihak di kabupaten Garut guna membahas tentang penyelesain konflik hutan di Garut dan penanganan paska Operasi Wanalaga Lodaya untuk masyarakat yang terkena dampak operasi tersebut.

Kronologi Kasus Tanah PTPN VIII Bunisari Lendra (Cisompet) PTPN VIII Bunisari Lendra Wilayah Padarame (Cisompet)

1908: Tanah mulai dibuka dan digarap oleh masyarakat.
1910 : Tanah Blok Tonjong sampai Blok Cikereteg berhasil memiliki cap Singa atas kepemilikan Eyang Mujaham seluas 65 Ha.

1916 : Belanda datang ke Desa Cisompet bermaksud membeli tanah masyarakat karena pada saat itu sedang dilakukan pelebaran perkebunan dimana - mana.

1917 : Usaha Belanda tidak berhasil. Belanda meminjam lahan 1 ha untuk dijadikan kebun pembibitan benih karet. Selanjutnya pemerintahan Belanda berupaya membuat jalan karena kebetulan waktu itu Belanda akan membuat perusahaan kapur.

1919 : Belanda sedikit demi sedikit menanami pohon karet ditanah tersebut. Hingga akhirnya hampir semua lahan masyarakat dikuasai Belanda.

1972 : tanah masyarakat di klaim oleh pihak perkebunan sebagai PTP Nusantara VIII Buni Sari Lendra (HGU berakhir tahun 1996).
1999: Masyarakat mulai menggarap lahan Eks-HGU tersebut sampai sekarang.

Kronologi Kasus Penyerangan Cikupa

Kamis, 17 Mei 2002 masyarakat penggarap di datangi oleh pemerintah kecamatan dan Polsek yang di antaranva: Camat Langkap Lancar, camat Cidolos, Camat Pamarican, Kapolsek Pamarican, Kapolsek Langkap Lancar, Koramil Pamarican yang tugasnya adalah di undang dan di bayar oleh pihak PTPN VIII Cikupa untuk mengusir penggarap dari lahan garapanya dengan alasan masyarakat merusak aset perkebunan. Tetapi setelah mengalami kompromi dengan masyarakat penggarap, masyarakat penggarap tetap dengan keputusan awal yaitu menggarap lahan dengan alasan memperjuangkan kehidupan mereka yang semakin hari semakin terancam kelaparan. Dengan alasan ini maka camat mengeluarkan steatment-nya bahwa pada dasarnya camat Cidolos juga tidak sepakat jika semua tanah itu di kuasai oleh orang-orang yang punya duit saja (perkebunan) dan dengan sikap itu pihak PTPN VIII merasa kecewa karena niat untuk mengusir penggarap tidak terlaksana.
Jumat, 18 mei 2002 Serikat pekerja buruh perkebunan PTPN VIII mengancam akan menyerang pada masyarakat yaitu pada hari Sabtu, 14 Met 2002, namun ancaman itu tidak di hiraukan oleh masyarakat dan akhirnya masyarakat dirisaukan dengan ancaman itu.
Sabtu, 19 Mei 2002
Masyarakat dalam keadaan siaga satu dan akhirnya pihak SP-BUN menarik masanya untuk tidak jadi melakukan penyerangan dan selanjutnya pihak SP-BUN mengancam akan turun pada hari Senin, 21 Mei 2002.
Minggu, 20 Mei 2002 Masyarakat kembali melakukan aktifitasnya seperti biasa
Senin, 21 Mei 2002 Ketika masyarakat sedang melakukan aktivitasnya, tiba-tiba sekitar pukul 14.30 wib datang masa dari pihak masa SP-BUN serta di dampingi 30 personil pasukan Dalmas dari Kapolres

Ciamis yang di pimpin oleh Reserse Hendri untuk melakukan pengrusakan terhadap lahan garapan masyarakat. Tadinya masyarakat begitu percaya dengan kepolisian bahwa polisi tugasnya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, tetapi bukannya malah memimpin pengrusakan terhadap penggarapan masyarakat serta gubuk-gubuk milik penggarap masyarakat. Akibat pengrusakan itu masyarakat yang menjadi korrban kehilangan persediaan pangan dan terancam kelaparan karena padi yang ada di dalam gubuk itu habis di bakar dan lebur bersama barang-barang lainnya yang di antaranya 50 gr emas serta bahan-bahan bangunan dan setelah di hitung jumlah kerugian yang di-alami oleh masyarakat jika di perhitungkan dengan uang tambah Rp50 juta karena sekitar 6 ha sawah masyarakat habis di rusak oleh pihak SP-BUN.

Kronologi Kasus Tanah Cilawu

1940: Masyarakat menggarap tanah yang pada saat itu dikelola oleh kehutanan

1974: Datang PTPN Nusantara VIII dan meng-HGU-kan lahan yang sedang digarap oleh masyarakat tersebut seluas 2000 Ha

1974: Karena lahan garapannya diambil alihh oleh pihak PTPN Nusantara VIII, maka masyarakat Sukamukti membabat hutan Gunung Cikuray untuk dijadikan areal bercocok tanam

1974: PTPN Nusantara VIII memperluas areal perkebunannya dengan cara mengambil alih seluruh lahan yang pernah digarap masyarakat seluas 14 Ha, tapi masyarakat tetap menggarap lahan-lahan tidur yang di klaim olehh pihak PTPN Nusantara VIII tapi tidak digarap oleh pihak perkebunan.

1997: Massa HGU PTPN Nusantara VIII habis berlakunya

1998: Pihak PTPN Nusantara VIII memberikan ijin kepada petani untuk menggarap lahan tidur dengan sewa garap selama 6 bulan dan diwajibkan untuk membayar sewa kepada pihak PTPN Nusantara VIII, petani menyanggupi perjanjian tersebut dengan massa kontrak dari bulan Mei 1998 sampai dengan bulan Juni 1999 selama satu tahun untuk 77 KK

28 Juni 1998: Misri sebagai mandor kebun, mendatangi masyarakat untuk meminta uang sewa sebesar Rp4000/kk. Petani membutuhkan tanah tersebut untuk dijadikan lahan garapannya karena pada saat itu terjadi krisis moneter

29 Juni 1999: Belum juga masyarakat panen, tiba-tiba saja pihak PTPN Nusantara VIII membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak dengan menutup lahan tersebut dan menancapkan plang bahwa lahan tersebut tidak boleh digarap.

7 Juli 1999: FPPMG melakukan investigasi ke daerah Pasir Kihiang dan bertemu denggan petani disana sebanyak 60 orang, tapi karena masyarakat terlanjur marah karena perjanjian tersebut dibatalkannya ketika pertemuan sedang berlangsung sebagian masyarakat berbondong-bondong pergi ke lokasi perkebunan di Blok Kiara Lawang dan melakukan penebangan terhhadap tanaman liar yang ada disana karena lahan tersebut adalah yang tidak digarap oleh pihak PTPN Nusantara VIII (lahan tidur)

13 Juli 1999: Masyarakat Sukamukti bersama dengan mahasiswa melakukan pertemuan dengan beberapa aparat militer dari Koramil setempat

14 Juli 1999: Masyarakat desa Sukamukti mendapatkan panggilan dari Koramil yang tujuannya untuk segera membuat proposal permohonan penggarapan

21 Desember 1999: Petani penggarap datang ke Menhhutbun dan BPN pusat di Jakarta sebanyak 420 orang untuk menyampaikan masalah yang mereka hadapi dan meminta pihak tersebut untuk menolak perpanjangan HGU PTPN Nusantara VIII yang sudah habis masa berlakunya.

Desember 1999: Masyarakat menggarap lahan perkebunan dari lahan yang ditelantarkan seluas 380 Ha digarap oleh 741 orang petani. Penggarapan tersebut terdapat di 4 desa yaitu Kampung Kiara Jangot di desa Dangiang, Kampung Pasir Kihiang, Cidangan Sari desa Sukamukti, desa Dawung Sari, Pasir Jeruk, desa Mekarmukti di Blok Kiara Lawang, Blok Batu Sirep, Blok Ciledug, Blok Legog Haji, Blok Hantap.

29 Januari 2000: Petani penggarap diserbu oleh preman yang dikondisikan oleh pihak PTPN Nusantara VIII

14 Februari 2000: Petani penggarap ke Polres sebanyak 7 truk karena sebelumnya ada petani yang dipanggil sebanyak 4 orang, dengan tuduhan merusak kekyaan perusahaan PTPN Nusantara VIII

4 Maret 2000: Polres memanggil petani penggarap sebanyak 8 orang dan dilakukan pemeriksaan

14 Maret 2000: Petani penggarap menyampaikan aspirasi dan keinginannya kepada DPRD Jawa Barat dan berhasil bertemu dengan ketua komisi A

14 Juni 2000: Petani penggarap mendatangi BPN Kanwil Jawa Barat di Bandung untuk menyampaikan masalah garapan mereka dan berharap untuk menolak perpanjangan HGU dari PTPN Nusantara VIII

19 Juli 2000: Petani penggarap mendatangi DPR/MPR dengan isu yang sama

26 agustus 2000: Terjadi penyerangan dan perusakan tanaman seluas 30 Ha milik penggarap di desa Dangiang dan Dawung Sari yang dilakukan oleh ratusan preman perkebunan, terdapat indikasi adanya keterlibatan aparat desa dan militer (babinsa) sedangkan petugas Polsek pun tak banyak berbuat untuk menghentiukan kejadian tersebut.

29 Agustus 2000: Melaporkan kasus penyerangan dan pengrusakan tanaman milik petani ke Polda dan menguasakan hukum kepada LBH Bandung

Agustus 2000: Terjadi bentuk pengrusakan tanaman milik petani penggarap selama dua kali. Terjadi bentuk intimidasi dan pengusiran kepada petani penggarap satu kali.

13 September 2000: Dari DPRD Jabar datang ke Cilawu

3-5 Oktober 2000: Pihak Dalmas Polres Garut mendatangi petani penggarap untuk melakukan pengamanan karena petani tetap bersikeras untuk menggarap lahhan tersebut.

5 Oktober 2000: Petani penggarap karena kesal terhadap Dalmas Polres Garut, dengan cara dialog dan adu argumentasi yang panjang berhasil mengusir Dalmas Polres Garut.

Kronologi Kasus Tanah Cisurupan

1972: Mandor Kehutanan Sudia dan Subari mengadakan rapat di Desa Sukajadi (sekarang Mekarjaya). Lurahnya pada waktu itu Juragan Suparta. Rapat tersebut memusyawarahkan permohonan tanah hutan alam yang dikuasai Perhutani yang berlokasi Blok Korowat, Korowek, Pasir Lebe, dan Legak Panjang, oleh masyarakat kepada Perum Perhutani. Musyawarah dihadiri oleh 2.300 orang, sedangkan yang diundang 15.000. Hasil musyawarah adalah memilih tokoh masyarakat yaitu Juragan Ismari untuk mengurus pengajuan permahonan. Tiga hari setelah rapat, Juragan Ismari membuat permahanan yang ditujukan kepada Perum Perhutani di Garut. Seminggu setelah permohonan, juragan Ismari, juragan
Sudia, KRPH Oyo, memberi tanda/batas di lokasi yang dimohon. Pembuatan batas dilakukan selama 3 hari untuk untuk lokasi seluas 300 Ha, bekerja sama dengan masyarakat Desa Sukajadi sejumlah 40 orang. Sistem yang dipakai adalah tumpang sari, yaitu masyarakat pemohon membuka hutan alam di blak-blak tersebut di atas, kemudian mengelola dengan sistem tumpang sari, sambil menanam raksamala.

1984: Perhutani menebang habis raksamala di lahan tumpang sari yang ditanam oleh masyarakat. Kayunya dipotong (didolken) dan dicap Perhutani. Datang mandor Subari, dan mandor baru Subarta, Solihin, Karmita, dan KRPH Oya, menginstruksikan pada masyarakat untuk menanam pinus. Pelaksanaannya sama seperti tahun 1972, yaitu dengan sistem tumpang sari sampai tahun 1992.

1992 - 1998: Datang lagi petugas Perhutani bernama KRPH Uju, KRPH Den Sutia, dan Mandor Endang, Amsi, Dana, Tapi sistem yang ditawarkan Perhutani berbeda dari semula, tidak lagi sistem tumpang sari melainkan sewa, yaitu per hektar Rp100.000. Sayangnya kesempatan menyewa hanya diberikan kepada orang kaya dan lokasi yang diberikan pun pada daerah datar. Sedangkan masyarakat kecil tersisih dan mendapatkan lokasi yang curam dan tidak bagus untuk pertanian.
Sejak menggunakan sistem sewa tersebut Perhutani tidak bisa lagi mengambil hasil dalam bentu kayu karena masyarakat tidak menanam kayu dengan alasan mereka sudah menyewa lahan.

1998 – 2000: Mandor Dana S., Endang, KRPH Amsi menawarkan sistem sewa tapi dengan tambahan peraturan yaitu menyewakan 1 Ha Rp. 300.000 untuk masa waktu 2 tahun. Dan pada saat itu ada kejadian satu orang menyewa 10 Ha, dan ada yang menyewa satu blok (± 8 Ha), dikuasai sendiri.

2000: Perhutani merubah harga sewa menjadi Rp 140.000/ha/tahun. Dan seseorang bisa menyewa dengan luas tak terbatas. Sementara itu masyarakat yang pertama kali membuka hutan alam pada tahun 1972 menjadi tersisih dan tidak bisa menggarap di lahan tersebut.

Riwayat Perkebunan Condong Afdeling Gunung Kembar Bungbulang

Sebelum tahun 1918 lokasi B1ok Cigorowek Pamoyanan, Cikoromong, Koreak, Batu Gelang, Gunung Kembar dan Ciunung Masigit, Desa Mekar Jaya Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut, dimulai dari pintu kesatu sampai batas selatan, digarap oleh masyarakat Kp. Limusnunggal. Rancakole dan Panyindangan. Pada tahun 1918 garapan tersebut dijual oleh Wedana Bungbulang (Ubay) kepada Belanda bernama Tuan Redel, Tuan Lao, Tuan Anom d11.

Setelah masyarakat mengetahui bahwa garapan mereka dijual oleh Wedana dan dikejar - kejar sampai pindah Cibobo kemudian Wedana tersebut dimutasikan. Pada waktu itu tokoh masyarakat - Ki Ardasih mempertahankan tanah garapan masyarakat, kesimpulannya Tuan Redel memberikan tanah tersebut mulai dari lokasi pohon Kenal miliknya Ibu Halmi, sekarang dikenal Blok Kenal Halmi (Cigorowek), sampai batas selatan yang berbatasan dengan tanah kas desa.

Karena merasa blok yang diberikan oleh Tuan Redel sangat sedikit dilihat dari jumlah penduduk, maka masyarakat meminta tambahan garapan sampai pintu (batas antara hutan dengan garapan), tetapi tetap tidak diberikan. Dalam perjalanan perjuangannya memohon garapan Ki Ardasih ditangkap dan dipenjara 3 tahun selama Ki Ardasih dipenjara, sebagian blok Kenal Halmi ditanami karet oleh Tuan Reder.

Ketika Ki Ardasih keluar dari penjara, tanah yang ditanami karet direbut kembali oleh masyarakat dipimpin oleh Ki Ardasih. Akhirnya Tuan Reder mengembalikan tanah tersebut. Pada 1936. Luas lokasi garapan masyarakat sekitar 396 Ha, kembali dimiliki oleh masyarakat.

Pada 1938 dari Pintu sampai Barat - Ipukan Mariuk, kebun karet tidak dipelihara oleh Tuan Reder dikarenakan kalah perang oleh Jepang dan Belanda pulang ke negaranva, pengelolaan kebun karet dilanjutkan oleh Pak Jenal Warga Negara Indonesia hanya lima tahun.

Pada 1943 datang lurah Jamsuri pemimpin masyarakat, tanah garapan dibagikan bahkan diadakan pengukuran dan pengkavlingan dengan memakai nomor dari Pintu ke batas Selatan. Karena masyarakat pada waktu itu sedikit, sementara pengkavlingan dengan memakai nomor banyak yang kosong, masyarakat dengan begitu saja pindah dari nomor yang telah disepakati ke nomor yang kosong, (karena tidak ada yang menggarap) sehingga kembali tidak terorganisir.

Pada 1957 sampai pintu ke utara (zaman Jepang) digarap oleh masyarakat karena karetnya tidak dipelihara (diterlantarkan), dan pada waktu itu masyarakat menggarap sampai lahan garapannya diperluas, sampai-sampai tanaman karet habis oleh penggarap. Sampai saat ini yang menggarap semakin banyak, sampai tahun 1989 penggarapan dilakukan.

Pada tahun 1990 ditanam lagi karet sampai sekarang.

Kronologi Kasus Tanah Jangkurang

- Pada masa kolonialisme, lahan-lahan rakyat harus berubah menjadi lahan-lahan yang dikelola oleh pihak imperialis, terutama ketika pemerintahan Belanda melakukan kebijakan tanam paksa clan menetapkan lahan-lahan rakyat menjadi lahan partikelir.
- Pada tahun 1952, tanah yang dikelola rakyat yang terkenal dengan tanah hak Erpacht SA dengan luas sekitar 200 Ha telah habis masanya, dan tanah tersebut kembali menjadi tanah negara. Sehingga rakyat setempat memiliki hak untuk memperolehnya, karena dari awalpun rakyat telah mengarap tanah tersebut.
- Pada tahun 1994, berdasarkan SK Mentri Negara/Kepala BPPN No. 88-VI-1994 tanah tersebut ditetapkan menjadi tanah objek program Land Reform.
- Dalam pelaksanan proses Landreform, terjadi penyelewengan yang dilakukan oleh para birokrasi setempat seperti terjadinya persengkongkolan kepala desa yang pada waktu itu dikepalai oleh AD dengan oknum pihak BPN yang bernama Odang. Tindakan yang diiakukan oleh Kepala Desa AD yaitu menarik KTP rakyat dan membuat KTP baru bagi para investor yang mempunyai dana yang besar guna membelinya, dan pihak masyarakat setempat (para penggarap) dipaksa untuk menjualnya dengan harga yang tidak sesuai, dengan alasan untuk kepentingan proyek pembangunan, lapangan golf, tangsi militer, dll.
- Pada tahun 1997, tanah SA seluas 150 Ha telah disertifikasi oleh tujuh orang kapitalis yang bekerja sama dengan BPN Garut diantaranya, Yani, Odong, Dasri, Diki, Yayat, Mega dan Dahlan.
- Rakyat mengadukan persoalan tersebut ke DPRD II Garut clan instansi lainnya, namun tidak ditanggapi secara positif, bahkan rakyat mengalami intimidasi dari pihak-pihak preman yang di bayar oleh pihak kapitalis. Hal ini acapkali di laporkan oleh masyarakat pada aparat tetapi sampai sekararg tidak ditangani secara sungguh-sungguh.
- Masyarakat mendatangi BPN Pusat untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Jangkurang.

- Oknum birokrasi yang melakukan manipulasi data sekarang telah di proses secara hukum, saat ini telah ditangani pihak Kejaksaan bahkan sempat dipenjara oleh pihak kepolisian.
- Pada tanggal 22 Nopember 2000, telah dibentuk tim antara masyarakat penggarap dengan pihak biroloasi pusat untuk proses sertifikasi tanah.

Kronologi Kasus Tanah Karyasari, Cibalong

- Sebelum Th 1967: Tanah tersebut yang berstatus tanah negara menjadi tempat berkenbang biak nyamuk malaria. Sampai th 1967 daerah tersebut dibawah pengawasan dari WHO karena banyak menimbuikan penyakit malaria.
- 1967 : Pihak Perhutani mengklaim iahan yang berstatus tanah negara menjadi tanah kehutanan. Karena status tanah tersebut tidak jelas masyarakat mulai menggarap dengan jalan menyewa tertadap petugas perhutani , cara penyewaanya dengan membayar berupa barang dari 1 patok (25 bata) dibayar dengan padi sebayak 5 Kg. Penyewaan tersebut berlaku sampai tahun 1987 (daftar penggarap pemula terlampir).
- 1987 : Datang investor untuk menanamkan modal di Desa Karya Sari untuk budidaya tambak udang atas nama H. Kartono Cs (dari kabupaten Tegal Jawa tengah), namun janji untuk membuka prayek tamabk udang tersebut tidak terrealisasikan sampai sekarang, masyarakat yang dijanjikan oleh pemilik modal itu sampai sekarang masih tetap menggarap.
- Tanah negara seluas 65 ha yang diklaim oleh perhutani diantaranya 25 ha menjadi HGU PT Surya Cibalong, 40 ha dijadikan tanah adat dengan 63 akte jual belikan oleh pernerintahan dan pihak yang terkait. Dari 63 akte tersebut diantaranya 42 orang nama piktif dari tingkat kabupaben dan 21 orang nama piktif dari pemerintahan desa clan kecamatan waktu itu. kepemilikan akta te.rsebut diluar penduduk Desa Karya Sari dan sebagian lagi tanah negara tersetwt disertifikatkan atas nama ; H. Kartano, H. Jajilah, Priohusodo, Porotuljannah clan lain-lain. Orang tersebut mengaku dari desa karyasari. (bisa ditanyakan langsung ke BPN keberadaan sertifikatnya serta jumiah luas).
- Juli 1994 : Tanah yang seluas 40 ha yang merupakan tanah adat, seluas 14,3 ha dimohon haknya oleh Bapak Pepe Junaedi (diluar penduduk Desa Karya Sari) clan sampai sekarang status tanah tersebut belum ada kejelasannya. Dari tanah yang seluas 14,3 ha tersebut dijualbelikan oleh Pepe Junaetii dan Ijum Sumarna (dari PT Surya) pada masyarakat Desa Karya Sari sebanyak 11 orang yang diantaranya JK, MO, OT dlan lain-lain. Tanah yang diperjual belikan kurang lebih 2 ha, dengan harga mulai dari Rp. 10.000 s/d 40.000 per bata, selebihnya masyarakat masih menggarap sampai sekarang.
- Oktober 1999 : Terjadi pem-Buldozer-an dan penggusuran lahan garapan masyarakat seluas 13 Ha oleh Taufik Hidayat (mantan Bupati Garut) tanpa ada surat ijin dari pemerintahan desa setempat. Lahan tersebut akan digunakan untuk lahan Tambak Udang, padahal lahan tersebut sedang digarap oleh masyarakat sekitar.

Asal usul kehutanan Kimerak Desa Dangiang Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut

Keadaan kampung Sindang Daweung, Kp Ciharus, Kp Negla, Kp Cikwiwi Desa Dangiang Kecamatan Cilawu kabupaten Garut

Kondisi masarakat umum secara ekonomi

Sebagian besar masyarakat menjadi buruh perkebunan dan buruh tani dan secara ekonomi kondisi masyarakat sangat minim (tidak mencukupi kebutuhan sehari - harinya)

Asal usul kehutanan (kronologis)

Tahun 1971 masyarakat menggarap di lahan Pasiran Kimerak yang pada saat itu masih kehutan-

an, tapi kemudian tanah tersebut di alihfungsikan menjadi perkebunan teh dan untuk selanjutnya masyarakat tidak bisa menggarap dan pindah garapan ke lahan yang berada di atasnya (masih blok kimerak)

Pada tahun 1976 perhutani / inpres (intruksi presiden) menganjurkan kepada masyarakat untuk membuka lahan perhutani dan waktu penggarapan selama 5 tahun. Waktu itu masyarakat di suruh menanam tanaman pinus tanpa upah, setelah pinus kira tingginya 2 m, penggarap meninggalkan lahan garapan pada tahun 1981 (tutup garapan).

Pada tahun 1986, datang lagi inpres, ada penggarapan lagi tapi sebagian besar orang luar yang menggarapnya (orang kapakan). Waktu itu lamanya menggarap masih 5 tahun. Perhutani menyuruh lagi menanam tanaman vinus dan setelah besar petani meninggalkan lahan garapan pada tahun 1991.

Selanjutnya pada tahun 1999, masyarakat mengajukan permohonan garapan yang luasnya 53 ha ke kantor perhutani, setelah itu permohonan di setujui sampai turun SK perjanjian masa penggarapan selama 25 tahun, malahan kata perhutani bahwa akan di hutan P.S (perhutanan sosial) kan, rencananya menanam kopi dan penggarap diharuskan membentuk organisasi karang taruna dan koperasi berbadan hukum.

Namun kenyataannya semuanya bangkrut, walaupun organisasi bangkrut, masyarakat tetap menggarap terus. Di bulan ke 8 tahun 2003, masyarakat tidak tenang karena mendengar ada issu tentang operasi wanalaga iodaya, apadagi setelah adanya penyebaran surat dari desa yang memakai alasan atas perintah perhutani, otomatis masyarakat meninggalkan garapannya tanpa menanam kayu karena ketakutan.

Dikarenakan melihat kondisi hutan yang masih gundul (tidak ditanami kayu), maka masyarakat kembali menggarap sekaligus melakukan penanam kayu di seputar hutan tersebut.

Perkembangan terakhir masyarakat dalam menggarap lahan, semua yang sudah menjadi anggota mereka sudah punya garapan dan sudah pada menanam kayu apa saja yang ada di sekitar kampung. Sebagian ada yang sudah beres menanam palawija, holtikultura namun belum ada penghasilan.

Kronologi Kasus Tanah di Desa Nagrog

Kesaksian tokoh masyarakat dulu sudah hidup mulai pada jaman belanda darl sacnpai sekarang beliau masih ada beliau memaparkan bahwa: pada tahun 1927 pada jaman Belanda. Belanda mengelola tanah pengangonan sampai pada tahun 1930 tanah pangangonan di tutup lagi oleh Belanda di jadikan hutan terjadilah hutan kawasan tidak ada tanaman apapun. Pada tahun 1945 Belanda di usir dari negeri indonesia ini tanah tersebut utuh ;ampai pada tahun 1950 dan tanah di garap lagi oleh masyarakat hingga menjadi sawah dan ladang.

Namun pada tahun 1958 di bikin patok oleh Perum Perhutani bahwa tanah tersebut milik masyarakat, pada tahun 1968 banyak masyarakat berdatangan untuk membuka lahan, jatuhnya orde lama (Soekarno) dan pemerintahan di kuasiai rezim Orde Baru pada tahun 1970-an, ada golkar masuk, dan pada tahun 1976 terjadi pemekaran desa setelah itu tiba-tiba perum mengintruksikan menanam pohon jati dan mahoni katanya kalau sudah besar dapat di manfaatkan oleh masyarakat bahkan menanampun tidak di beri upah setelah jati tumbuh besar di akui oleh perum jika ada masyarakat yang menebang (satu pohon) akan di hukum sehingga masyarakat merasa di bohongi di tindas, masyarakat benar-benar kecewa selama tiga puluhh tahun masyarakat di suruh makan kulit jati tidak punya garapan yang di garap hanya tanah pengangonan.

Kronologi Sengketa Tanah Pamegatan

- 1903: didirikan perusahaan perkebunan teh Pamegatan dengan nama N.V. Maatsehappij Tot Expiitatie Der Ondernemingen Nagelaten Deer Mr. A. Baron Baud. Seluruh modalnya terdaftar di negeri Belanda (Grave hage).
- Tanah perkebunan yang terlantar, dan telah berubah menjadi hutan, digarap oleh rakyat dengan ditanami sayur-sayuran dan palawija dan dikelola secara turun termurun. Setelah hutan dibuka dan dijadikan areal pertanian, tanah garapan rakyat tersebut diambil kembali oleh pihak perusahaan secara paksa. Selanjutnya tanah persil Cihideung disewakan kepada pemodal lokal dan luar. Pola ini berlaku terus hingga P.D. Gemah Ripah berkuasa.
- 1958: Sebelum pengambil-alihan seluruh perusahaan Belanda di Indonesia (1958), ternyata saham-saham N.V. Baud telah dibeli oleh perusahaan swasta Amerika Serikat Sea Iol & General Corporation di New York. Sehingga perkebunan tersebut menjadi milik warga Amerika Serikat dengan nama Baud Corporation Limited.
- 1961: Baud Corporation Limited berubah menjadi perseroan terbatas dengan nama PT. Baud Indonesia yang berkedudukan di Jakarta.
- 19 April 1964: Perkebunan teh Pamegatan diserah terimakan kepada Departemen Pertanian dan Agraria, yang selanjutnya akan diurus oleh PPN Karet XII
- 1 Maret 1965: Perkebunan teh Pamegatan mulai diserah terimakan dari PPN Karet XII kepada Direksi Perusahaan Perkebunan Gemah Ripah.
- 12 Juni 1965: Semua hak dan kewajiban serta tanggung jawab perkebunan diserahkan kepada Direksi Perusahaan Perkebunan Gemah Ripah.
- 1 Mei 1972: Berdasarkan Akte Notaris Liem Tanudirja, S.H., Pemerintah Daerah Jawa Barat yang diwakili Gubernur Solichin G.P., mengadakan perjanjian kerjasama pengelolaan perkebunan teh Pamegatan dan perkebunan karet Jtinangor dengan PT. Tri Usaha Bhakti Jakarta yang diwakili A.Y. Mokoginta.
- 1 Juli 1972: Pengelolaan perkebunan teh Pamegatan dan karet Jatinangor diserahkan kembali dari PT. Tri Usaha Bhakti kepada Pemerintah Daerah Jawa Barat c.q. P.D. Perkebunan Gemah Ripah yang diwakili H. Rachmat. 4 Mei 1977: Dilakukan kontrak manajemen antara P.D. Gemah Ripah, yang diwakili Akil Nawawi dengan PTP XII di Bandung dengan batas waktu kerjasama sampai 31 Maret 1981.
- 1 April 1981: Manajemen pengelolaan perkebunan teh Pamegatan dikembalikan kepada P.D. Gemah Ripah.
- Agustus 1987: Perusahaan mendapat bantuan dana sebesar 1,3 milyar dari Bank Exim dan melakukan penambahan modal sendiri sebesar 1,2 milyar untuk rehabilitasi perkebunan.
- 1992: Disepakati MoU antara pihak perkebunan dengan PT. Condong Jakarta. Salah satu kesepakatannya adalah PT. Condong akan memberikan pinjaman sebesar 100 juta pada tahun 1993 untuk membayar upah buruh satu bulan menjelang hari raya Idul Fitri, yang dibayarkan bulan April 1999.
- Sebelum 25 Mei 1992: Rakyat mengajukan permohonan hak atas tanah ex perkebunan Pamegatan.
- 25 Mei 1992: Mendagri menjawab permohonan tersebut kepada Jaja bin Meon dengan surat No. 593/1318/ss.
- 1993: Pihak perusahaan, dengan bantuan polisi dan Koramil, mengusir petani dari tanah-tanah garapannya.
- Desember 1993: Dua petani penggarap, EM (43) dan NP (28) penduduk Kampung Cihideung menjadi korban penganiayaan aparat Koramil Cikajang, lalu dibawa dan diserahkan kepada Polres Garut untuk ditahan.
- 28 Maret 1994: Ibu Imas mengirim telegram kepada Pangab Feisal Tanjung sehubungan dengan penangkapan terhadap para penggarap oleh pihak Polres Garut dan keamanan para penggarap.
- April 1994: Para penggarap mengirim surat pembaca ke koran Pikiran Rakyat.

- 5 April 1994: Nyi Imas mengirim surat kepada Presiden RI, Mendagri dan BPN mengenai permohonan hak milik atas tanah negara yang ditelantarkan oleh pihak perusahaan dan dikelola oleh rakyat. Surat tersebut juga melampirkan riwayat PT. Gemah Ripah
- Mei 1994: Surat Administratur Perkebunan Teh Pamegatan kepada Direksi P.D. Gemah Ripah No. 45JPamJ-Keu/VI/1994 tentang ringkasan gaji para karyawan yang harus masih dibayar.
- 3 Mei 1994: DPD Golkar Garut mengirimkan surat No. 92/Golkar-Gei/5/1994 kepada ketua DPD Golkar TK I Jawa Barat sehubungan dengan masalah perkebunan teh Pamegatan.
- 9 Mei 1994: Para penggarap mengirim surat keluhan tentang kondisi mereka ke DPD Golkar Garut.
- 14 Mei 1994: Para buruh Pamegatan mengirimkan surat ke kepala kantor Disbun Prop. DT I Jawa Barat perihal persoalan yang dihadapi para buruh teh Pamegatan.
- 26 Mei 1994: Mamat Rahmat mengirimkan surat kepada Dinas Pemerintahan Daerah Kab. DT II Garut dan DT I Jabar yang berisi informasi dan permohonan untuk membantu mengentaskan kemiskinan yang menimpa para buruh sehubungan dengan gaji yang tidak dibayar.
- Januari 1995: Mamat Rahmat, atas nama buruh perkebunan teh Pamegatan, mengirim surat kepada ketua MPR/DPR RI sehubungan dengan persoalan yang dihadapi para buruh tentang gaji yang tidak dibayar.
- 10 Februari 1995: Tim Komnas HAM melakukan bertemu dengan pihak perusahaan dan Pemda DT I Jabar sehubungan dengan masalah yang dihadapi oleh para buruh perkebunan Pamegatan.
- 27 Februari 1995: FPPMG menyusun tuntutan buruh
  4 Ju1i 1995. Kejari Garut mengajukan tuntutan, surat No. Reg. Perki PIM. 12/Epk/Garut 0195, kepada terdakwa Imat Rahmat bin Parman, Nanang bin Marja, Abu bin Amyasik, Parman bin Padma, Imat bin Parman sehubungan tindakan perusakan terhadap barang berupa pohon teh milik PD Gemah Ripah. Kemudian, melalui surat tuntutan No. Reg. Perk: PIM.13JEpk/Garut 0195 jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa Nandang bin Parman dengan pidana penjara selama satu tahun enam bulan dipotong masa tahanan (JPU Sjamsuddin Partamihardja Nip. 230003870).
- 28 Juli 1995: PT. Perkebunan Condong mengirimkan surat kepada para buruh, No. 01/Pray-O1/VII/1995, tentang pembayaran gaji PD Kerta Gemah Ripah
- 24 Agustus 1995: Putusan Pengadiian Negeri Garut atas nama terdakwa IR, PP, AA, NM.
- 12 September 1995: Para buruh mengirimkan surat kepada gubernur yang berisi tuntutan hak-hak buruh mengenai upah yang tidak dibayar.
- 11 September 1995. KPHKR membuat surat seruan aksi solidaritas untuk buruh Pamegatan
- 12 september 1995. KPHKR membuat surat peryataan sikap tentang persoalan yang dihadapi oleh para buruh Pamegatan

Kronologi Penyurvaian Lahan Garapan Masyarakat oleh Pangdam III Siliwangi untuk Bagunan Battalion 300 Invanteri (batalon baru)

Tanggal 19 maret 2044

Kira - kira pukul 23.00 WIB ada kapal berkelilling - keliling sambil menembakan lampu senter kapal (tidak tahu namanya) tepat ditengah garapan masyarakat di blok Batu Bereum Desa Karyasari dengan saksi mata Kang YN yang kebetulan keluar malam, entah apa maksud dan tujuan serta dari mana kapal tersebut belum diketahui dengan jelas.

Tanggal 3 l maret 2004

Petugas koramil pak Suryaman dan Kosasih datang ke lokasi blok Batu Beureum kebetulan ketemu dengan beberapa penggarap dan sempat ditanya apa maksud kedatangan ke lokasi yang tidak biasanya, mereka (tentara koramil) hanya menjawab akan mengontrol lokasi saja tetapi yang membuat aneh rakyat penggarap tentara tersebut sempat mengabil photo lokasi tersebut. dari kejadian ini rakyat curiga tetapi belum menemukan kebenaran atas kecurigan tersebut

Tanggai 1 april 2004

Tentara dari koramil itu datang kembali ke lokasi dan ini memperkuat kecurigaan masyarakat ada apa sebenarnya hingga dua kali berturut-turut petugas dari koramil datang ke lokasi. Kali ini warga lebih penasaran untuk bertanya lebih jelas kepada petugas tersebut tentang maksud kedatangannya, tentara tersebut hanya menjawab ini hanya survai tidak ada jawaban yang jelas untuk apa survai itu. kejadian itu membuat resah rakyat ada apa sebenarnva

Tanggat 2 apri12004

Sekitar jam 07.00 pagi penggarap tiba-tiba dikejutkan oleh serombongan tentara sudah berada di lokasi blok G sedang melakukan pengekeran dan pemasangan umbul- umbul di perbatasan blok C dan blok B. menurut saksi jumlah rombongan tersebut sekitar ..... orang dengan memakai kendaraan mobil dinas tentara 9 mobil (empat bus dan lima mobil sejenis kijang) ditambah intansi dari BPN, pihak kecamatan, malahan ada pihak perkebunan (ADM pun hadir disitu)

Sekiatr jam 08.00, spontan warga penggarap yang melihat kejadian tersebut kepada rakyat pengarap yang lain bahwa di lokasi blok C ada yang rombongan tentara yang awalnya tidak diketahui maksud dan tujuanya serta dari kesatuan mana, tanpa di komando rakyat penggarap sudah berada dilokasi garapan dan langsung mengejar petugas dengan barisan terdepan kaum perempuan diikuti oleh anak-anak dan laki-laki berjumlah kurang lebih 100 orang tujuannya untuk mencari keterangan yang jelas tentang maksud rombongan berada disitu, namun sebelum rakyat sampai ke lokasi blok C mereka langsung pergi lagi karena melihat massa yang terus bergerak menuju ke arah ombongan tentara dan menurut saksi lain bahwa mereka berkonsentrasi di perkebunan PTPN VIII Nagara karena dalam rombongan tersebut ADM PTPN VIII BULE pun ikut. Karena rakyat penggarap tidak bisa mendapatkan keterangan dari rombonan tentara akhirnya rakyat bergerak ke desa untuk mencari tahu tentang maksud dan tjuan rombongan tersebut karena rakyat yakin pihak desa pasti sudah dikasih tembusan minimal diberitahu, tapi nyatanya desa pun tidak diberitahu, menurut PN kepala Desa Karyasari *"desa oge teu apal ..."*, sekitar satu jam kemudian ada surat dari LAPAN PAMEUNGPEUK yang ditujukan kepada ketua SPP Karvasari supaya menghadiri pertemuan dengan Pangdam III SILIWANGI berikut kepala desa. Sayangnya pertemuan tersebut tidak bisa diikut karena YN dan TT datang setelah jumaatan sementara pertemuan sekitar jam 10.00 itupun tidak lama hanva 1 menit dan tidak sempat ada dialog hanya himbauan dari pangdam bahwa ada lokasi yang akan di jadikan markas (batallion baru) 300 invanteri di tiga titik, pertama di Tegatlawang (Kiarakohok) kecamatan Cikelet, kedua di Condong masih di Cikelet. Lokasi ketiganya di desa Karyasari tepatnya di blok Batu Beureum kec. Cibalong (ns. Kepdes Karyasari) jadi belum ada lokasi yang pasti dan rencana pembangunannya pun tidak diberitahukan,

Tanggal 3 April 2004

Sekitar jam 11.00 kawan - kawan dari FPPMG mendatangi pihak Koramil untuk meminta keterangan lebih lanjut tantang rencana pembangunan Battalion tersebut. Menurut keterangan CC bekas BABINSA Karyasari yang kebetulan berada di kantor bahwa pembanguan itu benar akan dilaksanakan tapi mungkin tahun 2005 dia belum bisa memastikan, soal lokasipun belum ditentukan artinya rencana ini belum final tetapi lokasi yang tiga itu memang sudah di survai oleh Pangdam III SILIWANGI Mayjen. Iwan, keterangan lain bahwa lokasi blok Batu Beurerum yang menjadi lokasi berdasarkan koordinasi antara pihak kebun dan Pangdam karena sebelun rombongan menuju lokasi suavai terlebih dahulu singgah di perkebuann PI'PN VIII kantor utama di Cisompet dan pihak kebun merespon rencana Pangdam untuk mendirikan markas baru dilokasi blok Batu Beureum. Demikian kronoligi rencana tentara mendirikan markas baru dan data yang terhimpun masih mimin artinyra perlu kros cek ke berbagai pihak, sampai kronoligi ini ditulis belum ada kepastian yang jelas tantang rencana pembangunan markas militer baru

Kronologi Kasus Tanah Masyarakat Kampung Pengkolan Desa Margamulya Kec. Cikajang

Tahun 1957. Lahan di tebang habis oleh Jawatan Kehutanan blok Pasir Buntu, Cagak Gunting. Masyarakat sekitar hanya mempunyai mata pencaharian sebagai tukang arang yang di suruh oleh Jawatan

Tahun 1958. Lahan tersebut di garap oleh masyarakat blok Cagak Gunting, Pasir Buntu 60 Ha digarap oleh Masyarakat, adapun jenis tanaman yang di tanam yaitu: Jagung, ketumbar, jocong, bako, kacang. Dan cara penanaman haya dilakukan lewat tumpangsari

Tahun 1968. Lahan Garapan masyarakat di tanami oleh Pihak Jawatan. Adapun jenis tanamannya yaitu: Pinus, Alkasih

Tahun 1973. Lahan garapan di kuasai oieh Pihak perum Perhutani

Tahun 1999. Lahan di tebang oleh Pihak perum Perhutani dan Para Bandar liar yang bekerja sama dengan Oknum aparat lainnya

Tahun 2000. Lahan tersebut di Garap kembali oleh para penggarap yang ada di sekitarnya sampai terjadi oerasi Wanalaga Lodaya

Tahun 2003. Terjadi Uperasi wanalaga Ladaya yang menyingkirkan masyarakat dari lahan garapan, dan masyarakat berhenti melakukan penggarapan selama aperasi Wanalaga Lodaya ; berlangsung

Tahun 2004. Operasi Wanalaga Lodaya berakhir, masyarakat kembali naik ke gunung untuk melanjutkan penggarapan yang sebelumnya

Sejarah Tanah PT. Condong

1918 : Pemerintah Belanda datang ke Kampung Cimangir dengan maksud akan membuka perkebunan seluas 3 garis (1 garis = 1 Ha 20 are; total 7 Ha) di kampung tersebut. Karena ternak tak boleh keluar masuk kebun, maka ternak masyarakat ditembak oleh Tuan Redel. Selain itu karyawan kebun sering mengambil paksa makanan dari masyarakat seperti gula, beras, kelapa.

1937 : Karena masyarakat merasa tidak aman dan Tuan Redel mengatakan bahwa tanah tersebut sudah dibeli sehingga ia menyuruh masyarakat pindah ke daerah Rancakole, maka masyarakat pindah dan Rancakole menjadi kampung. Ternyata Rancakole adalah tanah negara, sehingga ketika masyarakat membuka lahan itu, seorang akhirnya ditahan selama 15 hari.

Kampung Cimangir adalah tanah adat yang memiliki satu IPEDA atas nama Aki Muryasik. Meskipun sudah pindah kampung, pajaknya masih dibayar. Tapi lama kelamaan masyarakat merasa rugi membayar pajak atas tanah perkebunan.

1957 : Karena kesal bukti IPEDA tersebut dibakar aleh Aki Onadin. (Waker Pak Idon dan Mang Ena -pembantu satpam, menjelaskan bahwa dalam Blad Perkebunan Afd. Gunung Kembar yang diperlihatkan oleh Pak Ara yaitu tukang ukur di perkebunan, tanah seluas 7 Ha sebelah barat dan timur jalan itu adalah tanah milik. Tukang ukur perkebunan sebelum Ara adalah Aos yang mengatakan kepada Waker Idon bahwa benar itu adalah tanah milik dengan bukti adanya tanaman kelapa, petal, pahon buah-buahan, dan pekuburan.

Pihak perkebunan mengatakan bahwa tanah Cimangir ditukar dengan Sawah Landeuh. Namun sebenarnya, sebelum ada perkebunan pun Sawah Landeuh sudah digarap oleh masyarakat Cimangir dengan bukti IPEDA tahun 1978 - sekarang (Ipeda dipegang Usup).

1972 - 1990 : diterlantarkan oleh perkebunan dan digarap oleh masyarakat dengan membayar sewa kepada Pak Salim yang mengurus administrasi dan Mandor Besar Omo, dan yang menarik sewa Halim. Sewa bervariasi mis. 4 kg kacang tanah per patok atau 2 ikat padi per patok, bervariasi tergantung kedekatan pada pengurus kebun. Masyarakat setempat sejahtera karena bisa membangun rumah di daerah Rancakole, dan bisa membeli tanah di daerah Jaringao.

1988 : perkebunan PT Condong menggarap kembali perkebunan. Masyarakat dilarang menggarap.

Masyarakat diperbolehkan menggarap lahan yang belum digarap perkebunan yaitu (perkebunan mulai menggarap 470) 380 Ha di Batu Belang, Panguyangan Bogo, Gunung Masigit, Pamoyanan, Cikoromong, Taratas, asal kalau dibutuhkan, masyarakat siap membantu pekerjaan perkebunan yaitu membabat, diteras (diratakan untuk dibuat lubang untuk tanaman karet), membuat lubang untuk tanaman karet, dengan dibayar.

1990 : masyarakat sama sekali tidak bisa menggarap karena masyarakat lebih menghabiskan waktu untuk mengurus tanaman miliknya sendiri dan tidak bekerja di perkebunan, bahkan pihak perkebunan melarang masyarakat menggarap. Masyarakat akhirnya beralih menyewa ke tanah pangangonan. Perkeluarga menyewa 1,5 patok, harga sewa per patok 4 kg kacang tanah. Karena lahannya sangat kecil dan sangat jauh serta hasilnya tidak memadai, maka masyarakat kemudian beralih menjadi karyawan kebun, sebagian berangkat ke kota.

1999 : Begitu minimnya penghidupan masyarakat, masyarakat sampai mengalami kelaparan, kalau saja tidak ada bantuan dari Bulog.

Bulan Juli 2000 : sebelum Sidang Tahunan MPR, 5 orang dari Bungbulang berangkat ke Jakarta mengikuti aksi ke BPN dan MPR. Kembali, menyebarkan brosur tentang pembaruan agraria. Babinsa Tolib dan (mengaku) perwakilan Kodim Dedi datang ke rumah US. Dedi mempertanyakan izin pemasangan brosur, cukup di rumah sendiri, dan brosur yang sudah menyebar harus ditarik kembali. Tentang perkebunan, karet adalah kornoditi yang dibutuhkan di pasar internasional.

Tapi karena brosur tidak ditarik, lalu ada undangan pertemuan di desa, Kades Tegalega dan Sinar Jaya, ADM Ade Mahyar, Babinsa, Mandor, Satpam, kepala bagian kebun, dan wakil masyarakat serta buruh masyarakat yang tidak dibayar. Masyarakat mengungkapkan alasan kenapa mereka menuntut tanah karena jengkel terhadap perkebunan yang tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Bayaran masyarakat yang bekerja di kebun seringkali telat, bahkan ada utang setahun bekerja tidak dibayar sebesar Rp470 ribu. Dalam pertemuan itu ADM menyalahkan kepala bagian dan kontraktor.

Masalah tanah yang muncul saat itu adalah tanah milik pribadi AD yang dikuasai oleh perkebunan. Tanah itu ber-SPPT dan dibayar tiap tahun. Sudah diperjuangkan sejak Lurah Uu (1985-1995) dan tidak ada hasilnva, maka sekarang AD meminta langsung kepada kebun. Karena itu adalah milik maka AD mengatakan akan membabat karet yang ada di tanahnya. ADM mencegah.

Datanglah Pak Ara (pengukur), kemudian karet sebesar betis dibongkar (kl 200 pohon) oleh karyawan dan dipindahkan ke lokasi di sekitar itu. Selain itu uang Rp470 ribu dibayar. Sedangkan upah lain yang belum dibayar sejumlah Rp2 juta yang nyangkut di kontraktor yang adalah masyarakat setempat, tidak dikembalikan.

Perkebunan kemudian mengeluarkan pernyataan memperbolehkan masyarakat menggarap lahan kosong dan lahan yang pohon karetnya masih kecil, dengan bagi hasil. Tapi sejak tahun 2001 masyarakat Rancakole menolak membayar sewa dan perkebunan tidak berani meminta.

Kronologi Kasus Tanah Sagara

1984: Petugas planologi kehutanan Perum Perhutani Unit III Jawa Barat datang ke lokasi dan menyatakan daerah tersebut sebagai kawasan hutan. Selanjutnya mereka membuat batas hutan yang di dalamnya terdapat tanah masyarakat (adat). Hal ini disetujui oleh kepala desa yang baru terpilih. Rakyat protes, namun tidak ditanggapi. Rakyat malah ditekan. Tanaman-tanaman rakyat, yang terdapat di areal gunung Peer seperti padi dan pisang, dihancurkan oleh Perhutani. Rakyat bersama dengan kepala desa mempertanyakan kepada kantor agraria. Diperoleh keterangan bahwa tanah yang di klaim dinas Planologi Jawatan Kehutanan pada waktu itu (sekarang Perum Perhutani) adalah tanah negara yang pernah dimohonkan oleh perkebunan swasta Belanda dan terdaftar dalam surat ukur N. 31-32-33 tahun 1927. Atas dasar keterangan di atas, kepala desa berdasarkan surat No. 059/11/84 menyampaikan keberatan kepada Muspika, namun hasilnya tidak mendapat jawaban.

1985: Seorang tokoh masyarakat bernama Kin ditangkap. Kemudian menyusul seorang lagi ber-

nama Ule. Keduanya ditahan selama tiga minggu atas dasar tuduhan mencuri dan menebang kayu milik perhutani

1986: Kepala Desa kembali menyampaikan keberatan terhadap Muspika, serta menyampaikan surat permohonan pemilikan tanah atas tanah negara tersebut yang pada waktu itu digarap oleh ± 500 KK.

1987: Jawatan kehutanan (Asper Pameungpeuk) melakukan penebangan kayu jati yang ada di areal tersebut tanpa koordinasi dengan aparat desa. Selanjutnya di areal tersebut ditanami kembali pohon jati dan mahoni. Pekerjaan ini menggunakan tenaga rakyat secara cuma-cuma. Hanya sebagian kecil yang mendapatkan imbalan, yaitu diperbalehkan melakukan tumpangsari di areal tersebut.

1988: Terjadi bencana kelaparan karena musim kemarau panjang. Masyarakat yang harus mempertahankan hidupnya mengggarap areal tersebut secara sembunyi-sembunyi. Namun tercatat 26 penggarap yang ditangkap, ditahan baik oleh Polsek, Polsus hutan maupun Mapolsek Pameungpeuk selama lebih kurangg satu minggu

1989: Tiga orang warga, OM, SR dlan BR, diculik oleh pihak Polres Garut sekitar pukul 23.00 dan selanjutnya ditahan di rutan garut dengan tuduhan merusak dan mencuri tanaman milik Perhutani. Penangkapan ini menyebabkan rakyat menjadi ketakutan.

31 Juli 1989: Seorang warga, Yoyon bin Oon, diminta menghadap PPNS/Kantor Perhutani SKPH Pameungpeuk, JI. Raya Pameungpeuk No. 233, dengan alasan penyerobotan tanah hutan Blok Ciniti, melanggar Pasal 9 ayat 1, Pasal 6 ayat 2 PP No. 28 Tahun 1985. Surat panggilan ditandatangani oleh KBKPH/PPNS Utja Apandi selaku penyidik.

November 1989. Seorang warga, A. Hobir, dipanggil untuk menghadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Ajun Adm. KSKPH Garut Selatan KBKPH Hasan A. Satjadibrata BSc., berdasarkan Surat Panggilan No. 175/SP/XIJPPNS/1989

29 November 1989. Keluar surat penangkapan No./SPP/XI/1989 oleh Kepala satuan Reserse Polres Garut Ade Sukandi yang ditujukan kepada Bahri bin Ahmad dengan tuduhan pencurian kayu dan pengerjaan tanah hutan tanpa izin.

Desember 1989. Pihak Perhutani melayangkan kembali surat panggilan No. 190/SP/XIIJPPNS/1989.

1 Desember 1989. Tiga orang warga ditangkap oleh Palres Garut dengan tuduhan yang tidak jelas.

11 Desember 1989. Seorang warga,_ Udju, beralamat di kampung Cioa, diminta menghadap Penyidik pegawai Negeri Sipil kantor Perhutani Garut Hasan A. Satjadibrata BScf, berdasarkan Surat Panggilan No 183JSPJXIJPPNS/1989. Udju dipanggil sehubungan dengan pengerjaan tanah kehutanan tanpa izin.

10 Januari 1990. Diadakan pertemuan Tim dari Manwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat, Kepala desa dan BPN Kab. Garut dengan No. oo5J27JKPKJ1990

- Surat panggilan No. Pal. 13/SPJIJ1990/Serse yang ditujukan kepada Deni, untuk menghadap kepada penyidik pembantu Ign. Suabawa di Kepolisian Sektor Pameungpeuk, pada hari selasa tanggal 23 Januari 1990 jam 0$.00.
- Surat panggilan No. Pol. 15JSPJIJ1990/Serse yang ditujukan kepada Saja, untuk menghadap kepada penyidik pembantu Ign. Suabawa di Kepolisian Sektor Pameungpeuk, pada hari selasa tanggal 23 Januari 1990 jam 08.00.
- Surat panggilan No. Pal. 20/SPJIJ1990/Serse yang ditujukan kepada Ook, Kp. Karees, yang bekerja sebagai Punduh Karees untuk menghadap ke penyidik pembantu Ign. Suabawa di Kepolisian Sektor Pameungpeuk, pada hari seiasa tanggal 23 Januari 1990.
- Surat Panggilan No. Pol. 21/SP/IJ1990 yang ditujukan kepada Iim (guru SD) untuk menghadap kepada penyidik pembantu Ign. Suabawa di Kepofisian Sektor Pameungpeuk pada hari selasa tanggal 23 Januari 1990 jam 08.00.
- Total jumlah orang yang dipanggil adalah 28 orang.

2 Maret 1990. Ny Popon binti Amirin mengajukan surat permohonan pembebasan suaminya, Saja bin Awo, ke Kapolres Garut mengingat tanggung jawab seorang suami kepada keluarganya. Permahonan ini tidak dikabulkan.

30 Maret 1990. Penangkapan terhadap Imid, Kepala Desa Sagara, melalui Surat perintah penangkapan No. Pol. 61/A.501/III/1990/Serse yang dikeluarkan oleh Letkol. A. Somantri Emay, Kepala Kepolisian Resort Garut. Tuduhannya adalah tindak pidana pencurian kayu milik Perhutani sebagaimana diatur dalam pasal 363 KUHP. Dalam persidangan, Imid dijatuhi hukuman 1 tahun penjara. Sekarang kasusnya dalam tahap kasasi.

Maret 1990. Agustiana, pendamping masyarakat, ditahan selama beberapa hari oleh aparat. Surat Panggilan No. 24/SP/VIII/94 yang ditujukan kepada Neah, Kp. Ciniti, untuk menghadap kepada Penyklik Pegawai Negri Sipil Nana Rukanna B.Sc.F. di Kantor Perhutani Garut pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 1994. Tersangka Sumarna bin Uha, Kp. Ciniti, dengan Surat Panggilan No. Pal. 13/SP/VII/1995/ Serse, ditangguhkan penahanannya atas jaminan Muhdin, Kp. Ciniti. Adim Sumardin bin Emud yang juga ditahan oleh pihak kejaksaan Garut di mohon oleh Agustiana sebagai penjamin untuk memperoleh jaminan tahanan luar sehubungan dengan tanggung jawab yang sangat besar yang diperlukan oleh keluarganya pada tanggal 16 April 1990. Rakyat mengadukan Perhutani ke Kepala Kejaksaan Negeri Garut untuk membentuk tim penyelidik terhadap pihak Perhutani Tingkat Asper Pameungpeuk ataupun tingkat Unit II Garut, sehubungan dengan berbagai tindakan yang dilakukan pihak Perhutani terhadap masyarakat seperti di bawah ini:

Menggusur masyarakat penggarap dari tanah negara yang telah lama digarap afeh masyarakat dengan tuduhan yang selalu berubah, mulai dari tuduhan merusak tanaman milik kehutanan, mencuri jati ataupun merusak lingkungan hidup.

Mengambil kayu milik negara yang ada di atas tanah tersebut, serta mengambil kayu jati milik masyarakat yang ditanam di atas tanah negara.

Menangkapi clan menahan masyarakat dengan jalan membuat berita acara piktif serta tanda tangan palsu

Memanipulasi informasi terhadap Bapak Gubernur DT I)awa Barat, yang mana telah dilaporkan persengketaan masyarakat sagara clan Perhutani, berlokasi di blok Pasir Salam, padahal blok tersebut berada jauh di luar desa.

Memungut pajak sewa tanah dari masyarakat sebagai pajak tumpang sari. Laporan kepada kejaksaan negeri Garut ini tidak jelas tindak lanjutnya.

1995. Penggusuran dua rumah warga, Aah clan Emeh, yang dilakukan oleh Muspika clan Perhutani. Tidak dilantiknya Imid, Kades terpilih dalam piikades Sagara 28 Desember 1994, oieh pihak pemerintahan karena proses peradilan atas diri Imid S masih menunggu keputusan Kasasi dari Mahkamah Agung.

28 Juli 1995. Penghadangan terhadap aksi rakyat untuk menuntut dilantiknya Imid sebagai kepala Desa Sagara kepada DPRD Garut. Dalam penghadangan ini, seorang aktivis FPPMG di cekik lehernya oleh aparat kepolisian hingga merah clan tidak bisa bersuara.

1997. Akhirnya apa yang menjadi harapan rakyat selama ini terwujud dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/BPN Nasional No. 35-VI-1997 tentang Penegasan Tanah Negara sebagai Objek Pengaturan Penguasaan Tanah Landreform seluas 578.7100 Ha di desa Sagara dan Karya Mukti. Selanjutnya dilakukan pengukuran dan pensertifikatan tanah milik rakyat seluas 1100 Ha.

Asal - usul tanah di blok Santogo wilayah Perhutani desa Sukawargi kecamatan Cisurupan Garut

pada tahun 1955, masyarakat mulai menggarap di wilayah kehutanan di blok santogo dengan ditanami kayu raksamala dengan tumpangsari tembakau , jagung kentang dan kacang - kacangan.

Pada tahun 1968, hutan di tanami murben oleh pihak perhutani dan masyarakat menggarap secara tumpangsari dengan jenis tanaman sayur mayur

Pada tahun 1975, hutan dikelola kembali oleh perhutani dengan tanaman kayu pinus dan di tutup selama 8 tahun. Tanaman kayunya di sebut banjar anyar

Pada tahun 1983, di garap kembali oleh masyarakat dengan cara tumpangsari sayur mayur

Pada tahun 1986, pihak perhutani menyewakan tanah tersebut kepada masyarakat dengan harga Rp100.000/Ha

Pada tahun 1993, adanya perhutanan sosial (PS) kayunya pinus 70 % dan tumpang sarinya sayur mayur dan kayunya adalah secara swadaya yang dilakukan oleh masyarakat

Perkembangan terahkir

Semenjak adanya operasi Wanalaga Lodaya, sebagian besar masyarakat meninggalkan garapannya termasuk tanaman perhutanan sosial yang di janjikan 25 tahun baru 10 tahun sudah di tinggalkan.

Kondisi masyarakat pada saat ini secara ekonomi mengalami keterpurukan dikarenakan masyarakat tidak dapat menggarap lahan.

Kronologi Singkat Tanah dan Perhutanan Sosial di Desa Sukawargi, Cisurupan, Garut

Pada tahun 1955, (pasca kemerdekaan dan nasionalisasi tanah) masyarakat mulai menggarap di wilayah kehutanan di blok Santogo dengan ditanami kayu raksamala dengan tumpangsari tembakau, jagung dan kacang-kacangan.

Tahun 1968, hutan ditanami murben oleh pihak Kehutanan dan masyarakat masih menggarap secara tumpang sari dengan jenis tanaman sayur mayur.

Tahun 1975, hutan dikelola oleh Perum Perhutani deugan tanaman kayu Pinus dan garapan ditutup selama 8 tahun. Tanaman kayunya disebut hanyar harian.

Tahun 1983, masyarakat kembali menggarap dengan cara tumpangsari dengan jenis sayur-mayur.

Tahun 1986, pihak Perum Perhutani menyewakan tanah tersebut kepada masyarakat denan harga Rp100. 000/Ha.

Tahun 1990 masyarakat mulai menggarap di blok Santogo melalui kerjasama dengan pihak Perum Perhutani dengan pola perhutanan sosial jangka kontraknya selama 25 tahun. Perhutanan sosial adalah sama hakekatnya dengan tumpang sari dimana jarak tanam ditentukan oleh pihak Perum Perhutani yaitu 3 x 6. Luas lahan yang di PS-kan sekitar 50 Ha yang digarap oleh 200 orang (125 bata/penggarap).

Tahun 1993, ada program Perhutanan Sosial (PS) dengan komposisi 70 % kayu pinus sisanya tumpangsari sayur- mayur dan penanaman kayu secara swadaya yang dilakukan oleh masyarakat.

Tahun 2003 ketika ada Operasi Wanalaga Lodaya dimana masyarakat harus keluar dari lahan garapan baik yang menggarap dihutan lindung ataupun dihutan produksi meskipnn operasi tersebut hanya untuk hutan lindung saja kesepakatan tentang Perhutanan Sosial pun batal (tidak berlaku lagi).

Tahun 2004 masyarakat penggarap desa Sukawargi mengajukan keberatan kepada pihak Pemda Garut atas ditutupnya lahan garapan sehingga banyak masyarakat yang kehilangan mata pencaharianya alias ngangur. Keberatan itu disampaikan pada acara audensi antara masyarakat sekitar desa hutan dan Pemda Garut guna menemukan titik temu penyelesaian konflik hutan di Garut.

Lampiran 2
Daftar Nama Anggota SPP yang Ditangkap dalam Operasi Wanalaga Lodaya

Daftar Nama Petani yang Ditangkap dan dijadikan Tersangka dalam Operasi Wanalaga Lodaya

No	Nama	Umur	Alamat	Pekerjaan
1	Ema Bin Sumarta	43 Tahun	Nagrog Sukamenak Wanaraja	Buruh tani
2	Abdul Rosid Bin Ehon	51 Tahun	Kp. Muklar RT 04 RW 02 Desa Sarimukti Kecamatan Pasirwangi	Buruh tani
3	H. Herman Bin H. Odi	41 Tahun	Kp. Cimalaka Sukamenak Wanaraja	Buruh tani
4	Dede Madin Bin Mamad	27 Tahun	Kp. Sarimukti RT 01 RW 02 Desa Sarimukti Kecamatan Pasirwangi	Buruh tani
5	Ayi Sapudin Bin Mamad	26 Tahun	Kp. Sarimukti RT 01 RW 02 Desa Sarimukti Kecamatan Pasirwangi	Buruh tani
6	Upar Bin Udin	30 Tahun	Kp. Sarimukti RT 01 RW 02 Desa Sarimukti Kecamatan Pasirwangi	Buruh tani
7	Edih Bin Etis	32 Tahun	Sarimukti RT 01 RW 02 Desa Sarimukti Kecamatan Pasirwangi	pedagang
8	H. Aa Suherman Bin Imin	36 Tahun	Sarimukti RT 01 RW 02 Desa Sarimukti Kecamatan Pasirwangi	Buruh tani
9	Ade Nadin Bin H. Sopandi	43 Tahun	Kamp. Jalan Cagak Desa Karamatwangi Kecamatan Cisurupan	Buruh tani
10	Ecu Bin Sahri	50 Tahun	Kamp. Jalan Beuneur Desa Karamatwangi Kecamatan Cisurupan	Buruh tani
11	Mahdan Bin Sail	52 Tahun	Kampung Leuwipari RT 05 RW 08 DEsa Sagara Kecamatan Cibalong	Buruh tani
12	Entis Sutisna Bin Momod	43 Tahun	Kampung Leuwipari RT 05 RW 08 DEsa Sagara Kecamatan Cibalong	Buruh tani
13	Atan Bin Sarip	34 Tahun	Kampung Leuwipari RT 05 RW 08 DEsa Sagara Kecamatan Cibalong	Buruh tani
14	Kasim Bin Jono	53 Tahun	Kampung Sukalaksana RT 10 RW 06 Desa Sancang Kecamatan Cibalong	Buruh tani
15	Kosasih Alkosasih Bin Mahya	50 Tahun	Komplek Nelayan RT 23 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cikelet	
16	Salim Bin Dai	85 Tahun	Kampung Sukalaksana RT 04 RW 06 Desa Sancang Kecamatan Cibalong	Juru Kunci
17	Adang Suryadi Bin Marnasin	62 Tahun	Kamp. Cilampadan RT 04 RW o6 Desa Sancang Kecamatan Cibalong	Juru Kunci
18	Soleh Bin Murnawi	73 Tahun	Kampung Sukalaksana RT 04 RW 06 Desa Sancang Kecamatan Cibalong	Juru Kunci
19	Habib Bin Mahri	45 Tahun	Kampung Sukahideung RT 012 RW 04 Desa Sancang Kecamatan Cibalong	Buruh tani
20	Sukmajaya Bin Suryana	37 Tahun	Kampung Sukahideung RT 012 RW 04 Desa Sancang Kecamatan Cibalong	Buruh tani
21	Iya Iding Bin Ucung	35 Tahun	Kampung Leuwipari RT 05 RW 08 DEsa Sagara Kecamatan Cibalong	Buruh tani
22	Uloh	45 Tahun	Kampung Leuwipari RT 05 RW 08 DEsa Sagara Kecamatan Cibalong	Buruh tani

Kronologi Penangkapan yang Dilakukan oleh Aparat Gabungan (Polda Jabar, Brimob, Polres Garut, Polisi Hutan, BKSDA, dll.) dalam Operasi Penertiban Kawasan Hutan di Kabupaten Garut

Tanggal 12 Juni 2002

Dengan bertempat di Pendopo Garut Salihin GP melakukan pertemuan dengan Pemda Garut, dalam pertemuan tersebut Solihin GP meminta Pemda Garut dan seluruh elemen masyarakat yang ada di kabupaten Garut mulai dari LSM dan aparat militer untuk mengusir penggarap dari lahan kehutanan di wilayah-wilayah Gunung Papandayan, Gunung Talaga Bodas dan Sancang, pada tanggal ini mereka membuat kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh :

1. Kepala BKSDA Garut
2. Administratur PT Perhutani Garut
3. Kepala Dinas Perkebunan clan Kehutanan Kabupaten garut
4. Kepala BPLH Kabupaten Garut
5. Ketua Bappeka Kabupaten Garut
6. Ketua Bawasda Kabupaten Garut
7. Presidium Forum terbuka Kerusakan hutan Kabupaten garut
8. KTNA kabupaten Garut
9. KPSA Kabupaten garut
10. Kelompok Bina Tani Kabupaten garut
11. Kelompok Tani penghijauan Kabupaten garut
12. Yayasan Gema Intan Mandiri Kabupaten garut

Tanggal 20 Juni 2002

BKSDA menawarkan kerja sama dalam penanganan kasus kerusakan hutan di Sancang, saat itu masyarakat siap membantu BKSDA untuk melaporkan siapa saja yang telah melakukan penebangan kayu secara liar dan mengusir para penebang liar, tapi inisiatif ini ternyata oleh pihak BKSDA tidak terlalu diperhatikan

Agustus 2002

Rumah-rumah para penggarap dibakar dan lahan masyarakat dirusak oleh gabungan BKSDA dari Pangandaran dlan Cimahi

Nopember 2002

Gunung Papandayan meletus, Perhutani mulai melakukan penebangan pinus

Mei 2003

Solihin GP melalui Koran mengancam akan mendatangkan pam swakarsa dan para pecinta alam yang ada di Jawa Barat dan para aparat dari Polda Jabar untuk melakukan pengusiran kepada para penggarap yang ada di wilayah Talaga Bodas, Papandayan, Darajat dlan Sancang dengan cara kemping selama 1 bulan

3 April 2003

SPP melayangkan surat protes kepada Polda Jabar dlan presiden RI untuk membatalkan niat tersebut karena upaya represif aparat dlan keterlibatan masyarakat luar tidak akan menjawab persoalan kerusakan hutan.

Tanggal 11 Agustus 2003, Jam 09.00

Aparat Gabungan meluncur menuju lokasi wilayah hutan yang akan ditertibkan, ke wilayah Gn. Papandayan (Lokasi Desa Sarimukti, Kec. Pasirwangi, Kab. Garut) sekitar 300 orang, kurang lebih 80

truk), sedangkan yang meluncur ke wilayah Sancang (Lokasi Desa Sagara, Kec. Cibalong, Kab. Garut) sekitar 200 orang, dilakukan sebelumnya yaitu tanggal 10 Agustus 2003, tengah malam. Seluruh aparat gabungan dipersenjatai lengkap dengan senjata laras panjang dlan pistol juga peta lokasi. Pada malam tanggal 12 Agustus 2003, aparat gabungan sudah membuat Tenda Penampungan untuk kepentingan Operasi di tiap2 Lokasi.

Tanggal 12 Agustus 2003, jam 10.00

LOKASI : Desa Sarimukti, Kec. Pasirwangi, Kab. Garut

Aparat Gabungan Menangkap 35 orang petani yang sedang menggarap lahannya, di Lokasi Blok Likap (PLTP Darajat II) desa Sarimukti, Kec. Pasirwangi, Kab. Garut, mereka ditangkap tanpa alasan yang jelas, 35 orang tersebut adalah sebagai buruh tani, tukang mikul, penggarap, bandar dan penampung sayuran, tapi yang berhasil teridentifikasi adalah sebagai berikut :

No	Nama	Umur	Alamat	Keterangan
1	KA	36	Desa Sarimukti	Pemilik lahan
2	AY	25	Desa Sarimukti	Petani
3	DD	27	Desa Sarimukti	Petani
4	UP	25	Desa Sarimukti	Buruh tani
5	ED	30	Desa Sarimukti	Bandar

Menyusul berikutnya 3 orang penggarap, warga Kampung Muklar, Desa sarimukti, Kecamatan pasirwangi, Kabupaten Garut yang ditangkap di Gunung Talaga Bodas, di Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut, yakni,

No	Nama	Umur	Alamat	Keterangan
1	EP	60	Desa Sarimukti	Petani
2	CC	22	Desa Sarimukti	Buruh Tani
3	KM	40	Desa Sarimukti	Petani

Tanggal 12 Agustus 2003, jam 12.00

LOKASI : Desa Sancang & Sagara, Kec. Cibalong, Kab. Garut

Aparat Gabungan Memasuki kawasan BKSDA Cijeruk, kec. Cibalong, Kab. Garut, dengan persenjataan lengkap (laras panjang dan pistol) juga dibekali peta, melakukan penyisiran di wilayah tersebut untuk menangkap Penggarap yang sudah masuk Target Operasi (TO) yang daftarnya sudah mereka pegang, mereka akan mengejar sampai ke rumah-rumah penggarap (sumber : Warga desa Karyasari, kec. Cibalong, Kab. Garut, yang berprofesi nelayan di Cijeruk).

Informasi sampai jam 12.00 WIB (13-08-2003) ada 8 orang yang ditangkap, dan semua jalan masuk di kecamatan Cibalong sudah diblokir oleh aparat Gabungan, berikut 8 penggarap yang ditangkap adalah sebagai berikut :

No	Nama	Umur	Alamat	Pekerjaan
1	EC	45	Desa Mancagahar	Nelayan
2	ED	45	Desa Sagara	Buruh tani
3	SP	50	Desa Pameungpeuk	Buruh tani
4	JM	55	Desa Cikelet	Buruh tani
5	YY	50	?	Buruh tani
6	MD	50	Desa Sagara	Buruh tani
7	ET	40	Desa Sagara	Karyawan perkebunan
8	AT	40	Desa Sagara	Nelayan

Kelima orang yang disebutkan pertama ditangkap, sekitar jam 11.00 (12-08-2003), yang berpro-

fesi buruh tani mereka sedang menggarap lahan, sedangkan satu orang nelayan yang ditangkap adalah benar-benar nelayan yang waktu itu sedang beristirahat (tidur) sehabis pulang melaut. Sebelum dibawa oleh aparat, kelima orang tersebut dipekerjakan dulu untuk mengangkut kayu sebanyak 3,5 kubik yang waktu itu berada di tempat tersebut.

Sedangkan ketiga orang yang disebut terakhir, prases penangkapannya, dijemput dari rumah masing2 oleh BANPOL Pameungpeuk sebanyak 2 orang, saat ini ke delapan orang tersebut masih ditahan di POLSEK Pameungpeuk untuk dimintai keterangan.

Tanggai 13 Agustus 2003 jam 16.00

Petani yang ditahan sekitar 42 orang di POLRES Garut ditambah 6 orang yang ditahan di POLSEK Pameungpeuk (Sumber : Muhendi, yang datang langsung ke POLRES Garut

Jam 20.00 WIB

Dua orang petani kembali ditangkap oleh beberapa orang dari aparat Brimob POLDA JABAR, sekarang mereka ditahan di POLSEK Pameungpeuk, kedua orang tersebut adalah :

No	Nama	Umur	Alamat	Pekerjaan
1	IY	35	Desa Sagara	Nelayan
2	UL	45	Desa Sagara	Petani

Kondisi terakhir di Kp. Lewipari, desa Sagara Kec. Cibalong, orang yang bukan warga asli daerah :rsebut tidak dapat masuk ke Lewipari, karena langsung dicurigai, sementara POLSEK Pamengpeuk uga tidak dapat dimasuki oleh sembarang orang, walaupun itu lurah Desa Sagara sekalipun.

Jam 21.00

Petani yang tertangkap di Karamatwangi kaki Gunung Papandayan sebanyak 4 orang adalah :

No	Nama	Umur	Alamat	Pekerjaan
1	EU	?	?	Petani
2	ED	?	?	Bandar

Lampiran 3
Isian Lembar Evaluasi di Beberapa OTL

Lembar Evaluasi OTL SPP

Nama OTL :
Alamat OTL :

I. Tentang Organisasi

- Bagaimana Perkembangan OTL ? Ada kemajuan
- Apakah ada penambahan anggota ? berapa jumlahnya ?
- Apakah ada penurunan anggota ? kalau ada kenapa ? berapa penurunannya bisa dalam 10%
- Kegiatan apa saja yang di lakukan *OTL* dalam 6 bulan kebelakang ?
- Bagaimana dengan iuran dan keswadayaan anggota ? kalau belum jalan kenapa ? berapa iuran tersebut jumlahnya ? perbulan atau bagaimana ?
- Bagaimana keteriibatan perempuan dalam OR ? kalau tidak ada kenapa ? berapa orang yang teriibat dalam struktur organisasi ? berapa orang yang ikut dalam musyawarah arganisasi
- Apakah OR sudah mempunyai sekretariat ? kalau ada dari mana ? bagaimana membangunnya ? dan kalau belum ada kenapa ?
- Masatah apa saja yang dihadapi aieh OR daiam mengurus organisasi supaya tetap jalan?
- Jelaskan penyebab dari masaiah - masalah yang dihadapi OR ?
- Bagaimana cara memecahkan masalah yang di hadapi OR ?

II. Tentang Tanah

- Apakah anggota di OTL sudah mempunyai lahan garapan ? kalau sudah berapa luas rata - rata kepemilikan lahan ? berapa luas minimal ? dan berapa luas maksimal ?
- Apakah sudah dilakukan penertiban garapan ? kalau belum kenapa ? apakah ada masalah dalam penertiban garapan ? bagaimana cara mengatasinya ?
- Berapa luas total lahan garapan yang sudah dikuasai ?
- Apakah *OTL* sudah mempunyai tahan kolektif ? kalau sudah punya bagaimana cara mengelolanya ? kalau belum punya kenapa ? apa masalahnya ?

III. Tentang Ekonomi

- Bagaimana kondisi umum ekanomi anggota ? apakah ada penambahan atau tidak ? berapa pendapatan penggarap per hari sebelum menggarap dengan sesudah menggarap? Apakah ada perubahan yang baik atau yang jelek ?
- Apakah ada usaha lain untuk penambahan pendapatan keluarga ? apakah itu kalau ada ?
- apakah hasil produksi yang didapat dari pertanian ada yang dialah dalam bentuk lain, misalnya pisang menjadi kripik
- Apakah ada usaha bersama yang dilakukan oleh organisasi ? seperti apa kalau ada usaha.

IV. Tentang Produksi

- Apakah sudah dilakukan penataan produksi ?
- Jenis tanaman apa saja yang ditanam ? (Jangka pendek & .langka panjang)
- Berapa lama persis penanaman ?
- Berapa nilai hasil panen/ha (Nilai kotor & nilai bersih)
- Produk unggulan apa yang terdapat di OTL ?

V. Tentang Hubungan antar pihak

- Bagaimana hubungan Organisasi dengan Pemdes
- Bagaimana hubungan Organisasi dengan BPD
- Bagaimana hubungan Organisasi dengan Tokoh agama dll

VI. Tentang kondisi PEMDES

- Bagaimana kandisi pemerintahan desa ?
- Apa saja program Desa ?
- Bagaimana hubungan PEMDES dengan masyarakat desa sekitar ?
- Bagaimana pengelolaan keuangan dan pembangunan desa ?
- Apa program desa dalam bidang pertanian ?

- Bagaimana kemampuan PEMDES dafam menyusun ABDES dan PERDES?

VII. Tentang Sarana & Prasarana umum

- Bagaimana kondisi sarana & Prasarana yang terdapat di desa ?
- Bagaimana tingkat pendidikannya ? berapa jumlah sekoiah yang terdapat di desa
- Bagaimana kondisi ekanomi masyarakat desa sekitar ?
- Bagaimana kondisi jalan yang terdapat di desa sekitar ?
- Bagaimana sikap OTL terhadap kondisi yang terdapat di desa sekitar ?

VIII. Tentang Kondisi Umum Lingkungan

- Berapa iuas kawasan lingkungan hidup untuk menjaga resapan air (sumber mata
- Berapa luas lahan kritis (labil) ?
- Apa masalah lingkungan hidup ?
- Apa program OTL dalam memeiihara & memperbaiki lingkungan hidup ?

Masalah

1. Masalah - masalah apa saja yang di hadapi OTL

a. Indentifkasi masaiah
b. Prioritas masalah yang paling utama c. Analisa masalah
d. Pemecahan masafah e. Perencanaan RTL

Advokasi

1. Apa saja yang sudah dilakukan
2. Keberhasilan ?
3. Hambatan ?

Pengorganisasian

1. Dari hasil yang sudah dilakukan ?

Nama OTL : Sagara
Alamat : Cibalong Csirut

I. Tentang Organisasi

- tidak ada perkembangan
- tidak ada penambahan dan penurunan anggota
- kegiatan 6 bulan kebelakang; pembukaan lahan
- keswadayaan ttidak berjalan
- mendukung 3 orang
- Sekretariat belum ada, masih dirumah pengurus
- Supaya organisasi tetap berjalan harus musyawarah

II. Tentang Tanah

- Sudah mempunyai garapan. Rata - rata 1 ha
- Sudah
- Luas total lahan yg dikuasai 940 ha
- Belum

III. Tentang Ekonomi • Minim

- Tidak ada usaha tambahan untuk pendapatan

- Pisang

IV. Tentang Produksi

- Penataan produksi belum dilakukan
- lenis tanaman pisang, mangga, karet
- Persis penanaman 1 - 5 tahun
- Produk unggulan pisang & jeruk

V.Tentang hubungan antar pihak
- Baik
- Baik
- Baik

VI. Tentang kondisi pemdes
- Normal
- Program desa perbaikan jalart dan pengaspalan
- Balk

VII. Tentang sarana dan prasarana
- Cukup memadai
- Cukup. 10 SDN
- 1 gedung sanawiyah
- Cukup
- Kondisi jalan rusak sekarang lagi tahap perbaikan

VIII. Tentang kondisi umum lingkungan hidup
- Luas lahan resapan air (umber mata air) 10 ha
- Luas kawasan lahan kritis 45 ha
- Masalah lingkungan hidup tidak bermasalah
- Program OTL soal lingkungan hidup dilakukan penataan ulang

Nama OTL : Cikeuyeup
Alamat : Desa Sindangsari Cisompet Garut

I. Tentang Organisasi
- Keadaan OTL stabil
- Kegiatan OTL melakukan penanaman keras (jangka panjang) 30 % komoditas kopi, cengkeh, nangka, petay, alpukat dan kelapa
- Membuat jalan secara swadaya
- Membuat irigasi sacara swadaya
- Iuran anggota melalui usaha kolektif, iuran 2 minggu Ix (saat panen pisang)
- Perempuan belum terlibat di struktur organisasi, tapi melakukan pekerjaan organisasi bersama - sama
- Sekretariat belum ada dana, tapi sudah di rencanakan
- Musyawarah bersama, arisan yg dibuka 2 minggu sekali, pengajian 1 minggu 1x
- Ada masalah tapi bisa di selesaikan dengan musyawarah

II. Tentang Tanah
- Sudah mempunyai lahan garapan, 2000- 3000 m^2
- Sudah melakukan penertiban lahan garapan
- Luas lahan yg dikuasai 41 ha
- Sudah mempunyai lahan kolektif dan di kelola bersama organisasi

III. Tentang Ekonomi
+ Ekonomi meningkat
+ Sebelum menggarap Rp. 5,000/hari dan sesudah menggarap Rp. 10.000 .Perubahan balk
- Peternakan ; kambing, ayam dan kelinci
- Hasil produksi belum diafah menjadi barang konsumsi, tapi dijuai mentah
- Usaha kolektif sudah ada

IV. Tentang produksi
+ 60% sudah dilakukan
- Jangka pendek singkong, ubi, talas, cabe, timun, jangung
- Jangka panjang kopi, cengkeh, kelapa, petay, nangka, alpukat clan sirsak

- Jangka pendek 3 bulan sekali,jangka menengah 1 tahun sekali clan jangka panjang baru dimulai
- 1.200 kg/bulan
- 14.000 kg(tahun
+ Pisang dan singkong

V. Tentang hubungan antar pihak

- Berjalan baik, selama ini tidak mengganggu pada kemajuan organisasi
+ Berjalan baik, pengurus oragnisasi masuk kejajaran BPD
- Berjalan baik, pengurus organisasi merupakan tokoh agama

VI. Tentang kondisi pemdes

- Lebih meningkat dalam mengajukan fasilitas
- Iuran desa
- Pajak produksi
+ Hubungan desa dengan masyarakat cukup balk
- Keuangan desa cukup balk
- Memberi bantuan tanaman keras
- Cukup balk

VIII. Tentang kondisi lingkungan hidup

- 14 ha
- 4
- Tidak ada masalah
- Secara kerja kolektif

Nama OTL : Benjang
Alamat : Ds Sindangsari - Cisompet Garut

I. Tentang Organisasi

- Ada kemunduran dalam persatuan. 75% tidak kompak
- Tingkat kesadaran lemah
- Tidak ada penambahan dan penurunan anggota
- Kegiatan OTL 6 bulan kebelakang; memberikan dana tambahan untuk pembangunan mesjid, diskusi 1 bulan sekali, mencari dana swadaya untuk pembangunan mesjid, inisiatif pengurus untuk memberikan bantuan untuk orang yg meninggal, sakit (dana kematian ada), gotong royong, arisan anggota SPP yg dibuka dua minggu 1 kali
- Iuran wajib anggota belum berjalan tapi bentuknya kolektif, juga iuran perjuangan Rp. 70.000/bulan
- Peran perempuan tidak terlibat dalam struktur organisasi
- Dalam proses musyawarah perempuan yang terlibat hanya 30%
- Sekretariat belum ada karena dananya belum cukup
- Ada sanksi yg di sepakati bersama, masalahnya kurang berorganisasi
- Cara memecahkan masalah dengan musyawarah bersama

II. Tentang Tanah

- Anggota sudah punya lahan garapan. Luas rata - rata 0,5 – 500 m2
- Sudah dilakukan penertiban lahan garapan
- Masalah ada , tapi bisa di antisipasi
- Luas total lahan yang dikuasai 30 ha
- Lahan kolektif sudah ada, tapi pengelolaannya belum kompak

III. Tentang Ekonomi

- Ada peningkatan, sebelum menggarap Rp. 2.500 per hari dan sesudah menggarap Rp. 8.000 per hari. Ini adalah perubahan baik

- Usaha lain untuk penambahan pendapatan yaitu ; berternak ayam, kambing, bebek (selain buruh kuli)

IV. Tentang Produksi

- Pengelolaan belum ada cuma pribadi
- Ada koperasi
- Penataan produksi belum (20% baru dilakukan }
- Tanaman jangka pendek ; kacang, cabe, singkong & ubi
- Tanaman jangka panjang ; petay, jati, nangka, durian, manggis dan rambutan
- Persis penanaman jangka pendek 40 hari dan jangka panjang 5 tahun
- Hasil panen dan 1 ha sekitar 1500 kg (kotor) Rp.525.000, can bersihnya 600.000
- Produk unggulan ; pisang, bogja, singkong atom

V. Tentang hubungan antar pihak

- Tidak ada keberpihakan kepada penggarap (melalui kebijakan desa }
- Hubungan dengan BPD kurang baik
- Mengajak dan mendukung perjuangan penggarap (tokoh agama, dll.)

VI. Tentang kondisi pemdes

- Pemerintahan desa berjalan
- Ada program pembangunan fisik
- Kebijakan desa tidak merata
- Dana desa tidak transparan
- Belum ada program dibidang pertanian
- Swadaya
- Coklat dan buah - buahml
- Belum ada

VII. Tentang sarana dan prasarana

- Sudah tertata sebagaimana mestinya, tapi belum sempurna
- Rendah
- 2 buah
- Masih lemah
- Masih hancur
- Kerjasama

VIII. Tentang kondisi mum lingkungan

- 25 ha
- Tidak ada
- Untuk sementara tidak ada masalah
- Ditanami dengan tanaman jangka lama

Nama OTL : SPP Dangiang
Alamat OTL : Kiarajangot Cilawu

I. Tentang Organisasi

- Ada kamajuan
- Ada Penambahan anggota sekitar 40 kk
- Tidak ada penurunan dalam keanggotaan
- Kegiatan yang sudah dilakukan dalam waktu 6 bulan kebelakang ; perluasan anggota (mencari anggota), kerja bakti membuat saluran air di Kp Ciharus, pengajian rutin bulanan SPP di Garut, survey ke lokasi kehutanan yang tidak ditanami tanaman keras, partemuan membahas koperasi yang tidak berjalan, peresmian PUSDIK SPP, pertemuan 1 minggu 1 kali di wilayah basis SPP yang baru dan kelampok arisan beras ibu - ibu yang sudah berjalan 2 tahun yang sekarang hasil dari kegiatan arisan tersebut bunganya sudah mencapai sekitar 4 kwintal dan pokoknya 1 ton.

- Iuran rutin dari penggalangan pisang tidak berjalan, dikarenakan adanya kecemburuan dari anggata terhadap pengurus. Tetapi dana swadaya yang sifatnya iuran dadakan sampai saat ini tetap berjalan.
- Peran perempuan dalam organisasi juga dilibatkan, bahkan ada yang masuk dalam struktur/ kepengurusan organisasi. Jumlah perempuan yang terlibat dalam proses musyawarah paling dihadiri sekitar 10 orang perempuan.
- Soal sekretariat, di OTL Dangiang dulu ada sekretariat (minjam rumah kosong), tetapi sekarang tidak punya karena untuk membangun secretariat membutahkan dana yang cukup lumayan clan OTL Dangiang sudah merencanakan.
- Masalah-masalah yang dihadapi OTL Dangiang adalah ;

1. Adanya salah satu anggota yang menggadaikan tanahnya bahkan sampai di jual, penyebabnya dikarenakan anaknya sakit dan membutuhkan biaya yang cukup besar akhirnya lahan garapannya dijual
2. Pengurus banyak tetapi kurang aktif, penyebabnya karena pengurus yang baru usianya muda-muda jadi kalau menghadapi orang yang tua-tua takut seperti masukan-masukan dari pengurus sekarang kurang ditanggapi aleh kepengurusan yang lama
3. Pengurus/anggota yang pernah mengikuti pendidikan/sekolah kurang membagikan pengalamannya, penyebabnya mungkin dikarenakan dari organisasi kurang mensuport / memberi dukungan secara finansial (dana II).

II. Tentang Tanah

- Semua anggota SPP semuanya sudah mempunyai lahan garapan
- Rata-rata kepemilikan lahan 1,10 tumbak
- Luas minimal Iahan yang dimiliki sekitar 35 tumbak dan maksimai 300 tumbak
- Soal penertiban garapan di OTL Dangiang sudah dilakukan
- Luas total lahan yang sudah dikuasai sekitar 40 ha (21 ha wilayah perkebunan dan 19 ha wilayah kehutanan) Soal lahan kolektif, OTL Dangiang tidak mempunyai, dikarenakan lahannya terbatas (banyak anggota daripada lahan)

III. Tentang Ekonomi

- Walaupun pendapatan minim, namun kesadaran masyarakat dalam organisasi cukup meningkat
- Pendapatan perhari sebelum menggarap lahan sekitar Rp. 3000 dan sesudah mempunyai lahan garapan pendapatan perhari mencapai Rp. 10.000
- OTL Dangiang mengganggap bahwa perubahan tersebut baik
- Selain menggarap fahan ada usaha lain yang dilakukan oleh anggota seperti ; jualan baso, gotok dan buruh tani
- Hasil produksi yang terdapat di OTL Dangiang tidak olah, tetapi dijual langsung bahan mentah
- Di OTL Dangiang juga belum ada usaha bersama yang dilakukan karena belum mengetahui ilmunya

IV. Tentang Produksi

- Belum ada penataan produksi
- Jenis tanaman yang terdapat di OTL Dangiang ; Akar wangi, padi, pisang, kol, cabe keriting, pecay, wortei
- Jenis tanaman jangka panjang ; kayu aprika, suren, aipukat
- Jenis tanaman jangka pendek ; singkong, padi, kacang - kacangan, pisang dll.
- Lama persis penanaman jangka pendek ; 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan
- Lama persis penanaman jangka panjang ; tahunan
- Produksi unggulan yaitu ; Akar Wangi
- Hasil panen akar wangi dari per 100 tumbak/tahun mendapat hasil kotor Pp. 3 juta dan nilai bersih Rp. 2 juta

V. Tentang hubungan antar pihak
- Hubungan organisasi dengan PEMDES renggang, karena PEMDES belum mengetahui apa itu SPP
- Hubungan organisasi dengan BPD, secara pribadi / individu baik
- Hubungan organisasi dengan tokoh agama dll saling merdukung

VI. Tentang kondisi Pemerintahan Desa
- Pihak Pemdes sering menakut - nakuti ke anggota SPP yang baru —
- Kinerja Pemdes kurang aktif
- Program yang terdapat di Desa yaitu ; pajak tanah, urdes tidak ada, rencana pembangunan jalan gang, mesjid, bantuan untuk orang jampo dan anak yatim piatu
- Hubungan Pemdes terhadap masyarakat lain baik, kecuali terhadap SPP
- Soal bagaimana pengelolaan keuangan / pembangunan desa di pemdes tidak tahu
- Program Pemdes dalam hal pertanian adalah penyuluhan tentang tidak di perbolehkannya menanam akar wangi karena khawatir akan terjadi longsor
- Pemdes kurang mampu dalam menyusun ABDES dan PERDES

VII. Tentang sarana dan prasarana umum
- Kondisi jalan yang ada sedang
- Tingkat pendidikan masih rendah
- Bangunan sekolah yang terdapat di Dangiang sekitar 3 SDN
- Kondisi ekonomi masyarakat di Desa Dangiang sangat minim dan banyak yang bekerja sebagai buruh perkebunan yang pendapatannya hanya cukup untuk makan saja.
- Soal perbaikan jalan pihak Pemdes sudah mengajukan

VIII. Tentang Lingkungan hidup
- Luas kawasan lingkungan hidup untuk menjaga resapan air / sumber mata air sekitar 25 ha di blok Kiaralawang
- Luas kawasan lahan kritis sekitar 5 ha di blok Kiaralawang, Ciledug, dan lahan tutupan
- Soal kebersihan sebagian baik sebagian tidak seperti kotoran sapi
- Program organisasi dalam memelihara dan memperbaiki lingkungan hidup; penanaman tanaman keras yang lainnya belum ada

Nama OTL : Bojong
Alamat : Kalijaya Ciamis

I. Tentang Organisasi
- Kurang aktif (menurun)
- Tidak ada penambahan angqota
- Tidak ada penurunan anggota
- Kegiatan se!ama 6 bulan ; musyawarah 2 minggu 1 x, pengajian, arisan ibu-ibu
- Iuran swadaya anggota sebagian jalan sebagian tidak
- Keterlibatan perempuan dalam musyawarah sekitar 2 orang
- OTL sudah mempunyai sekretariat yang dibangun secara swadaya (gotong royong
- Supaya organisasi tetap berjalan ; mengolah kebun dan ngondisikan hasil praduksi. Penyebab organisasi kurang aktif karena keuangan kurang lancer
- Cara memecahkan masalah yg dihadapi di OTL ; hasil produksi di simpan Rip. 25/kg dan dimasukan ke buku tabungan.

II. Tentang Tanah
- Anggota sudah mempunyai lahan garapan. Luas rata - rata 350 bata dan luas maksimal 1 ha
- Sudah dilakukan penertiban lahan garapan
- Luas total lahan yang dikuasai 24 ha
- OTL sudah mempunyai lahan kolektif dan dikelola masyarakat (tiap - tiap klp.)

III. Tentang Ekonomi
- Meningkat pelan - pelan. Ada perubahan baik
- Ada usaha lain untuk penambahan ekonomi keluarga anggota
- Hasil produksi tidak ada yang diolah
- Ada usaha bersama yang di lakukan

IV. Tentang Produksi
- Sudah dilakukan penataan produksi
- Jenis tanaman ; durian, petay; coklat, manggis dan alpukat
- Persis penanaman 3 tahun
- Nilai hasil panen /ha sekitar 2 kwintal/bln
- Poduk unggulan; pisang, padi dan sayuran

V. Tentang hubungan antar pihak
- Hubungan organisasi dengan pemdes sebagian mendukung, sebagian acuh
- Dengan BPD sama
- Dengan tokoh agama dll mendukung

VI. Tentang kondisi pemdes
- Cara lisan mendukung
- Program desa ; kondisikan jalan dan mengajukan ternak sapi
- Hubungan pemdes dgn masyarakat sekitar sebagian mendukung sebagian acuh
- Lara pengelolaan keuangan desa, sebelum penggunaan ada musyawarah
- Program desa dalam hal pertanian ; memberitahu can menugaskan menanam coklat
- Soal pembuatan perdes dan APBEDS dirapatkan dulu ditiap - tiap dusun

I. Tentang sarana dan prasarana
- Yang terdapat di desa ada sekolah SD, sarana olah raga, dan peribadatan
- Program pertanian di desa belum ada
- APBDES dari pajak dan produksi dan perdes ttg status tanah lahan produksi

VII. Tentang sarana dan prasarana
- Jalan hancur berat
- Pendidikan kurang. MTS 1 di satu desa dan SDN 3 buah
- Balai desa cukup
- Mengajak dan pendekatan

VIII. Tentang kondisi lingkungan umun
- 35 ha resapan air
- Lahan kritis 50 ha
- Tidak ada
- Tidak ada

Nama OTL : Banjar Wiyar II
Alamat : Dusun Sukamaju / Sukanagara - Ciamis

I. Tentang Organisasi
- Perkembangan tetap
- Tidak ada penambahan dan penurunan anggota
- Kegiatan OTL 6 bulan kebelakang ; pengumpulan dana, menanami tanaman keras, penyuluhan - penyuluhan dan penggalangan organisasi
- Iuran OTL belum lancar, keswadayaan diambil dimana ada kegiatan dan luran bulanan belum ada
- Kegiatan perempuan baru/sedang di kembangkan. Yg ikut kegiatan dalam proses musyawarah kurang lebih 30 orang
- Sekretariat ada tapi belum punya kantor
- Organisasi supaya tetap jalan di perbanyak pertemuan antar pengurus dan anggota dalam bentuk penyuluhan / musyawarah karena banyak hambatan yg harus di atasi

II. Tentang Tanah

- Semua pemohon sudah mempunyai lahan garapan, hanya luasnya belum sama. Minimal 50 bata
- Penertiban garapan belum ada, karena HGU akan berakhir 31 desember 2005, juga ada penggarap non pemohon yg memihak kapada perkebunan, juga akibat Jual beli garapan hinga kemampuan garap tidak sama
- Luas total garapan yg dikuasai 215 ha

III. Tentang Ekonomi

- Ekonomi masyarakat setelah tanah tsb di perjuangkan penghasilan bertambah. Sebelumnya pendapatan penggarap rendah karena harus diambil sawaan tanah 100/bata Rp. 10.000 sedang sekarang tidak ada
- Usaha lain untuk peningkatan pendapatan belum ada
- Pengelolaan praduksi belum ada
- Usaha bersama yg dilakukan organisasi belum ada

IV. Tentang Produksi

- Penataan produksi baru dilakukan
- Tanaman jangka pendek ; kacang tanah, jagung, kacang - kacangan, kedelai, clan pad!
- Tanaman jangka panjang ; coklat, ketapa, kedongdong, rambutan, jati , afbasia dl!
- Nilai bersih panen/ha belum diketaui nilainya
- Produksi unggulan pisang, kacang tanah, kacang - kacangan, padi , jagung dan singkong

V. Tentang hubungan antar pihak

- Kurang bak
- Baru dengan anggotanya yg ada di lingkungan OTL
- Ada/baik

VI. Tentang kondisi pemdes

- Masih takut oleh camat, karena camat tidak setuju tentang sengketa tanah
- Program desa belum ada
- Baik
- Dalam bentuk musyawarah BPD dan .....saja
- Lemah karena sumber dana desa kecil
- Kondisi jalan badc
- Kurang merespon

VIII. Tentang kondisi umum lingkungan hidup

- 30 ha
- Tidak ada lahan kritis
- Tidak ada maalah
- Menghiajukan hutan kembali (hutan kerakyatan)

Nama OTL: Kalijati
Alamat : Ciamis

I. Tentang Organisasi

- Jalan ditempat
- Tidak ada penambahan
- Ada penurunan anggota 5%, karena di takut - takuti oleh aparat desa
- Kegiatan 6 bulan kebelakag; memelihara jalan, membuat pos kamling, menggarap lahan kolektif
- Iuran berjalan Rp. 1000/bulan
- Tidak ada, sudah melibatkan laki-laki/percaya terhadap suaminya, 22 orang, 60 orang
- Sekretariat ada, cuma ada yang membakar. Sekarang lagi di rencanakan dibangun dengan ukuran 5 x 8 m. Biaya swadaya anggota.

- Mengadakan musyawarah mingguan, pengajian dan kerja kelompok
- Penyadaran anggota, dana operasional. Cara memecahkannya melalui musyawarah

II. Tentang Tanah

- Sudah. Rata-rata 0,5 ha maksimal 1 ha
- Sudah dan tidak ada masalah
- Luas total lahan 150 ha
- Sudah. Sementara ditanami pohon pisang dan singkong

III. Tentang Ekonomi

- Ada peningkatan (sedikit)
- Pendapatan perhari belum bisa di pastikan
- Ada pendapatan dari usaha lain yaitu nyadap kelapa
- Hasil produksi belum ada yg di olah
- Belum ada usaha bersama yang dilakukan

IV. Tentang produksi

- Penataan produksi belum diiakukan
- Jenis tanaman jangka pendek ; padi, kacang, pisang & singkong
- Jenis tanaman jangka panjang ; kelapa, petay, durian, coklat, nangka walanda, dll.
- Lama parsis penanaman ada yang belum dan ada yang sudah 1 tahun
- Hasil panen dari padi 1000 kg/ha (kotor) clan bersih sekitar 800 kg/ha
- Produk unggulan pad! clan singkong

Tentang hubungan antar pihak

- Bertolak belakang
- Baik
- Baik

VI. Tentang kondisi pemdes

- Acak - acakan
- Program desa tidak ada
- Hubungan pemdes dengan masyarakat sekitar tidak baik
- Program pertanian di desa tidak ada
- Pengelolaan keuangan desa tidak tahu
- Kemampuan pemdes soal APBDES / PERDES tidak ada

Nama OTL : Nagrog
Alamat : Tasikmalaya

I. Tentang Organisasi

- maju mundur
- ada penambahan anggota tapi belum terorganisir
- penolakan reclaiming perhutani
- Jalan karena anggota susah diajak rapat
- Perempuan terlibat sekitar 150 orang
- Kalau pertama kompak, seluruhnya siap, kalau sekarang cuma segelintir
- Karena sekarang sulit di kompakan
- Belum ada masalah, hanya masyarakat susah di kompakan/rapat

II. Tentang Tanah

- Ada yang sudah punya sebagian. Rata -rata 2/3 ha
- Belum dilakukan penertiban
- Luas total lahan yang dikuasai 400 ha .
- Belum

III. Tentang Ekonomi
- Ada. Sebelum menggarap Rp. 150.000, sesudah menggarap Rp. 350.000
- Ada
- Cuma pisang
- Belum ada, karena ada perbedaan antara organisasi dengan yang lain

IV. Tentang Produksi
- Sudah
- Pisang, kelapa, jengkol, petay, kadu dll. Persis penanaman 4 tahun
- Hasil panen 1 ton dari pisang
- Tetap RPR

V. Tentang hubungan antar pihak
- Baik saja dan pemdes setuju
- Sama
- Sama

VI. Tentang kondisi pemdes
- Mendukung secara mulut
- Tidak punya program untuk SPP
- Tentang pertanian ada hambatan
- Tidak transparan
- Belum becus

VII. Tentang sarana dn prasarana
- Sebagian mash rusak parah
- 4 SDN
- Sama halnya lemah
- Sedang direpisi tapi plastic
- Sirik karena tidak transparan

VIII. Tentang kondisi umum lingkungan hidup
- 1000 he
- 100 ha
- Karena curam selalu di gundulkan
- Di hijaukan kembali

Nama OTL : Cieceng
Alamat : Tasik

I. Tentang Organisasi
- Perkembangan ya
- Tidak ada, masih 800 kk
- Tidak ada
- Kegiatan kebelakang ; penataan koperasi, pembentukan pengurusnya, penyadaran koperasi, penataan garapan ulang, pembuatan sekretariat, mencalonkan untuk kepala desa, penyadaran tentang pemdes, mengikuti dan membahas tentang perlunya pengajian bulanan tingkat kabupaten, mendorong keluarnya perdes, menguasai desa, aksi solidaritas & rencana pembentukan sekolah (MTS/MI)
- Iuran tetap berjalan Rp. 500/bulan dan presentasi dari hasil produksi
- Perempuan masih pasif, hanya dalam aksi karena agenda peranan perempuan kab tidak jalan (tokoh gender SPP)
- Tergantung relatif
- Ya, punya atau ada
- Dari masyarakat/anggota oleh masyarakat, untuk masyarakat dengan swadaya

- Koperasi gagal karena ada sistem koperasi yang belum dikuasai den RPR
- Kepengurusan tingkat kabupaten kurang/tidak pernah datang kelapangan untuk sering kordinasi
- Tidak ada peran perempuan (pelopor)

II. Tentang Tanah

- Sudah mempunyai lahan garapan. 0,5 pemohon
- Minimal 0,25 maksimal 1 ha
- Garapan masih masalah, belum ada penelitian yang kecocokan/layak tanam, cara mengatasinya perlu penelitian tentang tanah
- Total luas lahan 600 ha
- Lahan kalektif ada, cara pengelolaannya belum maksimal

III. Tentang Ekonomi

- Ada peningkatan dari Rp. 2.504/hari menjadi Rp10.000/hari
- Perubahan jelas ada dan baik
- Untuk organisasi hanya presentase hasil produksi ditambah swadaya. Untuk keluarga hasil tanam
- Usaha bersama tidak ada

IV. Tentang Roduksi

- Ya
- Jangka pendek pisang dan jangka panjang kayu aprika, kalapa, kopi, dll.
- Panen 2 bon/2 hr 1 x (700)= Rp31.500.000 per bulan
- Produk unggulan saat ini pisang

Tentang hubungan antar pihak

- Desa terkuasai. Presentase hasil produksi 5% untuk desa
- Organisasi dengan tokoh agama dll. baik

VI. Tentang kondisi pemdes

- 70 9rn pemdes dari SPP
- Perdes tentang garapan
- Perlindungan terhadap kasus tanah
- Hubungan pemdes dengan masyarkat baik/mendukung
- Membayar pajak desa (perdes) ditambah hasil dari produksi 5 %

Nama OTL : Tanjung Karang
Alamat : Cigalontang, Tasikmalya

I. Tentang Organisasi

- Masih berjalan
- Tidak ada penambahan/penurunan anggota
- Ada, karena banyak lahan yang tidak digarap dan tidak aktif di organisasi (musyawarah maupun gotong royong)
- Pembuatan dan pengembangan bunpak (demplot)
- Iuran wajib tidak berjalan, tapi diganti dengan hasil bunpak
- Terakhir ini perempuan mulai aktif (musyawrah maupun gotong royong), tetapi dalam struktur orqanisasi belum terlibat. Yang terlibat dalam musyawarah kurang lebih IS - 20 orang
- Sudah,swadaya
- Mengurangnya semangat organisasi, penyebabnya kurang musyawarah di tingkat OTL, para pengurus OTL (Kordinator dusun, OTL, ketua kelompok jarang bertemu dgn anggotanya), kurang simpati anggota terhadap pengurus. Solusinya; menghidupkan kembali musyawarah dan membangun kepercayaan dan trarspararc dalam segala kegiatan

II. Tentang Tanah

- Sudah. Rata - rata 200 bata

- Sudah. Tidak ada. Mendatangi anggota yang bersangkutan
- Kurang lebih 450 ha digarap 647 anggota
- Sudah. Tiap kordinator mengelolanya secara bersama - sama. Masalahnya ada anggota yang belum tahu manfaat dan fungsi lahan kolektif itu sendiri

III. Tentang Ekonomi

- Masih lemah. Ada, sebelum menggarap pendapatannya Rp. 3.000 setelah menggarap Rp.4.500
- Ada, dari hasil demplot
- Ada, tapi belun menyeluruh
- Ada, koperasi

IV. Tentang Roduksi

- Sudah
- Jangka pendek sayuran dan jangka panjang buah-buahan dan tanaman keras (albasia, kelapa dll)
- Persis penanaman jangka panjang 2-3 tahun dan jangka pendek 6 bulan
- Penghasilan kotar 2-3 ton/200 bata
- Petay dan kol

V. Tentang hubungan antar pihak

- Kurang baik
- Kurang baik
- Agak baik

VI. Tentang kondisi pemdes

- Tidak tahhu, semuanya tidak terbuka dengan masyarakat

VII. T entang sarana dan prasarana

- Sarana dan prasarana di desa baik
- Tingkat pendidikan sekolah yg ada di wilayah Cikujang ada 3 buah SDN
- Tingkat ekonomi di desa sekitar baik
- Kondisi jalan di desa baik, walaupun anggaran swadaya masyarakat
- Sikap OTL terhadap kondisi di desa mendukung dan membantu sarana umum

VIII. Tentang kondisi lingkungan umum

- Luas kawasan lingkungan hidup ada 5.400 ha
- Lahan Kritis di wiiayah OTL Cikujang tidak ada
- Di wiiayah OTL Cikujang lingkungan hidup tidak ada masalah
- Program OTL memelihara lingkungan hidup, penataan wilayah, memelihara sumber mata air dan penataan tanaman - tanaman.

Lampiran 4
Contoh *Statement* SPP

Serikat Petani Cisompet (SPP Cisompet)

Sekretariat: Kp. Padarame Desa Neglasari Kecamatan Cisompet
Pernyataan Sikap Masyarakat Kampung Padarame atas Pernyataan Kepala Desa Neglasari pada tanggal 19 Juni 2002

Bahwa: Masyarakat Padarame Menerima Tumpang Sari Di Lahan Eks HGU perkebunan Bunisari Lendra

Setelah mendengarkan pernyataan sikap kepala desa Neglasari yang dibacakan pada tanggal 19 Juni 2002 bahwa masyarakat Padarame menerima tunpang sari di lahan eks HGU perkebunan Bunisari Lendra, maka kami atas nama masyarakat Padarame menyatakan sikap:

1. Mengajukan keberatan kepada ketua dan anggota BPD Desa Neglasari bahwa pernyataan yang dibacakan oleh Kepala desa Neglasari telah meresahkan kami sebagai penggarap dilahan eks HGU perkebunan Bunisari Lendra, karena pernyataan tersebut tidak sesuai dengan prinsip - prinsip keadilan dalam pengelolaan sumber daya a1am.
2. Meminta kepada ketua BPD dan anggotanya untuk segera meminta pertanggungjawaban dan membatalkan pernyataan tersebut, karena tidak sesuai dengan keinginan masyarakat kampung Padarame.

Demikian pernyataan sikap ini kami buat, semoga apa yang kami perjuangkan selama ini diridhoi oleh Alloh SWT.

Padarame, 14 Juli 2002
Atas Nama Seluruh Penggarap eks HGU Perkebunan Bunisari Lendra

Serikat Petani Pasundan
YAPEMAS, FPPMG, FPMR, FARMACI
Jl. Raya samarang, No. 108A Honje Luhur, Cimanganten, Tarogong, Garut – Jawa Barat 44151

PERNYATAAN SIKAP
STOP!!! KEKERASAN TERHADAP PETANI

Petani kembali menjadi tumbal dalam perjuangan mempertahankan tanahnya. Tewasnya sekitar 4 (empat) orang petani yang tergabung dalam Serikat Petani Manggarai di Flores Nusa Tenggara Timor memperlihatkan bahwa Penyelesaian Persoalan Tanah lebih dominan diselesaikan dengan kekerasan oleh pihak Negara.

Memperlihatkan wujud bahwa tidak becusnya pemerintah Indonesia dalam mengelola konflik agraria menjadi berlarut - larut dan tidak bisa diselesaikan.

Berapa lagi korban petani yang akan bertambah, diintimidasi, diteror, dianiaya, diculik, ditangkap dan dipenjarakan, bahkan ditembak hingga tewas.

Melihat persoalan diatas yang dari hari ke hari semakin terakumulasi persoalan-persoalan tentang hak - hak petani, pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam, semakin jelas dibutuhkan sebuah upaya yang kongkrit untuk menyelesaikannya.

Keluarga besar Serikat Petani Pasundan mendukung kepada Serikat Petani Manggarai di Flores Nusa Tenggara Timur:

1. Bela Sungkawa terhadap meninggalnya 4 orang Pejuang Petani Manggarai yang sedang memperjuangkan haknya, bersimpati kepada keluarga yang ditinggalkan semoga diberikan kekuatan dan tetap melawan.
2. Memberikan dukungan kepada perjuangan Serikat Petani Manggarai agar tetap memperjuangkan hak-haknya.

Kepada Pemerintah Indonesia, kami SPP yang berjumlah 700.000 ribu anggota yang tersebar di Wilayah Priangan Timur meminta dan menuntut untuk :

1. Selesaikan semua kasus tanah yang terjadi di seluruh Indonesia
2. Cabut dan tolak semua produk hukum yang bersifat sektoral karena itu merupakan pengkhianatan berhadap mandat Tap MPR No. IX/MPR/2001
3. Laksanakan Ketetapan MPR No.IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam sebagai wujud nyata keberpihakan negara kepada rakyatnya
4. Laksanakan secara cepat dan kongkrit Kepres no. 34 tahun 2003 kebijakan nasional tentang pertanahan secara adil
5. Kutuk dan tolak semua jenis kekerasan dan intimidasi yang dilakukan oleh aparat negara baik itu Polisi maupun TNI dimana nyata-nyata sangat merugikan rakyat dan membuat masyarakat tidak merasa tenang di kampung halamannya sendiri.
6. Mendorong agar sengketa dan konflik agraria seperti yang terjadi di Manggarai, Flores, Nusa Tengqara Timur dan ditempat lain diseluruh Indonesia, dapat diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian konflik agraria yang berpihak kepada kepentingan petani dan korban lainnya, seperti inisiatif yang dilakukan oleh KOMNASHAM melalui gagasan Komisi Nasional untuk penyelesaian konflik agraria
7. Segera bentuk Komite Persiapan Pelaksanaan Pembaruan Agraria dan Pengelolaan SDA, yang berperan dan bertugas untuk meninjau, menyusun dan mempersiapkan pelaksanaan pembaruan agraria.

Demikian pernyataan sikap ini kami buat, kami berharap tuntutan kami diperhatikan dengan seksama karena jika rakyat tidak didengar suaranya maka itu adalah ancaman buat penyelenggara negara.

Garut, 11 Maret 2004
Keluarga Besar Serikat Petani Pasundan

KOALISI TANI INDONESIA

Kami Koalisi Tani Indonesia yang berjumlah jutaan orang yang berada di tiap-tiap kabupaten di seluruh Indonesia dengan ini kami menuntut:

1. Laksanakan pembaruan agraria untuk rakyat
2. Laksanakan Pemberian Tanah untuk rakyat
3. Selesaikan sengekta agrarian di seluruh Indonesia
4. Selesaikan 1872 kasus tanah yang hidup di masa Orde Baru
5. Tolak RUU Perkebunan
6. Cabut dan batalkan UU Sumber Daya Air sebelum dan selagi proses penyempurnaan UUPA
7. Revisi Undang-undang Pokok Kehutnan (Legalisasi jaminan atas tanah yangg digarap dan dikuasai sebagai sumber pokok kehidupan rakyat dan permukiman rakyat)
8. Stop kekerasan dan pemenjaraan terhadap petani
9. Stop militerisme dalam pengelolaan sumber daya agraria
10. Usir WTO dari pertanian
11. Siapapun presidennya laksanakan land reform (pembaharuan agraria)

Jakarta, 8 Juni 2004

Agustiana
Koordinator

Serikat Petani Pasundan (SPP), LSH Bandung, RACA Institute, Serikat Petani Mandiri, SerikatTani Nasional (STN), Serikat Petani Jampang, Paguyuban Petani Cianjur (PPC), HPNP Sukabumi, WALJ-II, HuMA, Sekretariat Bina Desa, Pergerakan, Forum Pemuda Pelajar Mahaslswa Garut (FPPMG), Forum Aspirasi Mahasiswa Masyarakat Ciamis (FARMACI), Forum Pemuda Mahasiswa untuk Rakyat (FPMR) Tasikmalaya, Dewan Kota (Deko) Cianjur, Aliansi Rakyat Bersatu (ARB) Bandung, Forum Petani Sejahtera Indonesia (FOTASI) Pematang Siantar

Profil Penulis

Gutomo Bayu Aji adalah seorang sarjana Antropologi UGM. Pernah bekerja di Pusat Penelitian Kebudayaan UGM dan Pusat Penelitian Kependudukan UGM. Sekarang bekerja sebagai peneliti di Bidang Human-Ecology, Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, Jakarta. Disamping aktif melakukan penelitian sosial juga aktif di LSM antara lain pernah menjadi Direktur Eksekutif Yayasan Interseksi tahun 2003-2005.